

711
1015
P a

**FENOMENA URBANISASI KAWASAN
PINGGIRAN KOTA JAKARTA**
(Studi Kasus : Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor)

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program
Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

MOH. INSAF
L4D002104



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**FENOMENANA URBANISASI KAWASAN
PINGGIRAN KOTA JAKARTA**
(Studi Kasus : Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor)

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

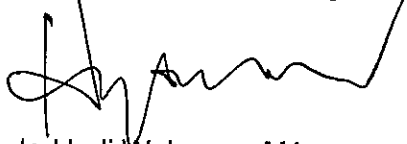
Oleh :

MOH. INSAF
L4D002104

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 27 Maret 2004

Pembimbing Pendamping



Ir. Hadi Wahyono, MA

Pembimbing Utama



DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES. DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 27 Maret 2004



MOH. INSAF
NIM L4D 002104

"...dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...."

(QS. Al-Mujadalah:11)

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi ulul albab. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah pada saat berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): " Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran:190-191)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

**Orang-Orang Tercinta : Ibuda Tercinta serta Kakak-kakakku
Yang Tidak Pernah Lupa Akan Doanya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas perseorangan penyusunan Tesis ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Judul Tesis ini adalah “Fenomena Urbanisasi Kawasan Pinggiran Kota Jakarta” dengan mengambil studi kasus di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Atas selesainya Tesis ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc dan Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak PM Brotosunaryo, SE, MSP dan Bapak Samsul Ma’rif SP, MT yang telah memberikan kritikan dan masukan pada sidang Tesis penulis. Semoga amalan beliau semua mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Amin.

Hanya kepada Allah Swt penulis memohonkan balasan untuk semua pihak yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penulisan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, kami merasa bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini. Semoga tulisan yang belum sempurna ini ada manfaatnya. Amin

Semarang, Maret 2004

Penulis,

Moh. Insaf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	9
1.3.1 Tujuan Studi	9
1.3.2 Sasaran Studi	9
1.4 Pengertian Pinggiran Kota Metropolitan	10
1.4.1 Pinggiran Kota Menurut Literatur	10
1.4.2 Pinggiran Kota Jakarta	11
1.5 Ruang Lingkup	13
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial	13
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial	13
1.6 Kerangka Pemikiran.....	18
1.7 Metodologi Studi.....	20
1.7.1 Pendekatan Studi	20
1.7.2 Metode Pelaksanaan Studi	22
1.8 Sistematika Pembahasan	29
BAB II FENOMENA PERKEMBANGAN WILAYAH	
 PINGGIRAN KOTA	31
2.1 Pengertian Kota	31
2.2 Perkembangan Kota	33
2.2.1 Urbanisasi	40
2.2.2 Suburbanisasi	43
2.2.3 Konurbasi	44
2.3 Dari Pusat ke Pinggiran Kota	45
2.3.1 Fungsi Pusat Kota	45
2.3.2 Permasalahan Pusat Kota	47
2.4 Pengertian Pinggiran Kota	48
2.5 Pergeseran dari Pusat Kota ke Wilayah Pinggiran Kota	49
2.6 Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pinggiran Kota	51

2.7 Hipotesis Teoritis	53
BAB III DESKRIPSI UMUM WILAYAH STUDI	54
3.1 Kedudukan Daerah Penelitian dalam Sistem Kota Metropolitan DKI Jakarta	54
3.2 Kependudukan Daerah Penelitian Sebagai Bagian dari Sistem Kota Cibinong	55
3.3 Perkembangan Kecamatan Bojonggede.....	55
3.4 Gambaran Desa Bojonggede.....	62
3.4.1 Perkembangan Penduduk Desa Bojonggede	62
3.4.2 Perkembangan Mata Pencaharian Penduduk Desa Bojonggede....	62
3.4.3 Perkembangan penggunaan Lahan Desa Bojonggede.....	66
3.5 Hipotesis Berbasis Empiris	68
BAB IV FENOMENA PERKEMBANGAN URBANISASI DI DESA BOJONGGEDE	69
4.1 Kedudukan Desa Bojonggede terhadap Pusat Kota (Jakarta)	69
4.2 Analisis Kondisi Eksisting di Desa Bojonggede.....	73
4.2.1 Pertambahan Jumlah penduduk.....	73
4.2.2 Perubahan Pola Penggunaan dan Kepemilikan Lahan.....	80
4.2.3 Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi	90
4.3 Analisis Implikasi Perkembangan Desa Bojonggede.....	97
4.3.1 Implikasi perubahan Penggunaan Lahan.....	98
4.3.2 Implikasi perubahan Sosial Penduduk Desa Bojonggede.....	100
4.3.3 Implikasi perubahan Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Bojonggede.....	103
4.4 Verifikasi Teoritis dan Empiris.....	106
4.4.1 Verifikasi Teoritis	106
4.4.2 Verifikasi Empiris.....	107
4.5 Proses Perkembangan Urbanisasi di Desa Bojonggede dalam Teori/konsep Urbanisasi	108
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi	118
5.1 Temuan studi.....	118
5.2 Kesimpulan.....	121
5.3 Rekomendasi	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	126
RIWAYAT HIDUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Ringkasan Pendekatan Studi	21
Tabel I.2	Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder	24
Tabel I.3	Identifikasi Kebutuhan Data Priser.....	24
Tabel III.1	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bojonggede Tahun 1988-1994	59
Tabel III.2	Pertumbuhan Penduduk Desa Bojonggede.....	64
Tabel III.3	Perubahan Mata PencaharianPenduduk Desa Bojonggede	64
Tabel III.4	Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Bojonggede	65
Tabel IV.1	Alasan Penduduk Pendetang Memilih Desa Bojonggede	74
Tabel IV. 2	Pertumbuhan Penduduk Desa Bojonggede	75
Tabel IV.3	Distribusi Jumlah Penduduk Asli dan Commuter di Desa Bojonggede	76
Tabel IV.4	Prediksi Jumlah Penduduk Asli dan Commuter di Desa Bojonggede	78
Tabel IV.5	Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Bojonggede	80
Tabel IV.6	Latar Belakang Perubahan Penggunaan Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian di Desa Bojonggede	82
Tabel IV.7	Perubahan Pemilikan Lahan dari Penduduk Asli di Desa Bojonggede	82
Tabel IV.8	Penggunaan Lahan Oleh Commuter di Desa Bojonggede	85
Tabel IV.9	Frekuensi Penjualan Lahan Penduduk Asli Desa Bojonggede	86
Tabel IV.10	Perubahan Mata Pencaharian Penduduk Desa Bojonggede	93
Tabel IV.11	Latar Belakang Perubahan Mata pencaharian Penduduk Desa Bojonggede dari Pertanian ke Non Pertanian	94
Tabel IV.12	Harga Lahan di Desa Bojonggedemenurut Status dan Penggunaannya.....	98
Tabel IV.13	Latar Belakang Perubahan Kondisi Sosial Penduduk Desa Bojonggede.....	100
Tabel IV.14	Tahapan Proses Perkembangan Desa Bojonggede	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Jakarta	13
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Bogor	14
Gambar 1.3	Peta Kecamatan Bojonggede	15
Gambar 1.4	Peta Wilayah Studi.....	16
Gambar 1.5	Kerangka Pemikiran	18
Gambar 2.1	Teori Konsentris.....	32
Gambar 2.2	Teori Sektor	33
Gambar 2.3	Teori Inti Berganda	34
Gambar 2.4	Pola Perkembangan Kota.....	36
Gambar 3.1	Peta Kabupaten Bogor	55
Gambar 3.2	Peta Kecamatan Bojonggede	57
Gambar 3.3	Peta Desa Bojonggede	62
Gambar 3.4	Peta Kondisi Desa Bojonggede.....	63
Gambar 3.5	Peta Penggunaan Lahan	66
Gambar 4.1	Consentric Zone	72
Gambar 4.2	Prosentase alasan Penduduk Pendetang Memilih Desa Bojonggede.....	75
Gambar 4.3	Perbandingan Jumlah Penduduk Asli dan Commuter di Desa Bojonggede	77
Gambar 4.4	Presiksi Jumlah Penduduk Asli dan Commuter di Desa Bojonggede	78
Gambar 4.6	Latar Belakang Perubahan Penggunaan Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian di Desa Bojonggede	83
Gambar 4.7	Prosentase Perubahan Pemilikan Lahan dari Penduduk Asli di Desa Bojonggede	85
Gambar 4.8	Prosentase Penggunaan Lahan Oleh Commuter di Desa Bojonggede	86
Gambar 4.9	Frekuensi Penjualan Lahan Penduduk Asli Desa Bojonggede	88
Gambar 4.10	Perubahan Mata Pencaharian Penduduk Desa Bojonggede.....	93
Gambar 4.11	Latar Belakang Perubahan Mata pencaharian Penduduk Desa Bojonggede dari Pertanian ke Non Pertanian	94
Gambar 4.12	Latar Belakang Perubahan Kondisi Sosial Penduduk Desa Bojonggede	100

Gambar 4.13 Tahap Urbanisasi	109
Gambar 4.14 Tahap Suburbanisasi	112
Gambar 4.15 Tahap Konurbasi.....	114
Gambar 4.16 Fenomena Terjadinya Proses Urbanisasi di Desa Bojonggede.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner	126
Lampiran Hasil Wawancara.....	131

ABSTRAK

Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi masalah kependudukan di Jakarta adalah melalui upaya yang dikenal dengan dekonsentrasi planologis, yaitu mendekonsentrasikan kegiatan-kegiatan baru maupun sebagian yang sudah ada di pusat-pusat perkembangan baru di daerah sekitar Jakarta (Suselo, 1977). Dampak dari kebijakan tersebut, ternyata mampu merubah arah pertumbuhan penduduk dari pusat kota ke pinggiran kota. Gerak pemekaran kota Jakarta yang menembus daerah pinggiran antara lain dapat diamati secara langsung dari perkembangan yang terjadi di daerah Bogor-Tangerang-Bekasi (pinggiran kota Jakarta). Fenomena dan pemekaran kota ini tidak hanya merubah fungsi dan tata guna lahan pertanian yang ada di daerah pinggiran kota, tetapi juga membawa perubahan yang mendasar dalam struktur masyarakat pinggiran kota yang meliputi, struktur alam fisik dan sistem sosial-budaya. Sehubungan dengan fenomena perkembangan kota di atas, dibutuhkan suatu penelitian terhadap salah satu komunitas di pinggiran kota Jakarta yang mengalami dampak akibat dari perubahan tersebut, yakni desa Bojonggede. Desa ini secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tetapi secara geografis telah menjadi sasaran (daerah alternatif) bagi pemekaran Kota Jakarta. Karena jarak antara Bojonggede-Jakarta relatif dekat dengan terbukanya jalur transportasi yang menghubungkan keduanya.

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui proses urbanisasi pinggiran Kota Jakarta, khususnya di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan analisis terhadap penelitian studi ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif dengan teknik analisa kualitatif. Metode kualitatif ini berusaha untuk menjelaskan beberapa fakta dalam hubungan sebab akibat tersebut, diperlukan keterangan tertulis atau lisan dari laporan yang merupakan terjadinya masalah dimaksud, dan bagaimana pemecahannya. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dan bentuk bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Dalam analisis, didapatkan hasil bahwa poses perkembangan kota di desa Bojonggede menyebabkan terjadi beberapa perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Perubahan tersebut diantaranya meliputi peningkatan jumlah penduduk, pola penggunaan dan kepemilikan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan pola pemilikan lahan ditandai dengan meningkatnya pemilikan tanah oleh penduduk pendatang menggeser dominasi pemilikan tanah oleh penduduk asli. Perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian, terutama untuk kepentingan perumahan penduduk yang semakin meningkat pesat. Perubahan pola mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian kepada sektor non-pertanian, yang ditandai oleh berkembangnya sektor ekonomi non-formal, terutama bidang perdagangan dan jasa, bergesernya status sebagian besar penduduk dalam mata pencaharian dari kedudukan sebagai petani pemilik kepada kedudukan mata pencaharian usaha sendiri dan adanya peningkatan pendapatan dalam sebagian besar penduduk asli. Perubahan dalam hubungan sosial, yang ditandai oleh penurunan intensitas dan frekuensi hubungan antar sesama penduduk aslidan perubahan media dan waktu yang biasa digunakan untuk berkumpul antara sesama penduduk asli. Secara umum dapat disimpulkan, bahwa di desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terjadi proses sebagai berikut (1) Urbanisasi; (2) Sub urbanisasi; dan Komurbasi

ABSTRACT

A policy that carried out to solve the Problem of civilization in Jakarta is through an effort that known as planology de-concentration, that is by deconcentrating both all new activities and part of existing activities in new development center around Jakarta (Suselo, 1977). In fact, the policy could change the direction of civilization from the town center to outer town. This city movement can be observed directly through the development in the area of Bogor - Tangerang - Bekasi (the outer areas of Jakarta). This phenomenon not only change the function and purpose lay-out of agriculture sites in outer areas, but also brings basic changes in community structure which includes physical nature structure and socio-culture system. In relation with the phenomenon of city development, it requires a research to a community in outer town, which experiences the impact of the changes, that is the village of Bojonggede. Administratively, this village is a part of Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, but geographically, it has been a target (alterniative) area of Jakarta development. It is caused by the distance between those cities that relatively near and the transportation tracks that connect them are easy.

The objective of this study is to identify the urbanization process in outer area of Jakarta, particularly in the village of Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. In the analyzing process, this study used the descriptive method of case study research with qualitative analyzing technique. This qualitative method tried to explain some facts in the relation of cause and effect, so it needs a written or oral description that reporting the problem, and the solution. Qualitative analysis were used to analyze both qualitative and quantitative data, in this case the data are information, description, and prose forms, then they will be linked to the other data to obtain a clear explanation to the truth or otherwise, sowe get a new description or it would support the existing description or otherwise.

In analyzing process, it is identified that the process of city development in Bojonggede caused some changes to the community living. Those changes include the increase of population, the pattern of land usage and ownership, and the socioeconomic condition of the community. The changing pattern of land ownership is marked by the existence of the changing pattern fion traditional ownership which based on generation (legacy) to rational ownership which based on economical Transaction (buy and sell), the changing of ownership by small groups of villagers to the ownership by large groups of community, the changing of capacious lndsite ownership to limited landsite, the increasing of ownership by new comers are sweeping away the domination of real resident ownership. The changing of landsite usage from agriculture functions to non-agriculture, especially for real-estate functions that rapidly increased. The changing of the residents' occupations from agriculture sectors to non-agriculture sectors, that marked by the development of non-formal economic sectors, especially the sector of trading and service, the status changing of the village residents from the owner to self-worker, and the existence of salary increasing of most village residents. The changing in social relationship, which marked by the declining of intensity and relation frequency among village residents and the changing of media and time that had been used to spend the time together among them. Generally, it can be concluded that in the village of Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, had happened the following process (1) Urbanization; (2) Sub-urbanization; and Con-urbanization.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kota-kota besar khususnya di Indonesia sejak beberapa dasawarsa terakhir ini telah meningkat dan berkembang sangat pesat. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh terpusatnya berbagai kegiatan masyarakat di kota-kota besar, sehingga fungsi kota berkembang di luar batas kemampuan pengelolaannya. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang semakin cepat dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, sarana prasarana serta sektor jasa, selain menimbulkan permasalahan bagi kota itu sendiri, juga menjadi daya tarik harapan dan perkembangan bagi masyarakat di luar kota. Pertumbuhan urbanisasi telah memacu perkembangan wilayah kota ke arah pinggiran, yang oleh meningkatnya wilayah-wilayah tersebut yang memiliki ciri kekotaan. (Blumenfeld dalam Angotti, 1993 : 3).

Pusat kota merupakan kawasan yang mengawali perkembangan dan pertumbuhan suatu kota sehingga menjadi orientasi pertumbuhan dan perkembangan kota. Pusat kota merupakan bagian wilayah kota yang memiliki lokasi strategis dan aksesibilitas tinggi (Hartshorn, 1980 : 314); mudah dijangkau dari seluruh bagian wilayah kota. Pusat kota akan berkembang sebagai lokasi yang memiliki potensi sebagai pendorong dan penarik aktivitas sosial ekonomi yang mampu menciptakan perubahan pesat pada suatu kota (Bourne, 1972 : 113).

Sebagai inti kota, pusat kota memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan, pusat budaya dan hiburan, serta pusat transportasi.

Perkembangan kegiatan di pusat kota karena didukung oleh lokasi yang strategis mempunyai peluang untuk lebih berkembang (Berry, 1970:3), lokasi tersebut menjadi daya tarik penduduk untuk datang ke pusat kota. Perkembangan tersebut akan memperbesar beban yang harus ditanggung oleh pusat kota. Daerah perkotaan dihuni oleh banyak penduduk pada luasan yang relatif terbatas. Kota berubah dengan cepat karena pertumbuhan ekonomi yang cepat sehingga permasalahan perkotaan bertambah (Sudewo dalam Koestoer dkk, 2001: 32).

Semakin berkembangnya pusat kota timbul berbagai masalah, sehingga perlu adanya pemikiran untuk mengembangkan pusat baru agar semua kegiatan tidak berkembang terus di pusat kota, sehingga muncul berbagai teori perkembangan kota, seperti teori konsentrik (*concentric zone theory*) dari Burgess, teori sektor (*sector theory*) dari Hoyt, dan Inti Berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman (Djaljoeni, 1997:106).

Lebih lanjut diungkapkan oleh Sobirin (dalam Koestoer dkk, 2001:46) peningkatan jumlah penduduk kota yang bertambah terus dan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai memaksa penduduk kota memilih alternatif untuk pindah ke arah pinggiran kota.

Menurut Lee (1984 :30-34) pengembangan kegiatan ke wilayah pinggiran sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap pusat kota, harus didukung oleh unsur tempat tinggal yang lengkap dengan berbagai prasarana dan sarananya. Hal senada diungkapkan pula oleh Djoko Sujarto (1995:5), bahwa agar pengembangan wilayah pinggiran tidak hanya bersifat tempat beristirahat (*dormitory town*), untuk menghindari ketergantungan terhadap pusat kota.

Demikian pula dengan pertumbuhan penduduk Jakarta, dalam kurun waktu dua dasawarsa (1971 – 1990) lebih dari separuh peningkatan penduduknya disebabkan oleh faktor migrasi. Pada tahun – tahun berikutnya pertumbuhan penduduk Jakarta diikuti oleh kota-kota disekitarnya yang telah tumbuh menjadi pusat-pusat kegiatan baru, bahkan terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan penduduk di kota-kota sekitar Jakarta relatif lebih besar. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik DKI Jakarta sampai dengan akhir Tahun 2002 jumlah penduduk DKI Jakarta adalah sebagai berikut: (a). Jakarta Selatan 1.691.320 orang; (b). Jakarta Timur 2.082.920 orang; (c). Jakarta Pusat 922.242 orang; (d). Jakarta Barat 1.567.522 orang; (e). Jakarta Utara 1.179.026 orang; dan (f). Kepulauan Seribu 18.422 orang. Jumlah keseluruhan jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 7.461.472 orang

Kecenderungan arus migrasi dan urbanisasi yang tinggi dalam pertumbuhan penduduk Jakarta, semakin mempersulit pengendalian pertumbuhan penduduk di daerah ini, karena pertumbuhan penduduk tersebut melampaui jumlah yang mungkin tidak dapat ditampung dalam batas administratif. Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya oleh para pengamat masalah perkotaan, kemungkinan kebijakan pembangunan kota yang melampaui batas administratif merupakan alternatif yang tidak bisa dihindarkan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk Jakarta yang semakin pesat, dan sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya masalah perkotaan yang lebih kompleks.

Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah melalui upaya yang dikenal dengan *dekonsentrasi planologis*, yaitu mendekonsentrasikan kegiatan-kegiatan baru maupun sebagian yang sudah ada di pusat-pusat perkembangan baru di daerah sekitar Jakarta (Suselo, 1977). Melalui upaya ini diharapkan dapat mengalihkan pertumbuhan penduduk dari pusat kota ke pusat-pusat perkembangan baru di daerah pinggiran. Upaya pengembangan daerah-daerah pinggiran

ini antara lain dilakukan dengan pengembangan lapangan pekerjaan, pembangunan jaringan lalu lintas regional, kompleks-kompleks permukiman, serta tempat-tempat rekreasi, sebagaimana dialami oleh wilayah-wilayah di sekitar kota Jakarta, khususnya di kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi (BOTABEK).

Dampak dari kebijakan tersebut, ternyata mampu merubah arah pertumbuhan penduduk dari pusat kota ke pinggiran kota. Bahkan pertumbuhan penduduk di daerah pinggiran ini, jauh lebih besar dari pertumbuhan penduduk di pusat kota itu sendiri. Selama jangka waktu 20 tahun antara tahun 1971 dan 1990 penduduk DKI Jakarta hanya bertambah sebesar 80%, sementara itu penduduk pinggiran kota Jakarta (Bogor-Tangerang-Bekasi) tumbuh sebesar 240%. Dengan demikian, kecepatan pertumbuhan penduduk daerah pinggiran kota Jakarta selama 20 tahun terakhir ini adalah tiga kali laju pertumbuhan penduduk kota Jakarta itu sendiri.

Gerak pemekaran kota yang menembus daerah pinggiran, juga telah menimbulkan terjadinya pergeseran fungsi atau tata guna lahan; dari lahan pedesaan dan pertanian menjadi bercampur antara kepentingan pertanian dan kepentingan perkotaan. Penurunan produksi pertanian tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri (Poerbo, 1993:11).

Gerak pemekaran kota Jakarta yang menembus daerah pinggiran antara lain dapat diamati secara langsung dari perkembangan yang terjadi di daerah Bogor-Tangerang-Bekasi (pinggiran kota Jakarta). Pada saat ini wilayah Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek) telah menjadi daerah pengembangan pemukiman, industri, rekreasi dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pengembangan tersebut telah mengakibatkan persediaan lahan pertanian menjadi sempit. Areal pertanian sawah dan perkebunan buah-buahan seperti di kawasan Serpong, Tanjung Barat, Depok, Cimanggis, Bekasi, Cileduk dan daerah-daerah pinggiran

kota lainnya, pada saat sekarang dapat dikatakan sudah hampir tidak ada dan berangsur-angsur menjadi daerah pemukiman. Pada dasawarsa tahun 1990-an wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, yang semula merupakan empat pusat kota yang terpisah oleh pertanian sudah penuh terisi oleh berbagai kegiatan perkotaan. Masing-masing pusat perkotaan tersebut telah berkembang, sehingga pinggirannya bertemu satu dengan lainnya menjadi “kota raksasa” megapolis Jabotabek (Mundiharto, 1994).

Fenomena dan pemekaran kota ini tidak hanya merubah fungsi dan tata guna lahan pertanian yang ada di daerah pinggiran kota, tetapi juga membawa perubahan yang mendasar dalam struktur masyarakat pinggiran kota yang meliputi, struktur alam fisik dan sistem sosial-budaya. Di sektor ekonomi misalnya, terjadi perubahan yang krusial, di mana pada mulanya basis perekonomian adalah sektor pertanian kemudian bergeser pada sektor non-pertanian, terutama perdagangan, industri, dan jasa. Demikian pula aspek sosial budaya, antara lain ditandai oleh terjadinya perubahan dalam karakteristik kependudukan yang meliputi aspek-aspek, pendidikan, pekerjaan, agama, suku bangsa, dan sebagainya, yang menunjukkan perubahan dari masyarakat homogen menjadi masyarakat heterogen.

Sehubungan dengan fenomena perkembangan kota di atas, dibutuhkan suatu penelitian terhadap salah satu komunitas di pinggiran kota Jakarta yang mengalami dampak akibat dari perubahan tersebut, yakni desa Bojonggede. Desa ini secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, tetapi secara geografis telah menjadi sasaran (daerah alternatif) bagi pemekaran Kota Jakarta. Karena jarak antara Bojonggede-Jakarta relatif dekat dengan terbukanya jalur transportasi yang menghubungkan keduanya. Namun demikian, perkembangan yang berarti baru tampak setelah tahun 1985, yakni setelah dibangunnya beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain: sarana penerangan (listrik masuk desa); sarana

angkutan umum (mobil dan kereta api) yang menghubungkan Bojonggede dengan daerah-daerah di sekitarnya terutama Bogor, Depok, Jakarta, Cibinong, dan Terminal Bis Kampung Rambutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Horton dan Hunt (1984), bahwa transportasi modern sangat berperan dalam proses terciptanya metropolitan dan daerah pinggiran kota, sehingga pola yang berkembang pada sebagian daerah metropolitan ditandai oleh adanya golongan minoritas di pusat kota yang dikelilingi oleh wilayah pinggiran kota. Terbukanya jalur transportasi antara kota dan pinggiran kota seperti, jalan raya, sungai (untuk lalu lintas air), dan jalan kereta api, merupakan salah satu faktor penting yang mendorong arah perluasan kota menuju wilayah tersebut, disamping jarak tempuh (*commuting distance*) yang memungkinkan penduduk untuk melakukan perjalanan secara ulang-alik dari desa (sebagai tempat tinggal) menuju kota (sebagai tempat bekerja).

Selain itu, pentingnya fasilitas transportasi dalam hubungannya dengan perkembangan kota, terletak dalam kemampuannya untuk membuat harga angkutan yang lebih murah dan waktu perjalanan yang lebih singkat. Pembangunan fasilitas transportasi baru yang dapat mengurangi kedua faktor tersebut dalam hubungannya dengan daerah pedesaan (pinggiran kota), akan berakibat meningkatnya permintaan untuk tinggal dalam lokasi tersebut. Pada gilirannya, akan diikuti oleh masuknya pendatang baru dan meningkatnya jumlah transaksi tanah di daerah tersebut, sehingga merubah struktur tata guna lahan yang bercirikan pertanian, serta tidak dapat dihindarkan terjadinya perubahan sosial yang lebih luas.

Pada tahun 1987, di desa Bojonggede telah berdiri kawasan pemukiman baru (perumahan KPR) yang pertama, kemudian diikuti oleh pembangunan kompleks-komplek pemukiman berikutnya, sehingga sampai saat ini di desa Bojonggede telah berdiri tiga

komplek pemukiman yang berdiri diatas tanah seluas 72 hektar. Perkembangan tersebut lebih lanjut diikuti oleh masuknya jaringan telekomunikasi dan berbagai fasilitas sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pendatang baru mulai masuk, terutama untuk tujuan mencari tempat tinggal. Mereka sebagian besar diantaranya mengisi kompleks-kompleks pemukiman, dan sebagian lainnya membangun atau membeli rumah-rumah di luar kompleks (perkampungan penduduk asli). Dengan semakin besarnya arus migrasi yang masuk ke desa Bojonggede, maka semakin memperbesar dan mempercepat pertumbuhan penduduk di wilayah ini.

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Bojonggede berdasarkan data Statistik BPS Pusat menunjukkan perubahan yang cukup besar, Pada tahun 1993 jumlah penduduk di Kecamatan Bojonggede adalah 139.443 orang, pada tahun 2000 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan yaitu 163.069 orang. Desa Bojonggede mengalami peningkatan, dimana tahun 1993 dari jumlah penduduknya sebanyak 12.259 orang meningkat menjadi 21.779 orang pada tahun 2000.

Pertumbuhan penduduk tersebut pada gilirannya, diikuti oleh tumbuhnya berbagai fasilitas fisik, ekonomi, sosial dan budaya, serta perkembangan aktivitas masyarakat sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Arus masuknya pendatang baru yang semakin besar dan adanya permintaan akan lahan untuk pemukiman dari penduduk pusat kota, tidak hanya meningkatkan harga lahan daerah ini, melainkan juga merubah konsep fungsi dan tata guna lahan.

Bagi petani yang mempunyai lahan luas cenderung untuk menjual sebagian lahannya, sementara bagi petani yang hanya sedikit lahan mereka akan kehilangan lahannya dan berarti pula kehilangan pekerjaannya. Bagi penduduk asli di daerah ini, pada

saat ini terlihat kecenderungan penduduk mengalihkan mata pencahariannya dari pertanian buah-buahan, sayuran, dan padi ke sektor non-pertanian.

Kecenderungan Pergeseran mata pencaharian di sebabkan oleh berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, permukiman, dan berbagai fasilitas sosial lainnya, yang mendesak lahan-lahan pertanian, sehingga mempengaruhi pola mata pencaharian penduduk asli. Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan kota tidak hanya merubah suatu wilayah secara fisik saja, melainkan implikasi dan mata rantai selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Daerah pinggiran kota merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga sub-sistem lingkungan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi, yakni lingkungan alam (*natural environment*), lingkungan ekonomi (*economic environment*) dan lingkungan kultural (*cultural environment*). Lingkungan alam memberikan dukungan terhadap sistem kehidupan berupa penyediaan sumber-sumber potensial baik secara ekonomi maupun kultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari berbagai aktivitas melalui mana sumber daya manusia digunakan, termasuk di dalamnya struktur ekonomi, prasarana ekonomi dan nilai ekonomi. Lingkungan kultural terdiri dari nilai sikap, kepercayaan, persepsi, yang memberikan pedoman dan motivasi terhadap interaksi sosial manusia.

Berdasarkan gambaran perkembangan kota Jakarta yang menembus Desa Bojonggede secara langsung akan berdampak terhadap struktur atau lingkungan masyarakat tersebut secara menyeluruh.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu pertanyaan penelitian (*Research Question*), sebagai berikut :

“bagaimana proses urbanisasi di desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sebagai suatu kawasan pinggiran Kota Jakarta?”

Dari *research question* tersebut diatas, yang menarik diduga adalah ada hubungannya dengan urbanisasi, dimana proses urbanisasi di desa Bojonggede menyebabkan terjadi beberapa perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Diduga Perubahan tersebut meliputi:

1. Peningkatan jumlah penduduk desa Bojonggede
2. Pola penggunaan dan kepemilikan lahan di desa Bojonggede
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
4. Terjadi pola perubahan urbanisasi di desa Bojonggede

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

Dengan latar belakang dan permasalahan seperti diuraikan diatas, maka studi ini dilakukan dengan tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mengungkapkan proses urbanisasi yang terjadi di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sebagai kawasan pinggiran Kota Jakarta.

1.3.2 Sasaran Studi

Sasaran yang hendak dicapai melalui studi ini, adalah :

1. Mendeskripsikan perubahan jumlah penduduk di desa Bojonggede
2. Mendeskripsikan pola penggunaan dan kepemilikan lahan di desa Bojonggede .

3. Mendeskripsikan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Bojonggede
4. Menganalisis fenomena perkembangan urbanisasi di desa Bojonggede.

1.4 Batasan Istilah

1.4.1 Pengertian Pinggiran Kota

Pertumbuhan penduduk telah memacu perkembangan wilayah kota ke arah pinggiran. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya wilayah yang memiliki ciri kekotaan. (Blumenfeld dalam Angotti, 1993:10). Karakteristik dasar dari kota metropolitan secara umum didefinisikan dengan populasi penduduk yang berjumlah lebih dari satu juta orang (Angotti, 1993:6). Di samping itu kota metropolitan memiliki pembagian keruangan yang jelas, keanekaragaman sosial ekonomi serta tingkat mobilitas penduduk tinggi. Bentuk mobilitas yang terjadi di kota metropolitan tidak hanya berupa mobilitas perjalanan namun juga mobilitas mata pencaharian dan mobilitas permukiman (Blumenfeld dalam Angotti, 1993:18-20). Mobilitas inilah yang kemudian memicu pemekaran wilayah kota metropolitan ke arah wilayah pinggiran sebagai lokasi baru bagi pengembangan kota (Clawson dalam Angotti, 1993:34).

Kota pinggiran metropolitan adalah kota yang wilayahnya terletak di perbatasan dengan kota lain dengan karakteristik memiliki wilayah pedesaan dan intensitas wilayah terbangun yang lebih rendah dari kota pusatnya. Intensitas ini makin turun dari kota ke desa (Rugg, 1979:57).

Menurut Mc Gee (1985) dalam Potter (1998), wilayah pinggiran (*periphery area*) mempunyai ciri khas :

1. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian padi dengan kepemilikan lahan sempit.

2. Mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non pertanian termasuk perdagangan dan industri.

1.4.2 Pinggiran Kota Jakarta

DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang mengalami proses suburbanisasi, pada tiga puluh tahun terakhir jumlah penduduk DKI Jakarta telah tumbuh dan berkembang cukup pesat. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan penduduk Jakarta telah diikuti oleh kota-kota di sekitarnya yang telah tumbuh dan menjadi pusat-pusat kegiatan baru, dan ada kecenderungan pertumbuhan penduduk di kota-kota sekitar Jakarta relatif lebih besar. Berdasarkan data statistik (BPS DKI, 1971-1990), pada awal perkembangannya tahun 1951 sampai dengan tahun 1971, jumlah penduduk DKI Jakarta berkembang dengan pesat, pertumbuhan penduduk mencapai 4,4 % setiap tahunnya, periode berikutnya tahun 1971-1980 menurun menjadi 4,0% setiap tahunnya, 1980-1990 pertumbuhan sebesar 2,4%. Keadaan tersebut berlawanan dengan Botabek (BPS Jabar, 1971-1990), pertumbuhan penduduk mempunyai kecenderungan meningkat, tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Botabek rata-rata 4,1% setiap tahunnya, dan meningkat menjadi 4,9% setiap tahunnya pada tahun 1980-1990.

Perkembangan yang pesat di Botabek disebabkan adanya kebijaksanaan Rencana Pengembangan Jabotabek (Inpres No.13/1976), yang mendasari Pemerintah Pusat untuk mengaktifkan koordinasi antara Pemda Tingkat I DKI Jakarta dengan Pemda Tingkat I Jawa Barat, antara lain meliputi langkah-langkah :

- Meringankan tekanan penduduk di Jakarta;
- Penyebaran lapangan kerja;
- Mendorong investasi ke luar Jakarta;
- Pembinaan sarana perhubungan;

- Pengadaan sarana sosial ekonomi dan sosial budaya.

Khusus bagi DKI Jakarta, Kebijakan Inpres No.13/1976 telah menjadi salah satu landasan dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta tahun 1985-2005, antara lain berisi kebijakan:

- a. Prioritas pengembangan perkotaan (*Urban Growth Areas*) diproyeksikan pada WP Barat dan WP Timur dengan lebih meningkatkan prasarana lingkungan yang ada dengan memberikan kemudahan-kemudahan baru untuk merangsang pertumbuhan di WP Barat, dan WP Timur tersebut, serta membangun Pasar Primer Baru;
- b. Pembangunan pusat-pusat kerja (industri berat, menengah, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran) di WP Utara dan WP Pusat dibatasi intensitasnya, sedangkan pusat kegiatan kerja baru pada WP Barat dan WP Timur, untuk lebih meringankan beban kepadatan lalu-lintas dan angkutan;
- c. Melihat perkembangan dewasa ini kemudahan-kemudahan yang tersedia di berbagai bagian kota dan kecenderungannya, maka strategi pembangunan yang diarahkan ke daerah Timur dan Barat, perlu dilakukan dengan dorongan penyebaran penduduk melalui penyebaran tempat kerja.
- d. Memperkecil penambahan jaringan jalan baru yang memberikan dampak pertumbuhan kota ke arah yang tidak sesuai dengan kebijakan pengembangan.
- e. Memperkecil jarak perjalanan ke tempat kerja dengan menyebarkan pembangunan industri, perdagangan dan perumahan secara seimbang.

Kebijakan pengembangan kegiatan ke Barat, Timur dan Utara telah membawa dampak berkembangnya pusat-pusat kegiatan di wilayah pinggiran Jakarta dalam hal ini mencakup kawasan pinggiran Barat, Timur, Utara dan Selatan.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Sesuai dengan judul dan tujuan penelitian, ruang lingkup substansial penelitian difokuskan untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran penduduk ke arah pinggiran kota; perkembangan gejala perluasan kota menimbulkan gejala baru di pinggiran kota yang mencakup berubahnya konsep fungsi tanah khususnya bagi penduduk asli dalam hal nilai tanah yang dilihat dari fungsi lahan dan harga tanah; fenomena batas wilayah.

Ruang lingkup materi yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah studi tentang perkembangan kota yang meliputi faktor-faktor urbanisasi; identifikasi karakteristik dan perubahan luas lahan; identifikasi karakteristik dan perubahan peranan lahan; identifikasi karakteristik dan perubahan sosial ekonomi..

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Adapun ruang lingkup spasial/wilayah dalam studi ini adalah Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 275.499 Ha yang meliputi 92 RT dan 22 RW. Adapun ruang lingkup spasial mengenai wilayah studi dapat dilihat pada gambar 1.1, gambar 1.2 dan gambar 1.3.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

FEROMONIA URBANISASI KAWASIN
PENGORBAN KOTA JAWARTA

(Studi Kasus: Desa Bojongsgede Kecamatan Bojongsgede Kabupaten Bogor)

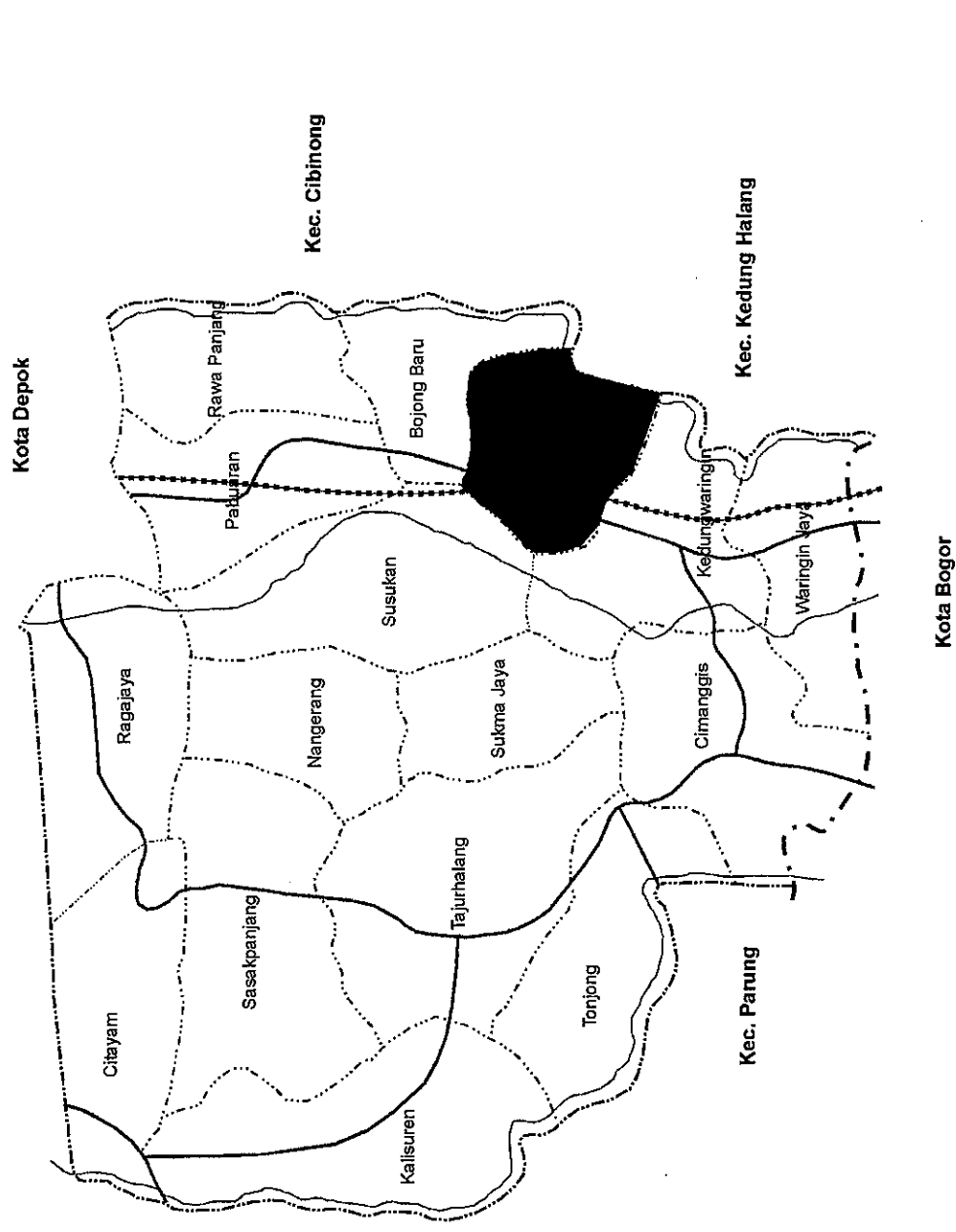
PETA

KECAMATAN BOJONGGEDE

KETERANGAN :

- Belas Kotar/kabupaten
- - - Belas Kecamatan
- Belas Kotar/kabupaten
- Jalan
- Rel KA
- ~ Sungai
- Wilayah Studi

SUMBER	Utara
Bappeda Kabupaten Bogor	4
SKALA	Nomor Gambar
1 : 62.000	1.2





MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERENCANAAN URBANSISTEMANASAH
PINGGIRAN KOTA JAKARTA
(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

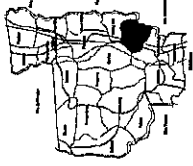
PETA

WILAYAH STUDI

KETERANGAN :

- Belas Kecamatan
- Belas Desa
- Jalan
- Rel KA
- Sungai
- Stasiun KA
- Kantor Kepala Desa
- Kantor Kecamatan
- Wilayah Studi

SUMBER	Utara
Kecamatan Bojonggede	4
SKALA	Nama Gambar
1 : 15.000	1,3



Desa Susukan

Desa Bojongbaru

Desa Sukmajaya

Desa Bojonggede

Kec. Cibinong

Desa Kedungwaringin

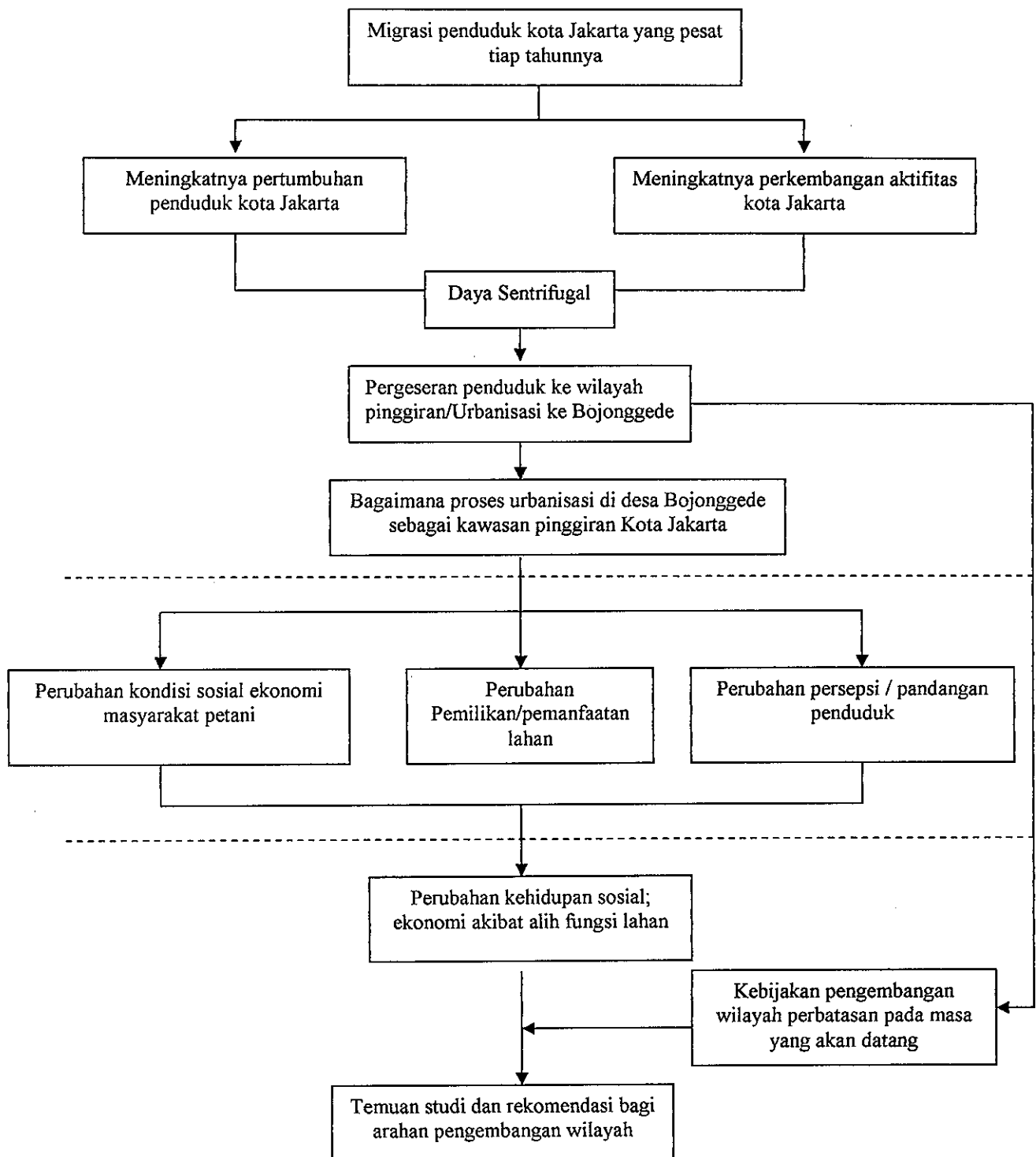
1.6 Kerangka Pemikiran

Perkembangan fisik dan pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan ciri kehidupan masyarakat kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota semakin tidak terhindarkan lagi, terutama setelah berlangsungnya proses industrialisasi yang membawa kota pada tingkat kemakmuran dan kemajuan yang terus-menerus. Kota menjadi pusat perekonomian (perdagangan dan industri) yang semakin menjadi daya tarik bagi masuknya para pendatang baru (migran). Disisi lain, pesatnya perkembangan kota juga menimbulkan berbagai dampak penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat terutama yang disebabkan oleh faktor migrasi, yang mengakibatkan kota semakin padat. Masalah lain yang timbul akibat kepadatan kota adalah semakin terbatasnya lahan untuk pemukiman dan berkembangnya berbagai masalah sosial.

Perluasan kota tidak dihindarkan lagi, manakala perkembangan kota mencapai tingkat pertumbuhan atau konsentrasi penduduk yang tinggi dengan berbagai permasalahannya yang semakin kompleks, seperti kemacetan lalu lintas, kejahatan, masalah pemukiman, dan sebagainya. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah pinggiran kota seperti, sarana transportasi dan komunikasi, listrik, pemukiman, industri, tempat-tempat rekreasi, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat merupakan salah satu bentuk alternatif untuk mengatasi dampak perkembangan kota. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi konsentrasi penduduk di pusat kota, sehingga kemungkinan berkembangnya permasalahan kota yang lebih rumit akan bisa diantisipasi.

Dalam kaitannya dengan studi ini, dapat diamati bahwa perluasan kota Jakarta yang melewati batas administratif atau menembus daerah pinggiran kota, telah merubah struktur masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai aspek yang luas, meliputi lingkungan fisik, tata guna lahan dan kehidupan sosial budaya. Dengan alasan tersebut

diatas dapat disusun kerangka pemikiran studi yang secara skematis dapat dilihat pada diagram Gambar 1.4.



GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7 Metodologi Studi

1.7.1 Pendekatan Studi

Pendekatan studi dilakukan dengan pendekatan survai yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan variabel, sosiologis maupun psikologis. Pendekatan survai pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survai ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dihasilkan bisa akurat bila digunakan sampel yang representatif.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini terbagi 2, yaitu pendekatan *spasial* dan *aspasial*. Pendekatan spasial merupakan pendekatan keruangan (fisik) dimana studi ini dilakukan yaitu proses urbanisasi kawasan pinggiran kota Jakarta dengan studi di desa Bojonggede yang meliputi perubahan guna lahan. Sedangkan pendekatan *aspasial* merupakan pendekatan non keruangan yang menjadi acuan studi, dalam hal ini adalah perubahan aspek sosial dan ekonomi masyarakat akibat proses urbanisasi di desa Bojonggede. Dengan adanya kedua pendekatan tersebut nantinya studi ini tidak hanya bersifat keruangan namun juga non keruangan, begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan kombinasi keduanya akan memperkuat kombinasi hasil penelitian tersebut. Adapun penelitian yang bersifat kuantitatif menampilkan data dalam bentuk angka-angka, sedangkan penelitian yang bersifat kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, dimana dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jika ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalahnya, penelitian proses urbanisasi kawasan di desa Bojonggede merupakan penelitian diskriptif yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian diskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*), yang hasilnya ditekankan pada memberi gambaran obyektif dan diperkuat dengan interpretasi-interpretasi yang tajam.

Penelitian mengenai proses urbanisasi di desa Bojonggede secara garis besar mencakup beberapa lingkup kajian :

1. Melakukan pengkajian teori mengenai fenomena perkembangan wilayah pinggiran kota, dimana diakhir pembahasannya diperoleh hipotesis yang berbasis teoritis
2. Mengidentifikasi kondisi wilayah studi, dalam hal ini desa Bojonggede, dilihat dari kedudukan desa Bojonggede terhadap DKI Jakarta serta terhadap faktor-faktor urbanisasinya, yang meliputi perkembangan penduduk, perkembangan penggunaan lahan serta perkembangan mata pencaharian di desa Bojonggede. Di akhir pembahasannya akan dihasilkan hipotesis yang berbasis empiris.
3. Menganalisis fenomena perkembangan urbanisasi di desa Bojonggede dilihat dari kedudukan desa Bojonggede terhadap pusat kota, perkembangan jumlah penduduk desa Bojonggede, perubahan pola penggunaan dan kepemilikan lahan serta perubahan sosial ekonomi masyarakatnya. Hasil analisis ini akan diverifikasi dengan hipotesis yang telah dihasilkan berupa hipotesis berbasis teori dan berbasis empiris. Hasil akhir dari tahapan analisis ini berupa proses atau tahapan perkembangan perkotaan yang terjadi di desa Bojonggede.
4. Menyimpulkan hasil analisis serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil studi yang telah dihasilkan

Selanjutnya untuk ringkasan pendekatan studi akan disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL I.1
RINGKASAN PENDEKATAN STUDI

Bahasan	Metode Pendekatan	Kegunaan	Hasil
Mengkaji teori mengenai fenomena perkembangan wilayah pinggiran kota	Kualitatif (Diskriptif)	Untuk mengetahui kajian fenomena perkembangan wilayah pinggiran kota	Hipotesis berbasis teoritis
Identifikasi kondisi wilayah studi, dalam hal ini desa Bojonggede	Kualitatif (Diskriptif)	Untuk mengetahui kedudukan serta faktor-faktor urbanisasi di Bojonggede	Hipotesis berbasis empiris
Menganalisis fenomena perkembangan urbanisasi di desa Bojonggede	Kualitatif (Diskriptif)	Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk desa Bojonggede, perubahan pola penggunaan dan kepemilikan lahan serta perubahan sosial ekonomi masyarakatnya.	Proses atau tahapan perkembangan perkotaan yang terjadi di desa Bojonggede.

Sumber: Hasil Analisis, 2004

1.7.2 Metode Pelaksanaan Studi

1.7.2.1 Teknik Pengumpulan, Penyajian dan Pengolahan Data

a. Tahap Pengumpulan Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. masalah, tujuan dan hipotesa penelitian, untuk sampai pada suatu kesimpulan yang harus didukung oleh data yang relevan. Sumber-sumber yang diperlukan guna menyusun studi ini, yaitu :

1. Studi Literatur

Studi literatur yang mendukung sangat dibutuhkan dalam penyusunan studi ini, seperti landasan peraturan yang tertuang dalam rencana tata ruang kota, kajian faktor-faktor

urbanisasi, serta sumber-sumber yang bersifat ilmiah lainnya (majalah, buletin, makalah seminar, jurnal, dan lain-lain). Data tersebut diperlukan dalam proses analisis untuk mengetahui proses urbanisasi di desa Bojonggede.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi yang terkait dan disebut sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui survai ke beberapa instansi yang terkait dengan permasalahan studi. Adapun instansi-instansi pemerintah yang diharapkan menjadi sumber data adalah :

- Pemda Kabupaten Bogor
- Bappeda Kabupaten Bogor
- Kantor Statistik Kabupaten Bogor
- Kantor Kecamatan Bojonggede
- Kantor Kepala desa Bojonggede

3. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan yang dilakukan dengan dua teknik, yakni melalui wawancara berstruktur terhadap responden yang telah ditentukan sebelumnya; dan melalui wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dengan pertanyaan yang tidak terstruktur terhadap informan yang ditentukan secara purposive. Informan yang ditentukan antara lain, pamong desa, tokoh masyarakat (*informan leader*), orang yang dianggap mengetahui tentang proses perkembangan desa Bojonggede dan memahami aspirasi masyarakat setempat.

b. Penyajian Data

Data yang ada disajikan dalam beberapa bentuk seperti :

1. Tabulasi Data, terutama untuk data yang berbentuk angka dan penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, serta gambar. Bagi data sekunder tidak dilakukan lagi pengolahan lebih lanjut karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.
2. *Editing* merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah ada kekeliruan dalam pengisian atau data yang ada masih kurang lengkap, palsu tidak sesuai dan sebagainya. Dengan *editing* diharapkan akan diperoleh data yang benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. *Coding* merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda dimaksud dapat berupa angka ataupun huruf.
4. Data narasi sebagai data kualitatif yang bersumber dari data yang berbentuk jawaban berupa cerita atau argumentasi dari para narasumber yang telah ditunjuk.

c. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai karakteristiknya. Data deskriptif dipisahkan dari data yang berbentuk angka kemudian diedit agar menjadi data yang siap disajikan serta siap untuk dilakukan analisa.

d. Kebutuhan Data

Kebutuhan data dan informasi dapat diperoleh melalui pengumpulan data, sedangkan data yang dikumpulkan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok data sekunder dan data primer.

Adapun identifikasi kebutuhan data dan informasinya dirinci sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa instansi yang terkait dan validitas datanya bisa dipertanggungjawabkan, sebagai berikut (lihat tabel I.2)

TABEL I.2
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA SEKUNDER

Kebutuhan data	Instansi yang dikunjungi
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk desa Bojonggede • Jumlah penduduk menurut mata pencaharian • Jumlah penduduk asli dan jumlah penduduk pendatang 	Kantor Kabupaten Bogor, Kantor Statistik Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, Kecamatan Bogor dan Kantor desa Bojonggede
<ul style="list-style-type: none"> • Luas Penggunaan Lahan • Harga lahan 	Kantor Kecamatan Bojonggede, dan Kantor Desa Bojonggede

Sumber : Hasil analisis, 2004

2. Data Primer

Data primer diperoleh melalui metode survai dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara berstruktur kepada penduduk setempat. Adapun jenis data primer yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: (lihat tabel I.3)

TABEL I.3
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA PRIMER

Indikator	Kebutuhan Informasi
Perubahan Penggunaan lahan dan struktur kepemilikan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi mengenai latar belakang perubahan penggunaan lahan • Persepsi tentang perubahan struktur kepemilikan lahan • Persepsi tentang penggunaan lahan oleh penduduk pendatang • Persepsi tentang penjualan lahan oleh penduduk asli
Perubahan kondisi sosial dan ekonomi penduduk desa Bojonggede	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi tentang latar belakang perubahan mata pencaharian • Persepsi latar belakang perubahan kondisi sosial penduduk desa Bojonggede

Sumber : Hasil analisis, 2004

1.7.2.2 Teknik Analisis

Dalam bagian bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip metode analisis yang akan digunakan serta langkah-langkah penerapan metode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses urbanisasi di desa Bojonggede. Dalam pelaksanaan analisis terhadap penelitian studi ini digunakan metode penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif dengan teknik analisa kualitatif. Adapun definisi “Metodologi Kualitatif” menurut (Moleong, 1994 : 3) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif ini berusaha untuk menjelaskan beberapa fakta dalam hubungan sebab akibat tersebut, diperlukan keterangan tertulis atau lisan dari laporan yang merupakan terjadinya masalah dimaksud, dan bagaimana pemecahannya Subagio (1991) menyatakan sebagai berikut: “Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dan bentuk bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya”.

Mengacu pada pendapat di atas, dengan demikian teknis analisis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data, baik yang diperoleh dari dokumen maupun analisis wawancara dalam setiap variabel penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penjelasan atau keterangan, yang di dukung oleh data lapangan dan informasi yang memperkuat penjelasan dimaksud. Dengan demikian akan diperoleh suatu kebenaran dalam hasil penelitian yang dilakukan.

1.7.2.3 Teknik Sampling

Dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, ada tiga hal yang harus selalu diperhatikan yaitu biaya, tenaga dan waktu. Dalam suatu penelitian biasanya populasi yang diteliti banyak jumlahnya, sehingga kita tidak mungkin mampu meneliti semuanya. Untuk itu diperlukan penarikan beberapa contoh/sampel dari populasi tadi. Pengambilan contoh tersebut dinamakan *sampling*.

Sampling merupakan contoh, representan/wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu suatu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya dari keseluruhan.

Teknik *sampling* dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang nonkualitatif. Pada penelitian non kualitatif sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (Moleong;1994:165), peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud *sampling* dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam macam sumber dan bangunannya. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari *sampling* ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Sampel bertujuan dapat ditandai dari ciri-cirinya sebagai berikut (Moleong; 1994:165):

1. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu
2. Pemilihan sampel secara berurutan, tujuannya memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.
3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel
4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan

Pada penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Disebutkan menurut Kartono (1992) jumlah sampel penelitian minimal 30 responden dalam suatu penelitian. Untuk pengambilan jumlah sampel menurutnya, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari suatu populasi. Berdasarkan Ida Bagus Mantra dan Kasto (Dalam Singarimbun, 1989), untuk menentukan jumlah sampel yang cukup representative dalam penelitian, maka jumlah sampel yang digunakan sekurang-kurangnya sebanyak 30 sampel. Berdasarkan pernyataan diatas, dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah penduduk desa Bojonggede, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang dengan jumlah masing-masing 30 orang. Hal ini untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai proses urbanisasi di desa Bojonggede.

1.8 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penulisan studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang studi, tujuan dan sasaran studi, perumusan masalah, ruang lingkup baik wilayah maupun materi, kerangka pemikiran, metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II FENOMENA PERKEMBANGAN WILAYAH PINGGIRAN KOTA

Setelah menjelaskan latar belakang dan perumusan masalah, pada bab ke dua ini diuraikan kajian-kajian literatur dan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam ruang lingkup substansi penelitian yang meliputi teori tentang pengertian kota, urbanisasi dan perkembangan kota, dari pusat ke pinggiran kota, permasalahan pusat kota, pengertian pinggiran kota, pergeseran ke wilayah pinggiran kota dan perubahan sosial ekonomi masyarakat pinggiran kota.

BAB III DESKRIPSI UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini pada dasarnya berisi tentang gambaran umum wilayah studi, hal ini sangat berguna untuk pengenalan awal, yang meliputi faktor-faktor urbanisasi di desa Bojonggede.

BAB IV FENOMENA PERKEMBANGAN URBANISASI DI DESA BOJONGGEDE

Bab ini menyajikan mengenai bagaimana fenomena perkembangan urbanisasi di Desa Bojonggede

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian

BAB II

FENOMENA PERKEMBANGAN WILAYAH PINGGIRAN KOTA

2.1 Pengertian Kota

Pengertian kota dapat dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang keilmuan, antara lain, menurut Jayadinata (1999:124) yang mendefinisikan kota berdasarkan tiga aspek sebagai berikut :

1. Dalam pengertian geografis, yakni suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kompak, dan mata pencaharian penduduknya bukan dari pertanian;
2. Dalam pengertian hukum, di Indonesia terdapat empat macam kota : (a) kota sebagai ibukota nasional: Jakarta (b) Ibukota Propinsi (c) Ibukota Kabupaten dan Kotamadya (d) Kota Administratif;
3. Dalam pengertian layanan, kota itu mempunyai jumlah penduduk tertentu, misalnya di Indonesia (untuk keperluan statistik) yang disebut kota adalah tempat dengan 20.000 penduduk atau lebih; di Jepang dengan 30.000 penduduk; di Malaysia dengan 5.000 penduduk dan di Amerika Serikat dengan 2.500 penduduk.

Marbun (1994:10) juga merumuskan pengertian kota berdasarkan tiga pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan geografis-demografis, melihat kota sebagai tempat pemusatan penduduk.
2. Pendekatan dari segi ekonomi, melihat kota sebagai tempat pertemuan lalu lintas ekonomi, perdagangan dan industri serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang banyak.

3. Pendekatan dari sosio-antropologis, melihat hubungan antara manusia yang tinggal di kota sudah renggang dan heterogen, tidak lagi seperti keadaan masyarakat yang terdapat di desa yang biasanya masih sangat akrab dan homogen. Pola hubungan masyarakat di kota telah mengarah rasional, egois, impersonal dan kurang intim.

Sujarto (1989) memberikan batasan kota ke dalam enam kelompok yaitu :

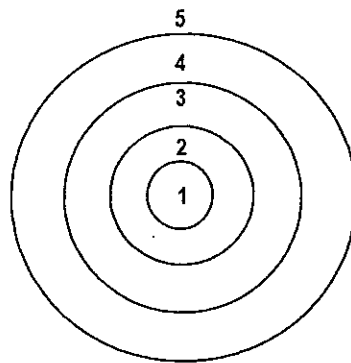
1. Secara demografis merupakan pemusatan penduduk yang tinggi dengan tingkat kepadatan yang tinggi pula jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dari segi statistik ketentuan kota ini beragam dari berbagai negara. Demikian pula di Indonesia selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada sensus dilakukan.
2. Secara sosiologis selalu dikaitkan dengan batasan adanya sifat heterogen dari penduduknya serta budaya urban yang telah mengurangi budaya desa.
3. Secara ekonomis suatu kota dicirikan dengan proporsi lapangan kerja yang dominan di sekitar sektor non-pertanian seperti: industri, pelayanan dan jasa, transportasi dan perdagangan.
4. Secara fisik suatu kota dicirikan dengan adanya dominasi wilayah terbangun dan struktur fisik binaan.
5. Secara geografis kota diartikan dengan suatu pusat kegiatan yang dikaitkan dengan lokasi strategis.
6. Secara administratif pemerintahan suatu kota dapat diartikan dengan suatu wilayah wewenang yang dibatasi oleh suatu yuridiksi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan baru.

Suatu hal yang khas bagi suatu kota adalah bahwa kota itu umumnya mandiri atau serba lengkap (*self contained*) yang berarti penduduk kota bukan saja hanya bertempat

tinggal di dalam kota, tetapi bekerja mencari nafkah di dalam kota itu dan berekreasi pun dilakukan di dalam kota itu. Keadaan ini berlainan dengan keadaan di wilayah pedesaan di mana penduduk umumnya harus pergi keluar desa untuk mencari nafkah. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi sehingga baik tempat tinggal maupun tempat bekerja dan rekreasi dapat dilakukan penduduk di dalam kota.

2.2 Perkembangan Kota

Pola perkembangan kota dapat ditelaah dari tiga teori, yakni teori konsentrik (*concentric zone theory*) dari Burgess, teori sektor (*sector theory*) dari Hoyt, dan inti berganda (*multiple nuclei theory*) yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman (dalam Jayadinata, 1999).



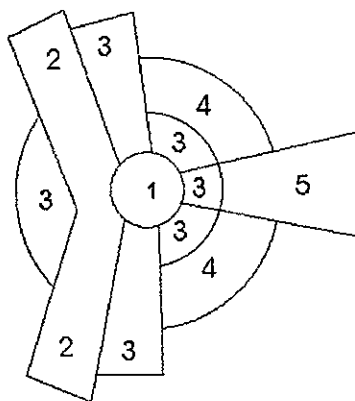
1. Pusat Kota atau CBD
2. Jalur Transisi
3. Jalur Wisma Buruh
4. Jalur Madyawisma
5. Jalur Penglaju (commuters)

GAMBAR 2.1
TEORI KONSENTRIS

Sumber : Chapin, dalam Jayadinata, JT, 1999:131

Teori yang dikembangkan oleh Burgess, menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkup konsentrik. Wilayah-wilayah dengan ciri-ciri sosial

ekonomi kota tersusun menyerupai bentuk bentuk lingkaran bertingkat yang mengelilingi pusat. Variabel yang digunakan untuk mengukur masing-masing zona lingkaran konsentrik ini adalah struktur harga tanah, semakin dekat dengan pusat kota semakin mahal harganya dan semakin jauh dari dari pusat akan semakin murah. Daerah terluar dari zona konsentrik ini disebut *the commuter's zone*, yaitu daerah tempat tinggal para penglaju. Daerah ini pada siang hari kosong karena ditinggalkan oleh para penghuninya yang sebagian besar bekerja di pusat kota (Rahardjo, 1983:37-38).



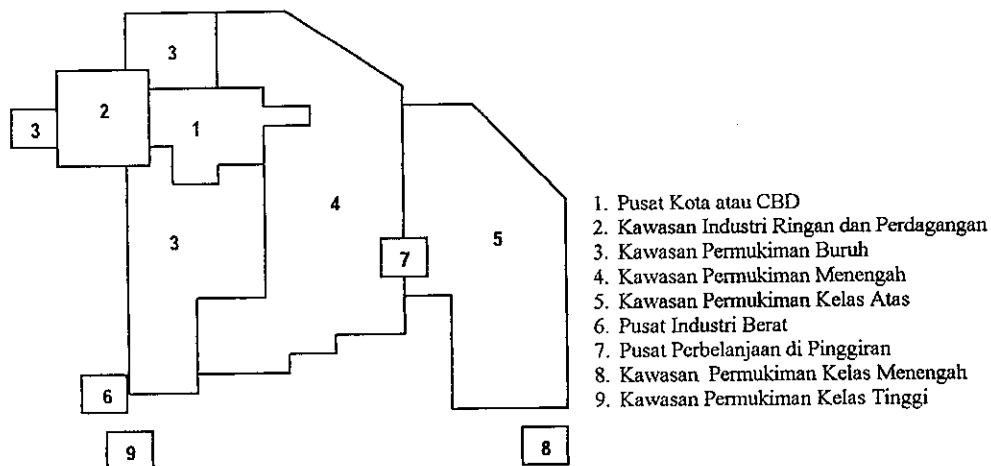
1. Pusat Kota atau CBD
2. Kawasan Industri Ringan dan Perdagangan
3. Kawasan Permukiman Buruh
4. Kawasan permukiman menengah
5. Kawasan pemukiman kelas atas

GAMBAR 2.2 **TEORI SEKTOR**

Sumber : Chapin, dalam Jayadinata, JT, 1999:131

Teori lingkaran konsentris ini oleh Hoyt diganti oleh model sektor. Secara singkat teori ini menyatakan bahwa daerah-daerah kelas satu cenderung berada di tepian terluar dari satu atau lebih sektor. Sedangkan daerah-daerah murah cenderung berada di pusat suatu sektor. Pada saat-saat terjadi perkembangan kota, daerah-daerah kelas satu tersebut semakin menggeser keluar, tetapi tetap berada di sepanjang sektor, dan tidak

membentuk lingkaran sebagaimana halnya menurut teori konsentrik. Daerah industri berkembang disepanjang lembah sungai, jalan raya atau jalan kereta api, dan tidak dalam bentuk lingkaran disekitar daerah pusat bisnis (Horton & Hunt, 1989:140-141).



GAMBAR 2.3
TEORI INTI BERGANDA

Sumber : Chapin, dalam Jayadinata, JT, 1999:131

Sementara itu, *multiple-nuclei theory* yang dilontarkan oleh Harris dan Ulman's menyatakan bahwa, suatu kota terdiri dari beberapa inti atau pusat perkembangan. Setiap pusat cenderung diwarnai oleh jenis kegiatan seperti, pemerintahan, rekreasi, pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Pada perkembangan kota lebih lanjut, selalu terjadi pusat-pusat kegiatan baru yang memisahkan diri dari pusat kegiatan lama atau pusat kota (Rahardjo, 1983:41)

Berdasarkan ketiga teori diatas, secara umum arah perkembangan kota mengikuti pola-pola tertentu (Soedjito, 1986:103):

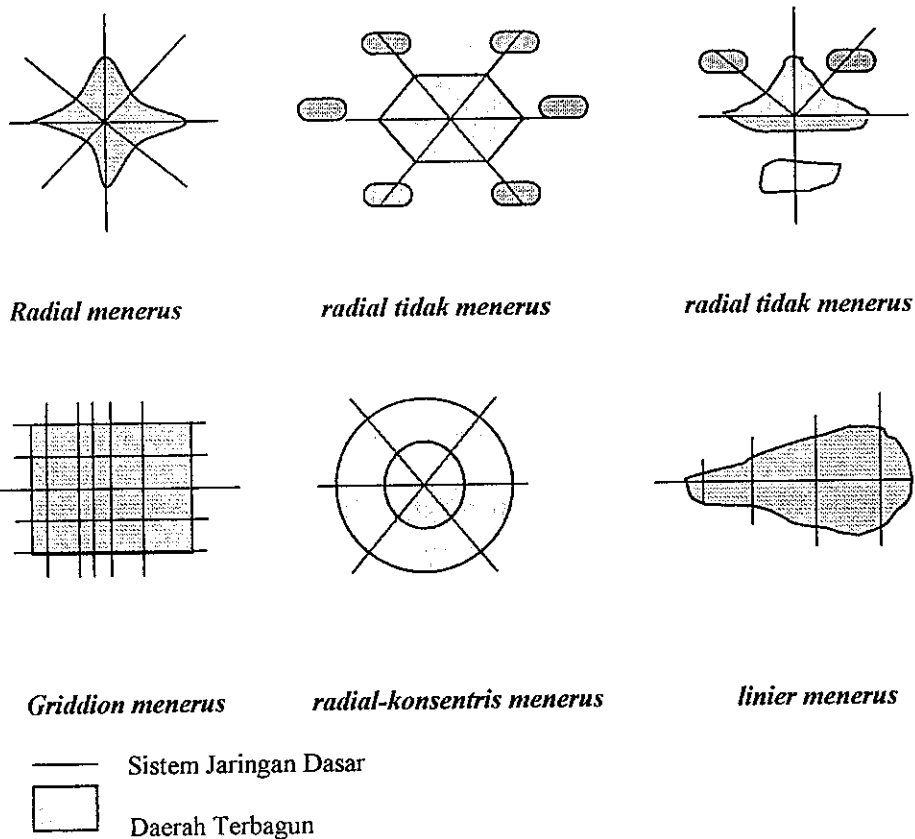
1. Mengikuti pola perkembangan sepanjang jalur-jalur komunikasi seperti jalan, sungai, pantai dan sebagainya. Perkembangan semacam ini adalah perkembangan alamiah dan dapat dijumpai di kota-kota seluruh Indonesia. Misalnya perkembangan kota di

wilayah Jabotabek, sepanjang Semarang-Yogyakarta, seperti Muntilan, Magelang, Ambarawa, Ungaran, semuanya berkembang di sepanjang jalur jalan. Demikian pula kota Solo dan Surabaya berkembang sekitar jalan besar, sedangkan Pontianak berkembang sekitar sungai Barito dan jalan-jalan utama.

Menurut Bergel (1955), perkembangan kota yang mengikuti jalur transportasi ini selanjutnya akan membentuk suatu proses *conurbation* dan *agglomeration*. Yaitu berdirinya bangunan-bangunan baru yang menunjang mengikuti jalur transportasi sehingga memungkinkan terjadi pertemuan *conurbation* antar kota yang berdekatan. Pertemuan antar dua *conurbation* ini disebut *agglomeration*, yakni menyatunya dua atau lebih kota yang berdekatan karena adanya perkembangan kota.

2. Menurut pola perkembangan pusat-pusat aktivitas tertentu, misalnya sekitar Taman Hiburan Rakyat (THR), sekitar Universitas yang besar, sekitar terminal, dan sebagainya. Maka ada kota-kota yang berkembangnya secara histories mengikuti perkembangan ini.
3. Mengikuti pola perkembangan dari pusat, seperti halnya kota-kota yang sudah lama perkembangannya antara lain Jakarta. Mulai dari Jakarta Kota dan Pasar Ikan, kemudian karena udara dan suasanya kurang enak, penduduknya pindah ke pinggiran kota, dengan meninggalkan penduduk yang miskin di tengah kota. Dengan demikian terjadilah Kebayoran Baru dan sebagainya, yang dipergunakan sebagai tempat tinggal golongan orang kaya, sedangkan pusat kota seperti Glodok dan Senen merupakan tempat-tempat gelandangan dan sarang-sarang penjahat. Di dalam kenyataannya, perkembangan suatu daerah mungkin merupakan kombinasi dari dua atau tiga pola sekaligus.

Menurut (Alexander, J.W. dalam Jayadinata, T. Johara 1999:179), bahwa karena keadaan topografi tertentu atau karena perkembangan sosial ekonomi tertentu, akan berkembang beberapa pola perkembangan kota, yaitu pola menyebar, pola sejajar dan pola merumpun. Pola menyebar (*dispersed pattern*) dari perkotaan terjadi pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen. Pola sejajar (*linier pattern*) dari perkotaan terjadi sebagai akibat adanya perkembangan sepanjang jalan, lembah, sungai atau pantai. Pola merumpun (*clustered pattern*) dari perkotaan terjadi pada topografi agak datar tetapi terdapat beberapa *relief* lokal yang nyata dan sering kali berkembang berhubungan dengan pertambangan. Pola perkembangan kota di atas tanah datar terlihat pada gambar 2.4.



Sumber : Branch, 1996 : 52

GAMBAR 2.4
POLA PERKEMBANGAN KOTA

Menurut (Yunus, 2000:41), perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Sorotan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda dan untuk menganalisis ruang yang sama. Perkembangan kota menurut J.H.Goode (dalam Daldjoeni, 1997:21) dipandang sebagai fungsi dari pada faktor-faktor jumlah penduduk, penguasaan alat atau lingkungan, kemajuan teknologi dan kemajuan dalam organisasi sosial.

Menurut (Bintarto, 1989:66-67), perkembangan kota dapat dilihat dari aspek *zone-zone* yang berada di dalam wilayah perkotaan. Dalam konsep ini Bintarto menjelaskan perkembangan kota tersebut terlihat dari penggunaan lahan yang membentuk *zone-zone* tertentu di dalam ruang perkotaan sedangkan menurut (Branch,1995:52), bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya.

Catanese (1989) mengungkapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik dan non fisik. Faktor-faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan suatu kota diantaranya:

1. Faktor Lokasi

Faktor lokasi dimana kota itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktifitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya. Kota yang berlokasi di jalur utama atau persimpangan jalan utama akan mampu menyebarkan pergerakan dari dan semua penjuru dan menjadi titik pertemuan antara pergerakan dari semua penjuru dan menjadi titik pertemuan antara pergerakan dari berbagai arah.

2. Faktor Geografis

Kondisi geografis suatu kota akan mempengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang dibandingkan dengan kota di daerah yang bergunung-gunung yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik itu orang maupun barang. Selain itu kota di daerah yang bergunung-gunung akan sulit untuk merencana dan mendesainnya dibandingkan dengan daerah datar. Sebagai gambaran kota yang berada di daerah dataran rendah (rata) lebih cepat berkembang dibandingkan dengan kota yang berada di daerah yang bergunung-gunung.

Sedang faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa :

1. Faktor Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal), perkembangan secara alami adalah yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang terjadi di kota tersebut. Sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke dalam kota.

2. Faktor Aktivitas Kota

Kegiatan yang ada di dalam kota tersebut, terutama kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah (faktor eksternal) yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut pada gilirannya akan membentuk

suatu aglomerasi kegiatan perekonomian yang makin lama akan semakin besar dan menyebabkan kota tersebut berkembang.

Proses perkembangan kota juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang konsep *urbanisasi*, karena terjadinya perkembangan kota terkait dengan fenomena urbanisasi. Selain proses urbanisasi, proses perkembangan kota juga akan diikuti dengan proses suburbanisasi serta konurbasi.

2.2.1 Urbanisasi

Menurut kamus *Webster New Collogiate Dictionary* (Sinulingga, 1999:70), kata urbanisasi atau *urbanization* berarti “*the quality or state being or becoming urbanized*” yang dapat diartikan tingkat kekotaan atau persentase jumlah penduduk yang tinggal dikota, dibanding dengan jumlah penduduk seluruhnya dan juga berarti suatu proses menuju bentuk perkotaan. Urbanisasi ini terjadi melalui dua cara yaitu perpindahan dari desa ke kota (*rural urban migration*) dan juga karena daerah pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor lambat laun berubah menjadi daerah perkotaan.

Pada umumnya urbanisasi diartikan sebagai suatu proses, yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk suatu negara untuk berdiam di pusat-pusat perkotaan (Schoorl, 1982:263). Proses tersebut juga mengandung dua pengertian: (i) urbanisasi sebagai suatu proses pengkotaan, yakni proses pengembangan atau mengkotanya suatu daerah (desa), dan (ii) urbanisasi berarti perpindahan atau pergeseran penduduk dari desa ke kota (*urbanward migration*). Kedua pengertian tersebut tidak bisa dipisahkan dan ada lingkup proses perkembangan kota. Urbanisasi sebagai proses pengkotaan lebih menekankan perhatiannya pada proses perkembangan masyarakatnya. Sementara, konsep urbanisasi dalam arti perpindahan penduduk lebih memperhatikan proses pergeseran penduduknya yang disebabkan oleh perkembangan tersebut (Rahardjo, 1983:55).

Menurut Daldjoeni (1998:105) urbanisasi sebenarnya secara harfiah berarti *pengkotaan* yaitu proses menjadi kota; jadi logisnya yang mengalami proses pengkotaan itu justru daerah pemukiman yang bukan kota. Pengkotaan berarti meningkatnya bagian penduduknya yang bertempat di kota, kemudian kota-kota itu sendiri yang tumbuh dan meluas atau mekar istilahnya. Pinggiran-pinggiran yang semula pedesaan berubah menjadi kota.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Soetomo (2002:73) bahwa dalam membicarakan urbanisasi sebagai suatu proses perkembangan masyarakat menuju ke kehidupan perkotaan. Kehidupan perkotaan yang ditandai oleh kegiatan bukan pertanian, kegiatan yang heterogen dan dinamis melakukan perubahan-perubahan.

Geograf De Bruijne (Budianto dalam Koestoer dkk, 2001:116) mengemukakan 7 (tujuh) definisi urbanisasi yaitu :

- a. Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara modal, nasional maupun regional;
- b. Berpindahnya penduduk dari desa-desa ke perkotaan;
- c. Bertambahnya penduduk bermatapencarian nonagraris di pedesaan;
- d. Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota;
- e. Mekarnya atau meluasnya struktur artifaksial-morfologis suatu kota ke pedesaan;
- f. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan;
- g. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis dan kultural kota ke pedesaan.

Dalam masa pembangunan di negara berkembang ada kesan bahwa bertambahnya penduduk kota dengan pesat itu dikarenakan migrasi masuknya orang-orang dari desa. Hal ini memang sebagian besar benar, apalagi jika diingat bahwa urbanisasi yang tidak terkendali disebabkan oleh tidak amannya kawasan pedesaan, datangnya

bencana alam, dan gagalnya pembangunan di pedesaan. Tidak lepas dari itu, penduduk kota sendiri juga mengalami pertambahan yang alami (Budianto dalam Koestoer dkk, 2001:115).

Proses urbanisasi di Indonesia disebabkan oleh tiga *push factors* yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas tanah di pedesaan yang pincang, kurangnya lapangan kerja di luar bidang pertanian dan rendahnya pendapatan. *Pull factors* mencakup antara lain aspek: tarikan kota berupa lapangan kerja, upah yang lebih tinggi, dan adanya selingan serta hiburan dalam kehidupan. (Daldjoeni, 1998:114).

Sejalan dengan pemikiran diatas, Burgess mengemukakan bahwa urbanisasi bukan hanya sekedar pemusatan dan pertumbuhan penduduk, melainkan juga melibatkan berbagai faktor seperti kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berkaitan dengan rekreasi, spesialisasi pekerjaan dan minat atau kepentingan, perkembangan alat-alat komunikasi baru – telepon, telegram, bioskop, radio, surat kabar, dan majalah-majalah sirkulasi massa (Etzioni dan Etzioni, 1973:193). Burgess memandang proses perkembangan sebuah kota bukan semata-mata masalah pertambahan penduduk, tetapi lebih jauh berkaitan dengan proses pengkotaan yang terjadi pada suatu wilayah dan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersangkutan.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Sinulingga (1999:78) bahwa mengapa penduduk berpindah dari desa ke kota, memerlukan suatu jawaban yang berbau filosofis, ialah bahwa penduduk yang berpindah itu ingin mencapai suatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Lebih lanjut dapat dijelaskan, bahwa migrasi pada hakikatnya merupakan implikasi dari perbedaan fasilitas antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Penduduk dari daerah yang berfasilitas kurang, pada umumnya daerah pedesaan, akan memiliki potensi untuk pindah

ke daerah yang berfasilitas lengkap, yaitu daerah perkotaan. Migran yang seperti ini dinamakan migran desa-kota (*rural-urban migration*).

Lebih khusus Todaro (dalam Sinulingga, 1999:78) menyatakan bahwa, keputusan bermigrasi merupakan suatu respon terhadap harapan tentang penghasilan yang lebih baik, yang akan diperoleh di kota dibandingkan dengan yang diterima di pedesaan, termasuk kemungkinan memperoleh pekerjaan di perkotaan.

2.2.2 Suburbanisasi

Di daerah perkotaan, karena lahan merupakan sumber daya yang sangat langka dan mahal, maka penggunaan lahan yang tidak produktif akan digantikan oleh lahan yang lebih produktif dan menguntungkan. Terutama di pusat kota, yang merupakan lokasi di tempat tersebut harus produktif dan menguntungkan pula, namun karena keterbatasan dan mahalnya harga lahan, kecenderungan ke pusat kota mulai bergeser ke pinggiran, untuk mencari lahan yang luas dan murah. Pergeseran ini tak jarang juga menggantikan penggunaan lahan pertanian yang banyak terdapat di wilayah pinggiran. Gejala diatas dalam hal ini disebut sebagai gejala suburbanisasi.

Gejala suburbanisasi (pengkotaan di wilayah pinggiran) akan terjadi dengan berlangsungnya proses pertumbuhan dan pemekaran pengkotaan wilayah pinggiran yang ditandai dengan berubahnya lahan-lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di pinggiran, maupun dalam artian sosiologis, yaitu jenis pengkotaan di wilayah pinggiran dalam jenis lain yakni perubahan mental dan moral berciri urban. Bintarto (1983:85) menyebut proses pengkotaan tersebut sebagai perubahan kehidupan desa atau suasana desa menjadi suasana kehidupan kota.

2.2.3 Konurbasi

Ekspansi kota secara fisik yang diperlihatkan oleh penjalaran area terbangun yang akhirnya memunculkan apa yang disebut konurbasi, menurut Kamus Tata Ruang Konurbasi adalah konsentrasi perkotaan dalam jumlah besar, akibat penggabungan beberapa kota atau perkotaan menjadi satu kota yang besar, pada beberapa kasus wilayah seperti ini dapat dibentuk suatu wilayah administrasi baru atau tetap mempertahankan batas administrasi yang lama. Konurbasi sinonim dengan istilah “Aglomerasi Perkotaan” atau “Metropolis” (Budihardjo, 1993:23).

Dalam proses konurbasi, daerah-daerah yang disebut selaput inti kota yaitu daerah diluar *Central Business Districts* (CBD) meluas kearah luar. Bersamaan dengan selaput inti, kota lain yang mengalami ekspansi penggunaan lahan melewati batas wilayah, sehingga terjadi semacam peleburan antara dua perkotaan dengan dua inti kota. Konurbasi juga dapat terbentuk lebih dari dua nukleus, yang disebut dengan “struktur polinukleus” atau ‘struktur uninukleus” (Bintarto, 1997).

Daldjoeni (1987) membagi menjadi 2 tipe konurbasi, yaitu :

1. Polisentris adalah konurbasi yang terjadi karena tergabungnya beberapa kota menjadi satu akibat ekspansi fisik masing-masing.
2. Monosentris adalah konurbasi yang terjadi karena ekspansi fisik kota besar tunggal

Sedangkan menurut Bergel (1955), perkembangan kota yang mengikuti jalur transportasi selanjutnya akan membentuk suatu proses *conurbation* dan *agglomeration*. Yaitu ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan baru yang memanjang (linier) mengikuti jalur transportasi sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan *conurbation* antar kota yang berdekatan. Pertemuan antara dua *conurbation* ini disebut *agglomeration*, yaitu menyatunya dua atau lebih kota yang berdekatan karena adanya perkembangan kota.

Menurut Soegijoko (1993) *conurbation* merupakan proses menyatunya serangkaian kota-kota (*urban areas*) sehingga fenomena penataan kota meluas hingga memiliki dimensi regional, dimana pada saat ini *conurbation* terjadi apabila dua kota metropolitan dalam perkembangannya “menyatu”.

2.3 Dari Pusat ke Pinggiran Kota

2.3.1 Fungsi Pusat Kota

Pusat kota merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan yang paling produktif dan menempati kawasan paling strategis dan aksesibel dibandingkan kawasan lainnya. Kawasan pusat kota adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan pusat pelayanan yang paling tinggi (dominan) untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai konsekuensinya penggunaan lahan di kawasan pusat kota terdiri dari elemen-elemen kegiatan fungsional yang mempunyai skala jangkauan, dan hirarki pelayanan tingkat kota (Hartson, 1980).

Terdapat dua hal yang menyebabkan penurunan keefektifan pelayanan suatu pusat kota, yang menyebabkan :

- Akibat jarak pencapaian ke pusat kota yang semakin jauh.
- Akibat adanya kemacetan lalu lintas, waktu perjalanan dan biaya-biaya lainnya ke pusat kota meningkat sebagai akibat kepadatan lalulintasnya yang sangat tinggi.

Pusat kota merupakan bagian dari wilayah kota yang mempunyai karakteristik intensitas penggunaan lahan non pertanian sangat tinggi yang didukung oleh sistem aksesibilitas tinggi sehingga memudahkan pencapaiannya. Awal perkembangannya pusat kota dimulai dari tempat yang strategis yang memberikan kemudahan pencapaian dari segala tempat lainnya. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya spesialisasi kegiatan

dengan adanya pengelompokan kegiatan komersial, perdagangan, jasa, administrasi, budaya dan lain sebagainya.

Pusat kota merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta sosial budaya (Chappin, 1982). Kegiatan pemerintah ditandai dengan berdirinya bangunan/perkantoran pemerintah (balai kota, kantor instansi terkait, kantor polisi), kegiatan perdagangan dan jasa ditandai dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan, (*departemen store* hingga pertokoan), perhotelan, perbankan, dan pergudangan. Sedangkan sebagai pusat sosial budaya ditandai dengan berdirinya gedung museum, galeri, gedung serba guna/pertemuan, perpustakaan, gedung kesenian, dan bioskop.

Nilai lahan yang relatif tinggi maka dalam perkembangan pusat kota dibedakan menjadi kawasan inti (*core*) dan kawasan rangka atau *frame*, (Yates dan Garner, 1980:335-336). Kawasan inti mempunyai skala pelayanan antar kota maupun pelayanan dalam kota (*intra* dan *intra city*) didominasi oleh gedung-gedung pencakar langit (gedung bertingkat) yang merefleksikan perkembangan vertikal, dengan kegiatan utama yang dibedakan menjadi 3 kegiatan. Pertama kegiatan keuangan (*financial activities*) yang terdiri dari kegiatan perbankan, kegiatan asuransi, broker/pialang, kedua spesialisasi kegiatan eceran (*specialized retailing function*) dan yang ketiga sebagai tempat kegiatan pelayanan sosial dan profesional (*social and professional services*).

Sedangkan kegiatan di kawasan rangka (*frame*) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang kalah bersaing dengan kegiatan di kawasan pusat, dan mempunyai fungsi pendukung kegiatan di kawasan pusat, kawasan *frame* lainnya dan antar kota (*intra city*). Kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan *frame* terdiri dari pemukiman, pusat-pusat pelayanan (pemerintah, kesehatan, pendidikan), perhotelan, industri manufaktur, terminal, pemasaran dan bengkel mobil, Pergudangan.

Dari pandangan Yeates and Gardner dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitas bank berada di kawasan inti, sedangkan pendidikan (pendidikan tinggi), perbelanjaan dan pelayanan kesehatan (rumah sakit) berada di kawasan *frame*.

2.3.2 Permasalahan Pusat Kota

Terkonsentrasinya kegiatan di pusat kota membawa dampak yang kurang menguntungkan, salah satu permasalahan yang muncul timbulnya kemacetan. Semakin berkembangnya kegiatan pembangunan di kawasan pusat yang ditandai dengan gedung-gedung pencakar langit maka semakin besar timbulnya kemacetan (Eko, 1995:36) semakin luas lantai gedung semakin besar bangkitannya. Penambahan gedung/jumlah lantai gedung semakin banyak menarik orang berakibat semakin besar pergerakan di sekitar gedung tersebut keadaan semakin tidak terkendali bila gedung-gedung tersebut tidak dilengkapi dengan kawasan parkir yang memadai sehingga kemacetan terjadi di sekitar gedung tersebut. Permasalahan lain yang muncul berkembangnya kegiatan informal yang tidak terkendali, tumbuhnya permukiman kumuh, turunnya kualitas lingkungan.

Lebih lanjut (Sujarto, 1985:3) mengungkapkan bahwa disamping berkembangnya masalah-masalah lingkungan di kawasan pusat kota seperti kepadatan lalu lintas, meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan, kepadatan penduduk dan bangunan yang semakin tinggi, telah menyebabkan tidak layakannya kawasan pusat kota sebagai suatu kawasan tempat tinggal.

Karakteristik wilayah pusat kota yang ditandai dengan kepadatan bangunan yang relatif tinggi merupakan konsekuensi dari lokasinya yang mudah dijangkau dari semua bagian kota, adanya tuntutan kegiatan bisnis dan pemerintahan untuk saling berdekatan satu sama lain, dan sering pula karena regulasi pemerintah kota yang menentukan kebijakan tentang konsentrasi kepadatan di pusat kota untuk menjaga investasi yang sudah

ditanamkan. Kepadatan perkotaan menunjukkan sebaran konsentrasi bangunan dan kegiatan yang produktif dan seringkali melampaui kemampuan jaringan transportasi yang ada dan menimbulkan kemacetan lalu lintas (Koestoer, 2001:127).

2.4 Pengertian Pinggiran Kota

Pinggiran kota adalah kota yang wilayahnya terletak di perbatasan dengan kota lain yang hirarkinya lebih tinggi dan memiliki karakteristik adanya wilayah pedesaan serta intensitas wilayah terbangun lebih rendah dari kota pusatnya. Intensitas ini makin turun dari kota ke desa (Rugg, 1979).

Secara teoritis pengertian daerah pinggiran menurut Freidman, antara lain :

1. *Upward-transition regions*, adalah daerah tepi dari pusat. Wilayah ini mengandung sumber-sumber atau resources yang dapat dikembangkan.
2. *Downward-transition regions*, adalah daerah-daerah yang mengalami proses stagnasi dan kemunduran.

Sedang menurut Mc Gee (1985) dalam Potter (1998), wilayah pinggiran (*periphery area*) mempunyai ciri khas :

1. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian padi dengan kepemilikan lahan sempit.
2. Mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non pertanian termasuk perdagangan dan industri.

Menurut Burgess (1921) perkembangan pinggiran kota pada dasarnya berawal dari migrasi penduduk ke pusat kota hingga kemudian mencapai titik jenuh tertentu. Proses alamiah selanjutnya adalah penyebaran ke kota-kota pinggiran. Salah satu faktor yang mendorong pergerakan ke pinggiran kota adalah kemungkinan mendapatkan kehidupan jauh lebih alami, jauh dari polusi, nyaman dengan fasilitas dan utilitas terjamin.

Hal lain yang mendorong perkembangan kota pinggiran adalah ketersediaan sarana prasarana transportasi yang akan meningkatkan aksesibilitas sehingga memungkinkan terjadinya interaksi ke pusat kota.

2.5 Pergeseran ke Wilayah Pinggiran Kota

Yunus (2000:125) mengatakan bahwa oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya ruang untuk kebutuhan tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota. Gejala pengambil alihan lahan non urban oleh penggunaan lahan urban di daerah pinggiran kota disebut sebagai "invasion". Proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar disebut "urban sprawl".

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan perkotaan yang pesat juga telah meningkatkan permintaan akan lahan. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, terjadi peningkatan harga tanah yang hampir tak terjangkau oleh masyarakat umum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya gejala pergeseran penduduk ke arah pinggiran kota. Sebagaimana yang diidentifikasi oleh Spencer (1979:112), ada beberapa alasan yang mendorong perpindahan penduduk ke daerah pinggiran kota :

1. Penggunaan tanah untuk permukiman di kota harus bersaing dengan tanah lain yang lebih komersial, sehingga tanah yang tersedia untuk permukiman semakin berkurang.
2. Penduduk kota semakin meningkat jumlahnya.
3. Sarana transportasi menuju pinggiran kota menjadi lebih baik dan fleksibel, sehingga memungkinkan penduduk dan perusahaan-perusahaan pindah lebih jauh dari pusat-pusat bisnis (kota), menyebar ke pinggiran kota mengikuti jalur transportasi.

4. Orang-orang kota menginginkan tempat tinggal yang lebih luas dan tenang, karena mereka merasa bahwa tempat tinggal di kota sangat padat dan sesak.
5. Pemerintah telah membantu penduduk untuk mengusahakan pemilikan rumah yang menarik dengan syarat-syarat pembayaran yang ringan di daerah pinggiran kota.

Intensitas penggunaan tanah di daerah pusat kota yang tinggi dan mengakibatkan naiknya nilai harga tanah, sementara jumlah penduduk kota bertambah terus dan memerlukan tempat hunian yang pada gilirannya memaksa penduduk kota memilih alternatif mendirikan perumahannya ke arah pinggiran kota. Kecenderungan alami perkembangan pemukiman berlangsung secara bertahap ke arah luar (mengalami pemekaran) dan polanya mengikuti prasarana transportasi (jaringan jalan) yang ada (Sobirin dalam Koestoer dkk, 2001:46).

Proses pertumbuhan kota yang melibatkan perpindahan penduduk dari pusat kota ke daerah pinggiran sebagaimana digambarkan diatas, lebih menunjukkan proses alamiah (natural) daripada terencana, kondisi perkembangan ini merupakan suatu gejala *sub-urbanisasi prematur* dan tidak terencana, sehingga menciptakan perluasan kota yang liar dan tidak terkendali.

Evers (1986:29-31) mengemukakan, bahwa berkembangnya gejala perluasan kota baik secara terencana maupun natural, menimbulkan gejala baru di pinggiran kota yaitu berubahnya konsep fungsi tanah khususnya bagi penduduk asli. Sebelum terjadinya arus perluasan kota, nilai tanah terutama dilihat dari segi fungsinya sebagai lahan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Setelah berkembangnya arus perluasan kota yang bergeser ke pinggiran kota, maka konsep tanah berubah mempunyai nilai komersial sebagai "barang" yang dapat diperjualbelikan seperti layaknya barang komoditas.

Perubahan ini juga berkaitan dengan meningkatnya harga tanah di lokasi yang bersangkutan, terutama untuk tanah yang terletak di sekitar jalur transportasi.

Ada empat alasan, tumbuhnya wilayah pinggiran kota menurut Whyne-Hammond (dalam Daldjoeni, 1998:207) yaitu:

1. Meningkatnya peningkatan pelayanan transportasi kota berupa trem, bus kota, memudahkan orang untuk bertempat tinggal jauh dari tempat bekerjanya.
2. Bertambahnya penduduk wilayah pinggiran sehingga meramaikan wilayah pinggiran. Migrasi dua arus penduduk baru dari kota dan desa-desa yang lebih ada di pedalaman.
3. Meningkatnya taraf kehidupan penduduk di wilayah pinggiran kota.
4. Gerakan pendirian bangunan pada masyarakat dibantu pemerintah lewat kredit bank yang ditunjuk untuk melancarkan pemilikan rumah di luar kota.

2.6 Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pinggiran Kota

Dalam literatur geografi, istilah pinggiran kota menunjuk pada suatu kawasan dimana terjadi pertumbuhan suburban dan tata guna lahan bercampur antara keperluan *rural* dan keperluan *urban*, sehingga terbentuklah suatu daerah peralihan antara perkotaan dan pedesaan (Johnson, 1974:4). Kurtz dan Eicher mendefinisikan daerah pinggiran kota sebagai (Pahls, 1965:74) :

1. Daerah interpretasi desa-kota yang ditandai oleh perubahan penggunaan lahan periferan kepada penggunaan lahan kota.
2. Daerah yang meliputi suburban, kota-kota satelit, dan berbagai territorial lainnya yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota, dimana tenaga kerjanya terlibat dalam aktifitas kerja non-pertanian.
3. Suatu daerah diluar batas kota yang resmi, tetapi berada dalam jarak ulang alik (*communiting distance*).

4. Suatu daerah pedesaan yang terbuka dalam mana individu yang bekerja di kota bertempat tinggal.
5. Suatu daerah dimana bidang pekerjaan dan orientasi kota dan desa terjadi kontak.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pinggiran kota sebagai dampak perkembangan kota, secara analitis dapat dilihat dalam kerangka perubahan sosial, yakni perubahan yang mengacu pada struktur sosial meliputi: sikap-sikap dan pola perilaku atau kebiasaan bertindak antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, serta interaksi sosial atau tata hubungan antar masyarakat (Soemardjan, 1981:303).

Menurut definisi Soemardjan (1981), perubahan sosial adalah “Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”.

Perubahan sosial merupakan gejala evolusi sosial dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bentuk-bentuk masyarakat moderen dan kompleks merupakan kulminasi dari suatu proses evolusi yang lama, yang dimulai dengan masyarakat sederhana dan primitif (Johnson, 1994:21).

Sejalan dengan hal tersebut Harpel (1989 : 5) memberikan definisi perubahan sosial sebagai berikut : “*Social change is the significant of social structure trhough time*” (perubahan sosial adalah pergeseran penting struktur sosial melalui perjalanan waktu). Definisi ini mengandung dua hal penting, yakni *significant* dan *social structure*. *Significant* artinya sesuatu telah berubah secara nyata, sedang *social structure* berarti sesuatu jaringan tetap/kokoh dari hubungan-hubungan sosial di mana interaksi telah menjadi rutin dan merupakan pengulangan. Pada tingkat yang abstrak, struktur social

dapat dipahami sebagai peran-peran tetap kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dan perkumpulan-perkumpulan.

Perubahan perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat pinggiran kota, tidak terlepas dari kerangka perubahan struktur masyarakat yang luas. Dimana perkembangan kota, baik secara ekologis maupun kultural (urbanisme), tidak hanya merubah struktur fisik (tata guna lahan) melainkan juga melibatkan perubahan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, telaah terhadap perubahan perilaku dan interaksi sosial tidak dapat dielakkan.

2.7 Hipotesis Teoritis

Berdasarkan kajian mengenai fenomena perkembangan wilayah pinggiran kota, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai hipotesis awal. Berikut ini hipotesis yang berbasis teoritis yang dapat ditarik dari kajian terhadap beberapa literatur.

1. Proses urbanisasi di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor
 - a. Harga lahan yang murah yang tidak didapatkan di daerah perkotaan
 - b. Sarana transportasi menuju pinggiran kota yang lebih baik
 - c. Menginginkan tempat tinggal yang lebih luas dan tenang
2. Proses urbanisasi di suatu daerah disertai dengan perubahan terhadap sistem pemilikan dan pola penggunaan lahan
3. Perubahan dalam sistem kepemilikan dan pola penggunaan lahan akan diikuti oleh perubahan struktur mata pencaharian dan nilai sosial budaya penduduk asli

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH STUDI

3.1 Kedudukan Daerah Penelitian dalam Sistem Kota Metropolitan DKI Jakarta

Bogor, Tangerang dan Bekasi (BOTABEK) adalah wilayah penyangga metropolitan DKI Jakarta, yang secara kesatuan membentuk kota raksasa dengan nama Metropolitan Jabotabek..

Adapun kebijaksanaan pengembangan Metropolitan Jabotabek adalah sebagai berikut:

- Wilayah Jabotabek mempunyai kedudukan sangat penting sebagai pusat kegiatan nasional dalam pelayanan jasa, industri, pariwisata dan pintu gerbang nasional
- Dalam rangka mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman/perkotaan di Botabek, perlu mengintegrasikan lokasi pembangunan kota dengan pusat-pusat kegiatan jasa dan industri.
- Pengembangan sistem kota-kota di kawasan tertentu Jabotabek diarahkan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, pemerintahan dan pariwisata baik dalam skala pelayanan internasional, nasional, wilayah dan lokal

Kabupaten Bogor terbagi dalam 6 sistem perwilayahan Pembangunan (WP). Kecamatan Bojonggede bersama-sama dengan Kecamatan Cibinong, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, Sawangan, Cimanggis dan Kalapanunggal serta Kota Depok dalam WP IV. Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perumahan dalam skala besar, industri, penambahan bahan galian C dan holtikultura antara lain buah-buahan. WP IV diharapkan dapat menyangga urbanisasi ke Jakarta sekaligus menampung arus migrasi dari Jakarta.

Penyebaran dari sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

3.2 Kedudukan Daerah Penelitian sebagai Bagian Dari Sistem Kota Cibinong

Desa-desanya Pabuaran, Rawapanjang, Bojongbaru, Bojonggede, Kedungwaringin dan Waringinjaya merupakan Bagian Wilayah Kota Barat (BWK A) dari sistem Kota Cibinong. Fungsi dan Peranan kota Cibinong adalah:

- Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor
- Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dari wilayah Pembangunan IV
- Merupakan lokasi kegiatan industri 'non-polluted'
- Sebagai 'dormitory/commuter town' dari sistem kota metropolitan DKI Jakarta
- Menyediakan pusat perkantoran dan kegiatan lain yang bersifat khusus.

Di BWK A akan terdapat 1 sub Pusat Utama di desa Bojonggede dan 2 pusat lingkungan, yaitu di desa Bojonggede dan rawapanjang .

3.3 Perkembangan Kecamatan Bojonggede

Desa Bojonggede secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Kecamatan Bojonggede terdiri dari 16 desa yaitu Tonjong, Cimanggis, Waringin Jaya, Kedung Waringin, Bojonggede, Sukmajaya, Tajur Halang, Kalisuren, Sasak Panjang, Nanggerang, Susukan, Bojong Baru, Rawa Panjang, Pabuaran, Ragajaya, dan Citayam. Data Statistik tahun 2000 menunjukkan Luas Wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor adalah 55,70 Km². Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bojonggede sebagai berikut :



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERENCANAAN URBANISASI KAWASAN
PENGGERAKAN KOTA JAKARTA
(Studi Kasus: Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Bogor)

PETA
PETA WILAYAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BOGOR

KETERANGAN :

- Batas Kotakabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Wilayah Pembangunan
- Wilayah Studi
- Pusat I
- Pusat II
- Pusat III

SUMBER

Bappeda Kabupaten Bogor

Utara

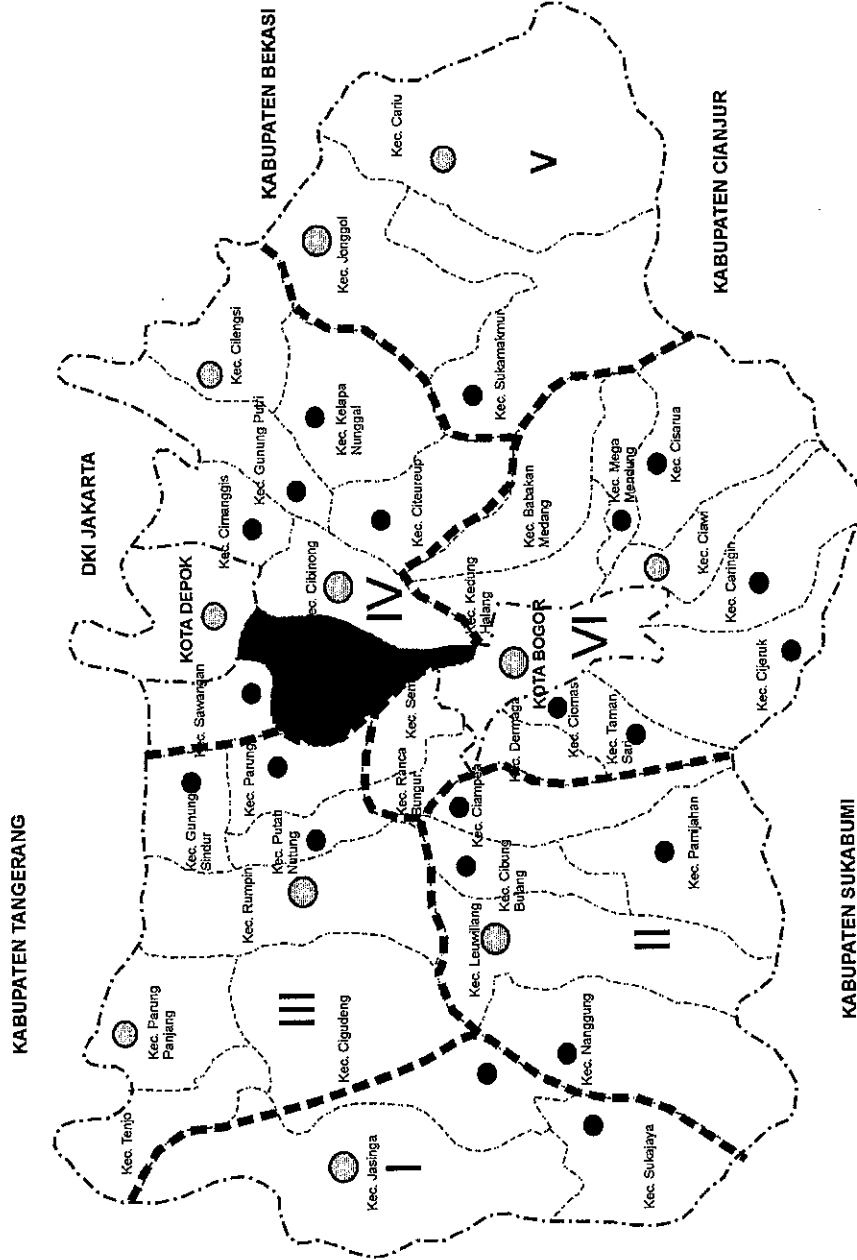
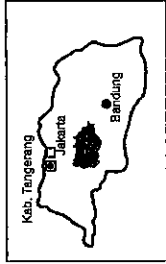
4

SKALA

Nomor Gambar

0 50 100 150 KM

3.1



KABUPATEN TANGERANG

DKI JAKARTA

KOTA DEPOK

KABUPATEN BEKASI

KABUPATEN CIANJUR

KOTA BOGOR

KABUPATEN SUKABUMI

- Sebelah Selatan : Kecamatan Semplak
- Sebelah Barat : Kecamatan Parung
- Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Pancoran mas
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cibinong

Untuk Jelasnya mengenai gambaran spasial Kecamatan Bojonggede dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

Wilayah Kecamatan Bojonggede dilalui oleh dua lintasan jalan, yaitu jalan raya dan jalan kereta api yang sekaligus membagi wilayah ini menjadi dua bagian. Dibagian sebelah timur terdapat 6 desa yang dibelah oleh kedua jalan tersebut, dan disebelah barat terdapat 10 desa yang merupakan wilayah terbesar dari Kecamatan Bojonggede. Kedua lintasan tersebut menghubungkan daerah Bojonggede dengan Kota Bogor di sebelah selatan dan Kota Depok dan Jakarta di sebelah utara. Selain itu, adanya jalur transportasi tersebut juga menjadi faktor yang penting dalam laju perkembangan pembangunan fisik di Kecamatan Bojonggede.

Namun demikian, sampai saat ini dibandingkan dengan empat wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Bojonggede, laju pembangunan fisik di daerah ini relatif lebih lambat. Hal ini terutama berkaitan dengan perkembangan sarana dan transportasi sebagai kunci pembuka isolasi daerah, perkembangan baru dimulai tahun 1985, yakni masuknya trayek angkutan umum (mobil) yang menghubungkan Bojonggede dengan Bogor, Depok dan Jakarta. Meskipun sebenarnya, angkutan kereta api sudah ada sejak lama tetapi belum dapat diandalkan, karena volume perjalanannya yang masih sangat terbatas.

Pada tahun 1981 hubungan transportasi terutama antara Bojonggede dengan Depok dan Jakarta mulai ditingkatkan dengan dibangunnya jalan aspal. Kemudian pada



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

FENOMENA URBANISASI KAWASAN
PROGRAM KOTA JAMKARTTA

(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

PETA

KECAMATAN BOJONGGEDE

KETERANGAN :

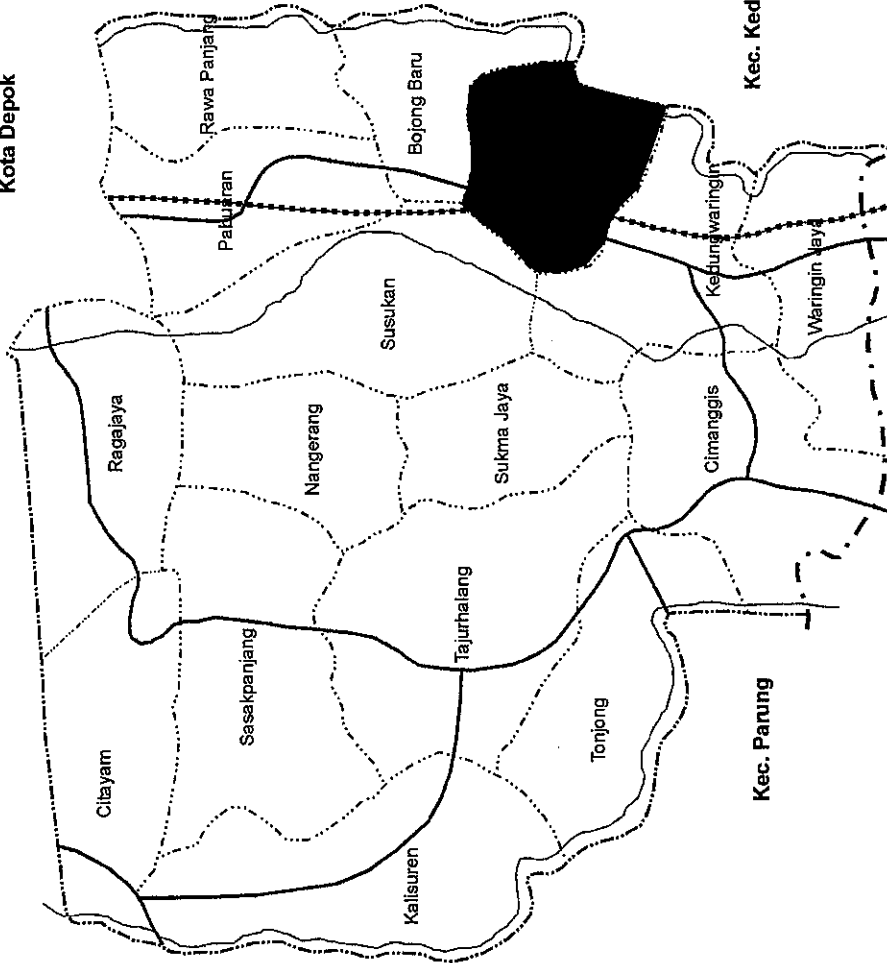
- Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jalan
- Rel KA
- ~ Sungai
- Wilayah Studi

SUMBER	Utara
Bappeida Kabupaten Bogor	4
SKALA	Nomor Gambar
1 : 62.000	3.2



Kec. Sawangan

Kota Depok



Kota Bogor

tahun 1985, dibuka jalur angkutan umum antara Bojonggede dan Depok sehingga semakin menambah alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum selain kereta api. Sampai saat ini, angkutan yang masuk ke Bojonggede semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan Bojonggede dengan kota-kota utama tetapi juga dengan daerah-daerah sekitarnya yang muali sulit dijangkau, seperti Cibinong, Parung, dan Terminal Bis Kampung Rambutan. Pembangunan sarana transportasi tersebut kemudian diikuti oleh pembangunan sarana penerangan (listrik masuk desa) yang berlangsung pada tahun 1986.

Proses percepatan pembangunan di Bojonggede semakin terasa dengan dibangunnya kompleks pemukiman (perumahan KPR) pada tahun 1987 yang diikuti oleh masuknya pendatang baru dari luar Bojonggede terutama dari Jakarta baik yang mengisi lokasi pemukiman tersebut maupun yang berada di luar kompleks pemukiman serta yang berusaha mengembangkan aktivitas ekonominya di daerah pinggiran. Proses berikutnya, perkembangan Bojonggede semakin mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya arus pendatang baru ke daerah ini terutama untuk mencari tempat tinggal.

Pada umumnya para pendatang tersebut adalah kaum migran yang tidak “tertampung” lagi untuk memperoleh tempat tinggal di Jakarta, maka mereka menuju daerah pinggiran yang memungkinkan dapat dijangkau secara ulang alik (*commuting distance*). Sehingga dalam waktu yang relatif singkat wilayah kecamatan Bojonggede mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dapat diamati antara lain dari pembangunan fisik yang telah dan sedang berlangsung sampai saat ini. Di wilayah Bojonggede sampai saat ini telah berdiri 10 kompleks perumahan dengan berbagai tipe dan ukuran, jenis rumah sederhana dan rumah mewah (*real estate*). Perkembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial juga ditandai oleh masuknya jaringan telekomunikasi (telepon) dan semakin meluasnya jenis dan jangkauan pelayanan transportasi.

Selanjutnya proses pembangunan fisik tersebut diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, sebagaimana data yang dihasilkan berdasarkan sensus penduduk tahun 1988-1990 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Bojonggede sebesar 4,91 pertahun.

Sejalan dengan perkembangan sarana transportasi dan pembangunan fasilitas fisik dan sosial di Kecamatan Bojonggede, periode perkembangan penduduk yang penting untuk dilihat berdasarkan data sekunder yang ada (data perkembangan penduduk periode tahun 1988-1994) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun pertumbuhan penduduk Kecamatan Bojonggede mengalami peningkatan yang cukup pesat disebabkan oleh faktor migrasi, melebihi daripada angka pertumbuhan alamiah (lihat Tabel III.1)

TABEL III. 1
PERTUMBUHAN PENDUDUK KECAMATAN BOJONGGEDE TAHUN 1988-1994

Tahun	Jumlah	Faktor Pertumbuhan		Total
		Alami	Migrasi	
1988	106.952	1.103	3.045	4.148
1989	111.150	3.157	3.157	15.748
1990	126.898	3.679	7.590	11.219
1991	137.167	2.465	6.585	9.050
1992	146.217	2.411	2.815	5.226
1993	151.443	2.831	6.483	9.314
1994	160.657	-	-	-
Jumlah	-	15.646	39.109	55.255

Sumber: Kecamatan Bojonggede Dalam Angka, Kantor Statistik Bogor

Tabel III.1 diatas menunjukkan, bahwa dalam kurun waktu sekitar 7 tahun penduduk Kecamatan Bojonggede telah bertambah sekitar 51,6% (55.255 jiwa) dari jumlah penduduk 106.952 jiwa pada tahun 1988 menjadi 160.657 jiwa pada tahun 1994. Angka pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor migrasi sebesar 39.109 jiwa atau 36,6%, sedangkan angka pertumbuhan alami hanya bertambah sebesar 15.646 jiwa atau sekitar 15%.

Meskipun tidak ada data yang pasti mengenai asal para pendatang, tetapi secara umum mereka adalah kaum migran yang berasal dari berbagai daerah dengan tujuan utamanya bekerja di Jakarta. Hal ini dapat diamati dari aktivitas kerja dan mobilitas mereka sehari-hari, yakni sebagai penduduk *komuter* yang bertempat tinggal di Bojonggede dan bekerja di Jakarta.

Masuknya arus migrasi ke daerah Bojonggede sangat dimungkinkan karena adanya beberapa faktor antara lain : (1) Letak wilayah Kecamatan Bojonggede relatif dekat dengan Jakarta, dapat ditempuh dalam jarak penglaju (*commuting distance*), (2) Adanya perkembangan sarana transportasi baik melalui angkutan kendaraan bermotor maupun melalui angkutan kereta api yang volume perjalanannya semakin padat. Semuanya mendukung bagi penduduk yang bekerja di Jakarta untuk melakukan perjalanan (pergi dan pulang kerja) secara ulang-alik setiap hari.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang spesifik mengenai lokasi penelitian, akan lebih difokuskan pada Desa Bojonggede yang secara khusus dijadikan lokasi penelitian. Pemilihan sampel lokasi ini di dasarkan pada data perkembangan Wilayah Kecamatan Bojonggede, dimana secara umum Desa Bojonggede menunjukkan perkembangan yang paling pesat khususnya selama periode perkembangan yang telah digambarkan diatas dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Wilayah Kecamatan Bojonggede.

Perkembangan yang dicapai oleh Desa Bojonggede ini sangat di dukung oleh beberapa faktor tertentu antara lain; pusat pemerintahan dan ibu kota kecamatan berada di Desa Bojonggede, dimana aktivitas pembangunan fisik banyak terpusat disini seperti terminal angkutan, stasiun kereta api, pasar, perkantoran, komplek-komplek perumahan, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya berlangsung di Desa Bojonggede. Kondisi

tersebut sangat mendukung perkembangan Desa Bojonggede relatif lebih cepat dibandingkan dengan desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Bojonggede. Selain itu letak Desa Bojonggede sangat strategis untuk dijangkau oleh perkembangan kota, karena berada pada lintasan jalan raya dan jalan kereta api yang menghubungkan Bojonggede dengan daerah-daerah perkotaan terutama Bogor di sebelah selatan berjarak 12 kilometer dan Jakarta di sebelah utara berjarak sekitar 25 kilometer.

3.4 Gambaran Desa Bojonggede

Desa Bojonggede mempunyai luas wilayah 275 hektar yang terbagi dalam 4 dusun, 19 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun Tetangga RT). Secara geografis, daerah ini terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh ruas jalan, yakni jalan mobil dan jalan kereta api. Untuk jelasnya mengenai gambaran spasial dan kondisi desa Bojonggede dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4 berikut ini.

3.4.1 Perkembangan Penduduk Desa Bojonggede

Perkembangan penduduk di Desa Bojonggede dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (1998-2002), menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, terutama disebabkan oleh masuknya pendatang baru (faktor migrasi). Selama kurun waktu tersebut, Bojonggede rata-rata pertumbuhan penduduknya per tahun sebesar 18,5%, dimana jumlah penduduknya bertambah 6.607 jiwa, yaitu dari jumlah 18.153 pada tahun 1998 menjadi 24.220 jiwa pada tahun 2002.

Pertambahan jumlah penduduk di Desa Bojonggede secara jelas dapat dilihat pada tabel III.2 berikut :



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERENCANAAN URBANISASI KAWASAN
PENGIRIAN KOTA-JAKARTA
(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

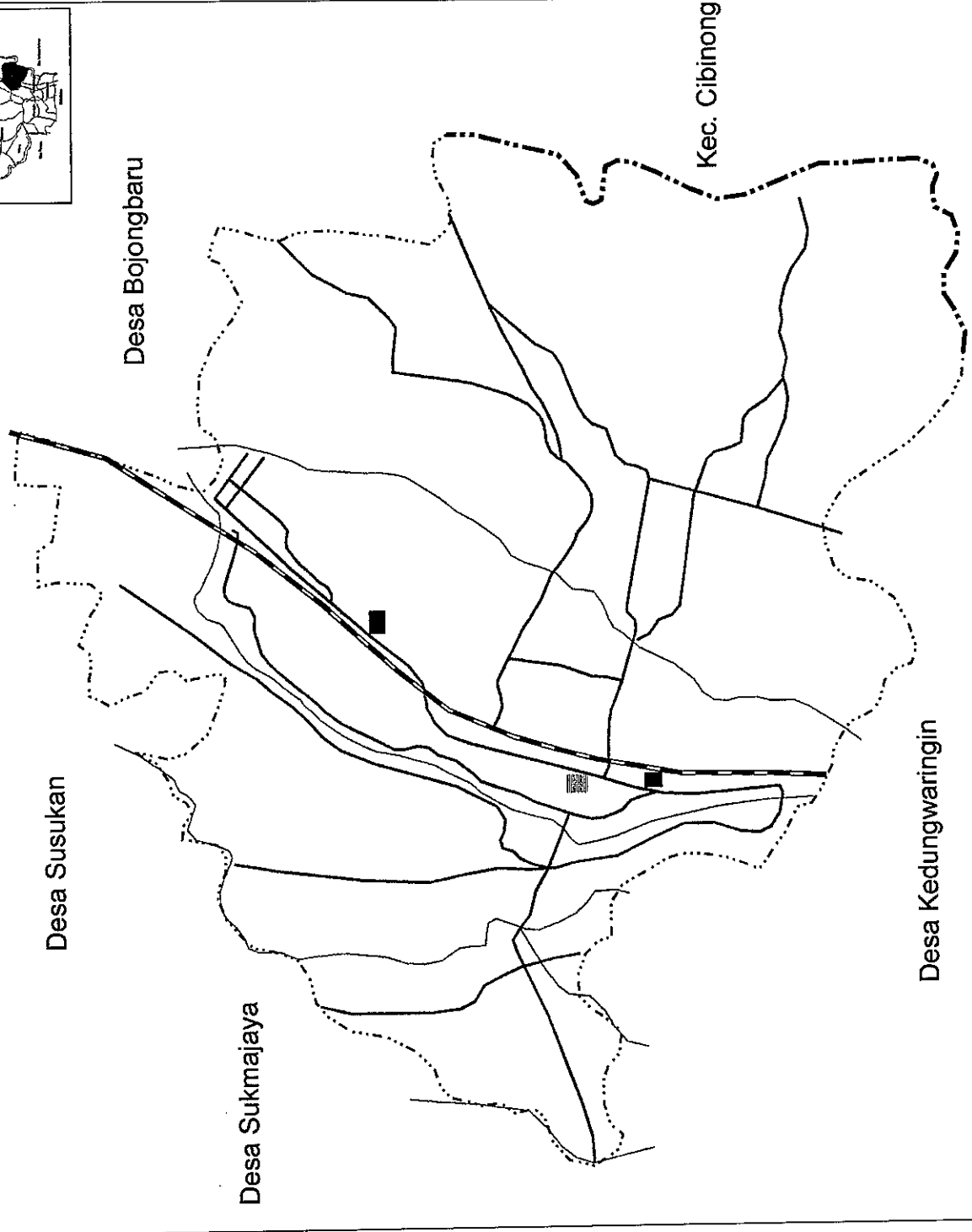
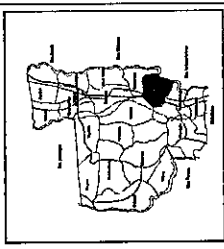
PETA

DESA BOJONGGEDE

KETERANGAN :

- Belas Kecamatan
- Belaa Desa
- Jalan
- - - - - Rel KA
- ~ Sungai
- Stasiun KA
- ▣ Kantor Kepala Desa
- Kantor Kecamatan

SUMBER	Utara
Kecamatan Bojonggede	4
SKALA	Nomor Gambar
1 : 15.000	3.3





MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PEKOMERA URBANISASI KAWASAN
PINGGIRAN KOTA JAWARTA

(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

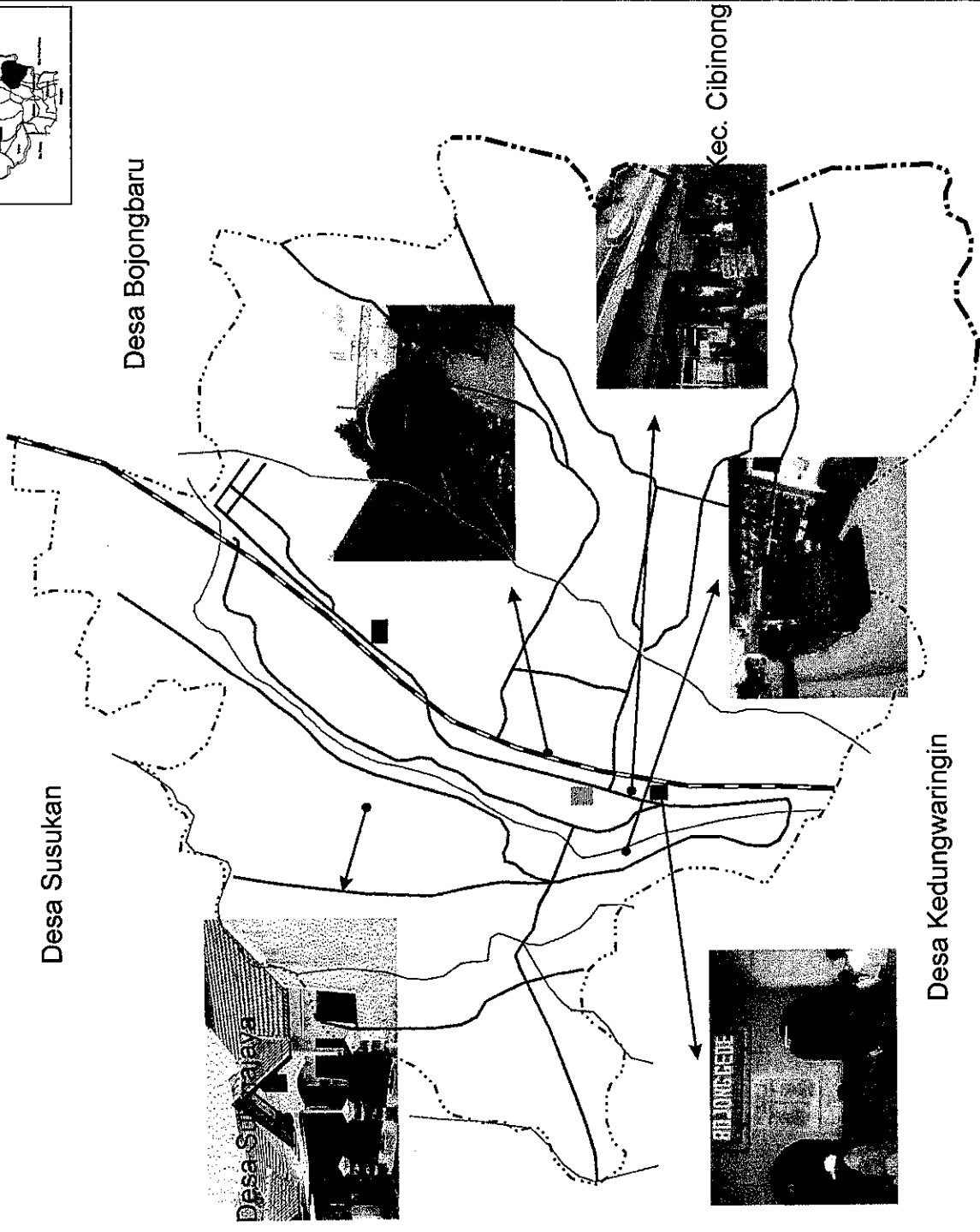
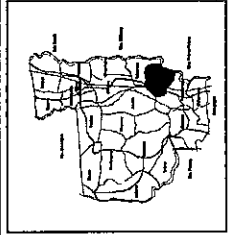
PETA

KONDISI DESA BOJONGGEDE

KETERANGAN :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- ~ Sungai
- Stasiun KA
- Kantor Kepala Desa
- Kantor Kecamatan

SUMBER	Utara
Kecamatan Bojonggede	4
SKALA	Nomor Gambar
1 : 15.000	3,4



Desa Susukan

Desa Bojongbaru

Kec. Cibinong

Desa Kedungwaringin

TABEL III.2
PERTUMBUHAN PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Prosentase
1998	18.153	17 %
1999	20.519	19 %
2000	21.799	20 %
2001	22.936	21 %
2002	24.220	23 %

Sumber : Kecamatan Bojonggede dalam angka, 2002

3.4.2 Perkembangan Mata Pencaharian Penduduk Desa Bojonggede

Sebelum invasi perkotaan memasuki Desa Bojonggede, sektor usaha pertanian merupakan basis utama perekonomian masyarakat daerah ini. Sebagian besar penduduknya terlibat dalam pekerjaan pertanian, karena kondisi alam, ekonomi dan sosial budayanya sangat mendukung keberadaan sektor ini. Kemudian masuknya invasi perkotaan ke daerah ini, merubah pola mata pencaharian penduduk yang semula didominasi peran sektor pertanian kepada non pertanian, terutama perdagangan dan jasa.

Perubahan mata pencaharian penduduk, ditandai dengan meningkatnya sektor perdagangan, yaitu 77 jiwa pada tahun 1987 menjadi 277 jiwa pada tahun 2002, sektor jasa sebesar 63 jiwa pada tahun 1987 menjadi 514 jiwa pada tahun 2002. Sedangkan untuk sektor pertanian tidak menunjukkan peningkatan, justru mengalami penurunan, yaitu sebesar 45 jiwa pada tahun 1987 menjadi 28 jiwa pada tahun 2002. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.3 berikut ini :

TABEL III.3
PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

No	Mata Pencaharian	Sebelum tahun 1987	Tahun 2002
1	Petani	45	28
2	Pedagang	77	277
3	Tukang	26	34
4	Jasa	63	514
5	Karyawan	467	467

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2004

3.4.3 Perkembangan Penggunaan Lahan Desa Bojonggede

Dalam kurun waktu 15 tahun (tahun 1987 hingga sekarang) di wilayah Bojonggede telah berdiri banyak kompleks pemukiman termasuk fasilitas pendukungnya yang semakin mendesak lahan-lahan pertanian. Penggunaan lahan di Desa Bojonggede pada tahun 1987 sebagian besar difungsikan sebagai tempat tinggal dan areal pertanian yang merupakan sumber penghasilan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, terutama untuk kawasan pemukiman hampir mencapai 50 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini :

TABEL III.4
PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI DESA BOJONGGEDE

Penggunaan Lahan	Tahun 1998		Tahun 2003	
	Luas	Prosentase	Luas	Prosentase
Sawah	26,2	10 %	13,0	5 %
Pekarangan	58,9	22 %	28,6	11 %
Perumahan	101,1	38 %	114,4	43 %
Ladang	62,73	23 %	100,7	37 %
Empang	2	1 %	2	1 %
Kuburan	3	1 %	3	1 %
Lainnya	14,7	5 %	6,9	3 %
Jumlah	268,6	100 %	268,6	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2004

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penggunaan lahan di Desa Bojonggede yang digunakan sebagai sawah (areal pertanian) selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5 %. Hal ini sangat kontras dengan kenaikan penggunaan lahan untuk kawasan perumahan yaitu sebesar 5 %. Kenaikan penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman tersebut tentunya sangat mempengaruhi keberadaan sawah yang semakin terdesak, mengingat permintaan rumah yang semakin meningkat. Untuk jelasnya mengenai gambaran spasial tata guna lahan di desa Bojonggede, dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERENCANAAN LUBERANSIASI KAWASAH
PINGGIRAN KOTA JAWARTA
(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

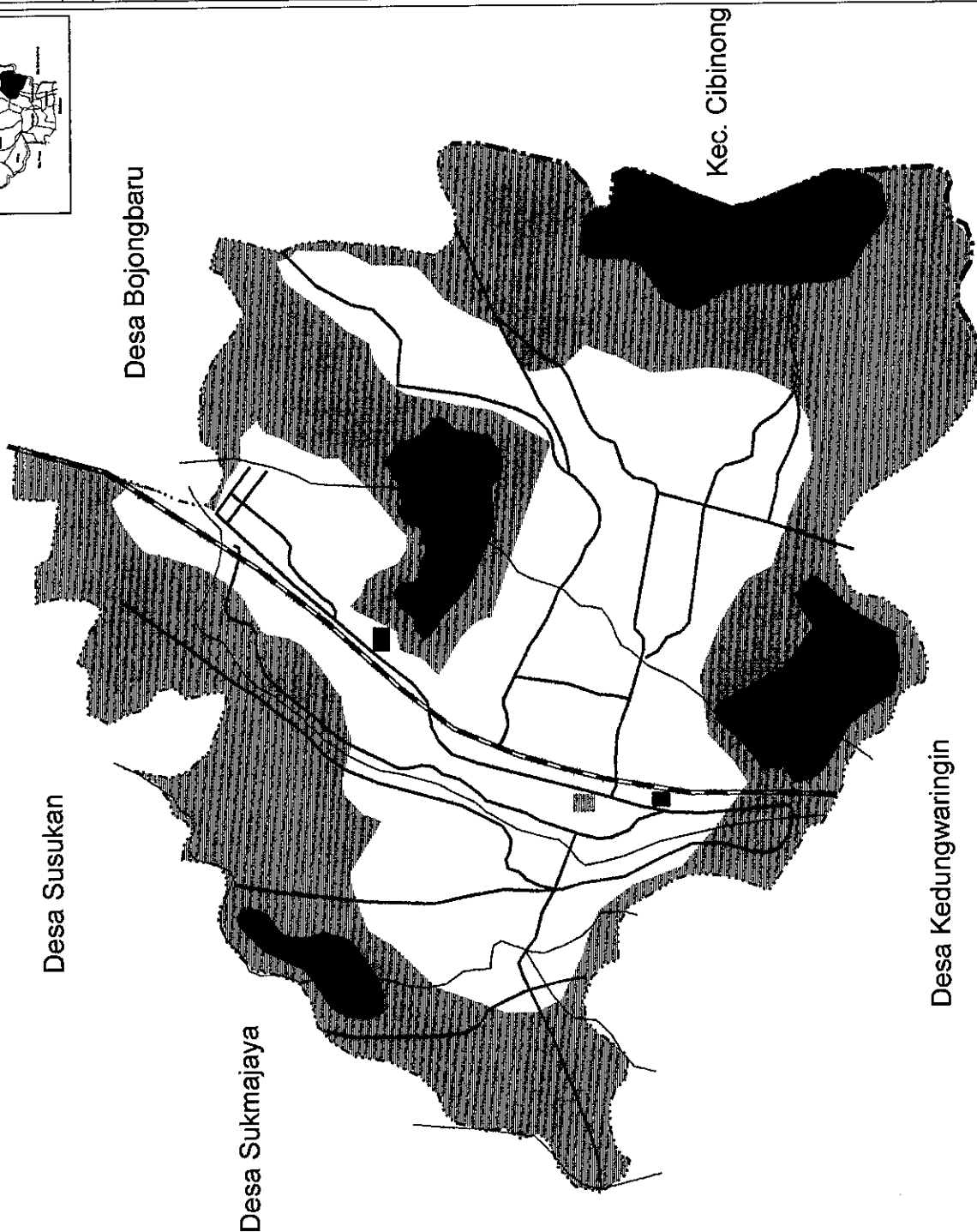
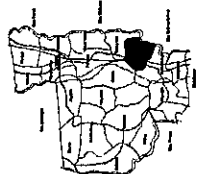
PETA

PENGUNAAN LAHAN DESA BOJONGGEDE

KETERANGAN :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- ~ Sungai
- Stasiun KA
- Kantor Kepala Desa
- Kantor Kecamatan
- Pemukiman
- Sawah
- Ladang

SUMBER	Utara
Kecamatan Bojonggede	4
SKALA	Nomor Gambar
1 : 15.000	3.5



3.5 Hipotesis Empiris

Dari kajian deskripsi wilayah studi yang menggambarkan kondisi desa Bojonggede, dapat ditarik beberapa Hipotesis bahwa proses perkembangan kota di desa Bojonggede menyebabkan terjadi beberapa perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Perubahan tersebut diantaranya meliputi:

1. Peningkatan jumlah penduduk desa Bojonggede
2. Pola penggunaan dan kepemilikan lahan di desa Bojonggede
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
4. Pola perubahan urbanisasi di desa Bojonggede

BAB IV FENOMENA PERKEMBANGAN URBANISASI DI DESA BOJONGGEDE

4.1. Kedudukan Desa Bojonggede terhadap Pusat Kota (Jakarta)

Perkembangan kota Jakarta dalam dua dekade menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal pertambahan jumlah penduduk. Implikasi dari fenomena tersebut adalah terjadinya *urban sprawl* yang menembus daerah-daerah pinggiran di sekitar kota Jakarta, salah satunya di Desa Bojonggede. Fenomena *urban sprawl* tersebut tidak dapat dihindari, seiring adanya kecenderungan arus migrasi yang tinggi di Jakarta dan semakin mempersulit pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada gilirannya, pertumbuhan penduduk tersebut melampaui jumlah yang dapat ditampung dalam batas administratif, sehingga mulai melebar melewati batas administratif Jakarta dan menuju daerah pinggiran (*hinterland*).

Desa Bojonggede yang memiliki luas wilayah 275.499 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan merupakan wilayah *hinterland* yang mendukung perkembangan kota Jakarta sebagai pusat kota. Di sisi lain sebagai wilayah *hinterland*, Desa Bojonggede secara tidak langsung juga “tergantung” dengan kota Jakarta, seperti dalam hal penyediaan fasilitas dan utilitas. Meskipun dalam kedudukannya berperan sebagai wilayah *hinterland*, namun dalam perkembangannya wilayah tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung perkembangan kota di atasnya (Jakarta), seperti dalam hal penyediaan tempat tinggal (rumah) dan produksi sayur-sayuran. Hal tersebut dibuktikan dari semakin dikembangkannya perumahan-perumahan (KPR) yang hingga saat ini menampung para *commuter*. Dan produksi pertanian dari desa Bojonggede, terutama produksi sayur-sayuran, sebagian besar

didistribusikan ke Jakarta dengan menggunakan kereta api pertama di pagi hari. Peranan (kontribusi) Desa Bojonggede terhadap Jakarta sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu sebagai daerah penyangga, maka kebijakan pengembangan Desa Bojonggede adalah :

- Menampung kebutuhan perumahan bagi wilayah DKI-Jakarta, namun harus tetap mempertahankan lahan untuk budidaya pertanian lahan kering dan lahan basah
- Karena letaknya yang berada di sebelah selatan DKI-Jakarta, maka Desa Bojonggede juga termasuk sebagai daerah resapan air dan kelestarian lingkungan

Peningkatan peran Desa Bojonggede sebagai daerah penyangga Jakarta mulai terlihat pada tahun 1987, atau sejak dikembangkannya kawasan pemukiman terencana (KPR) yang diikuti dengan dibangunnya berbagai fasilitas pendukung termasuk jalur transportasi. Hal tersebut juga diketahui berdasarkan survei primer yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Bojonggede, yang berpendapat bahwa perkembangan Desa Bojonggede sebagai *commuter's zone* dimulai pada tahun 1987.

Peningkatan peran Desa Bojonggede sebagai wilayah *hinterland* salah satunya juga disebabkan karena semakin mudah dan lancarnya akses yang menghubungkan antara Jakarta dan Desa Bojonggede, yang ditandai dengan dikembangkannya jalur kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Jabotabek, seperti :

- Kereta ekonomi Jabotabek, yang melayani perjalanan dari Bogor menuju Jakarta yang tentunya juga melewati Desa Bojonggede. Waktu tempuh yang diperlukan kereta ekonomi ini untuk menempuh perjalanan dari Bojonggede ke Jakarta sekitar 1 (satu) jam dengan kuantitas armada yang memadai
- Kereta Bojonggede Ekspres, yang melayani perjalanan dari Bojonggede menuju Jakarta. Kereta ini mulai dioperasikan pada tahun 2001 dan hanya memerlukan waktu

tempuh 30 menit dari Bojonggede menuju Jakarta. Tentunya keberadaan kereta api kelas ekspres ini semakin mempermudah akses menuju Desa Bojonggede

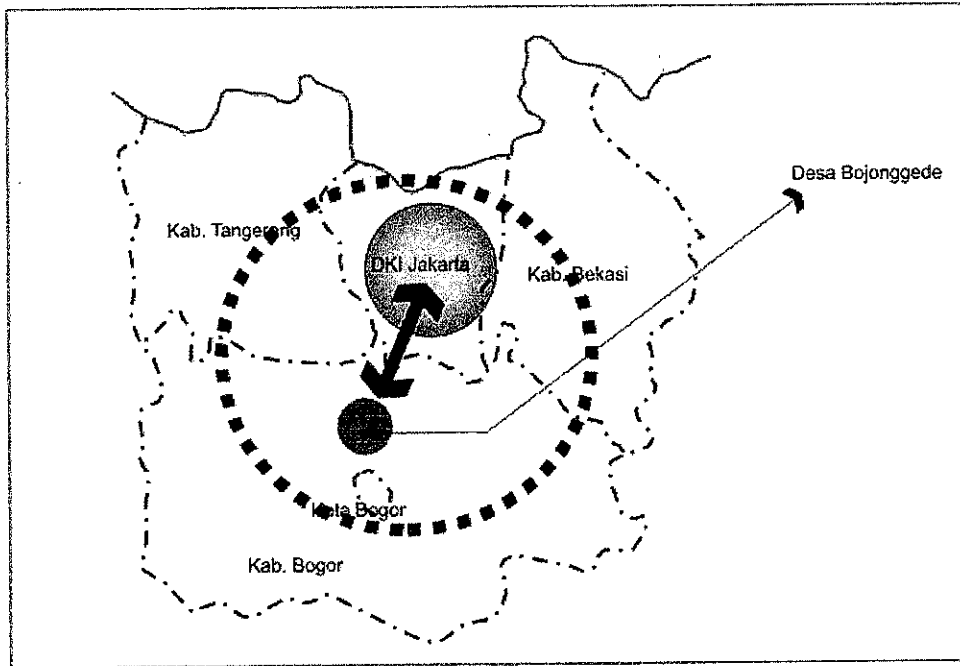
- Kereta Pakuan Ekspres, yang melayani perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Kereta ekspres yang memulai perjalanan dari Bogor ini hanya berhenti di stasiun Bojonggede

Kemudahan akses dari desa Bojonggede selain karena adanya dukungan pengembangan angkutan kereta api, juga didukung oleh keberadaan jaringan jalan raya dengan jumlah armada angkutan kota yang memadai. Peran jaringan jalan raya ini semakin signifikan seiring dengan rencana dari pemerintah untuk membangun Sub Terminal Kelas c yang akan dialokasikan di depan stasiun kereta api Bojonggede. Dukungan kemudahan transportasi baik kereta api maupun jaringan jalan raya, membuat letak dari Desa Bojonggede dinilai cukup strategis, baik untuk pengembangan kawasan pemukiman maupun perdagangan dan jasa. Selain itu juga dipengaruhi oleh jarak dari Desa Bojonggede yang secara orbitasi justru lebih dekat dengan ibukota negara (Jakarta) yaitu sekitar 60 km dibandingkan ke ibukota propinsi yaitu sekitar 120 km. Kedekatan dengan Jakarta yang merupakan pusat aktivitas tersebut menjadikan letak geografis dari Desa Bojonggede semakin strategis.



Sebagaimana dikemukakan oleh Horton dan Hunt (1984) bahwa transportasi modern sangat berperan dalam proses terciptanya daerah metropolitan dan daerah pinggiran kota, sehingga pola yang berkembang pada sebagian besar daerah metropolitan ditandai oleh adanya golongan minoritas di pusat kota yang dikelilingi oleh wilayah pinggiran kota (*hinterland*). Dengan demikian, terbukanya jalur transportasi antara kota dan pinggiran kota, seperti jalan raya dan kereta api merupakan salah satu faktor penting yang mendorong arah perluasan kota.

Kemudahan pencapaian (aksesibilitas) terhadap Desa Bojonggede, secara otomatis juga memudahkan aktivitas serta proses perpindahan barang maupun penduduk. Adanya kemudahan dalam menjalankan aktivitas dengan dukungan fasilitas aksesibilitas tersebut mendorong para *commuters* yang bekerja di kota Jakarta untuk bertempat tinggal di Desa Bojonggede karena lokasinya yang strategis.

Dalam berbagai teori perkembangan kota, khususnya *Concentric Zone Concept* dimana Desa Bojonggede merupakan wilayah pinggiran yang pada saat ini berkembang menjadi *commuter's zone* (lihat gambar 4.1) yang merupakan tempat tinggal para penduduk pendatang (*commuter*) yang sebagian besar bekerja di Jakarta. Perkembangan Desa Bojonggede sebagai *commuter's zone* karena CBD (Jakarta) tidak dapat menampung jumlah *commuter* yang terus berdatangan dimana setiap tahun semakin bertambah. Perubahan kedudukan Desa Bojonggede terhadap Jakarta selain dipengaruhi oleh lokasi geografis, juga dipengaruhi oleh penggunaan lahan di Jakarta yang semakin diorientasikan sebagai kawasan komersial sehingga mendesak lahan untuk kawasan pemukiman. Pada akhirnya di sekitar Jakarta akan terbentuk zona-zona baru yang merupakan akibat dari semakin penuhnya aktivitas yang harus ditanggung oleh Jakarta dan melebar ke daerah sekitarnya.



GAMBAR 4.1
CONCENTRIC ZONE CONCEPT

- Keterangan :
-  : CBD (dalam hal ini adalah Jakarta)
 -  : Commuter's zone (Desa Bojonggede)

Sumber : Hasil Analisa, 2004

4.2. Analisis Kondisi Eksisisting di Desa Bojonggede

Perkembangan Desa Bojonggede pada saat ini merupakan salah satu bentuk nyata dari pengaruh *spread effect* perkembangan kota Jakarta. Hal tersebut antara lain tampak dari faktor peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola penggunaan dan kepemilikan lahan serta perubahan kondisi sosial ekonomi penduduk.

4.2.1 Pertambahan Jumlah Penduduk

Perkembangan Jakarta ke daerah pinggiran salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Jakarta yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan, yaitu dekonsentrasi planologis kota Jakarta, melalui pemindahan dan pengembangan kegiatan-kegiatan baru maupun sebagian yang sudah ada di pusat-pusat

perkembangan baru di daerah sekitar Jakarta untuk mengalihkan pertumbuhan penduduk dari pusat kota ke pusat-pusat perkembangan baru di daerah pinggiran. Implikasi di ditetapkannya kebijakan tersebut, adalah jumlah penduduk di wilayah pinggiran semakin besar dibandingkan dengan pusat kota. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Lembaga Demografi FE UI yang diketahui bahwa kecepatan pertumbuhan penduduk daerah pinggiran kota Jakarta selama 20 tahun terakhir adalah tiga kali laju pertumbuhan penduduk kota Jakarta itu sendiri.

Begitu pula yang terjadi di Desa Bojonggede, yang termasuk dalam wilayah pinggiran Jakarta, terkena imbas dari kebijakan tersebut. Selain itu, pencapaian dari dan menuju Desa Bojonggede yang cukup mudah semakin mendorong peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Desa Bojonggede ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah perumahan yang ada, terutama perumahan terencana. Berdasarkan data yang ada pada tahun 1987 di Desa Bojonggede telah berdiri kompleks pemukiman baru (perumahan KPR) yang pertama, kemudian diikuti oleh pembangunan kompleks-kompleks pemukiman berikutnya, sehingga sampai saat ini di Desa Bojonggede telah berdiri empat kompleks pemukiman yang berdiri diatas tanah seluas 130 hektar. Kompleks pemukiman tersebut antara lain :

- Perumahan Bambu Kuning yang berdiri pada tahun 1982
- Perumahan Bojonggede Baru yang berdiri pada tahun 1989
- Perumahan Villa Asri yang didirikan pada tahun 1995
- Perumahan Griya Lestari yang didirikan pada tahun 1997

Perkembangan tersebut lebih lanjut diikuti oleh masuknya jaringan telekomunikasi dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Perkembangan perumahan di Desa Bojonggede tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lahan yang relatif masih luas,

harga lahan yang relatif lebih murah serta lokasinya yang cukup strategis, karena dekat dengan pusat kota dan akses yang mudah.

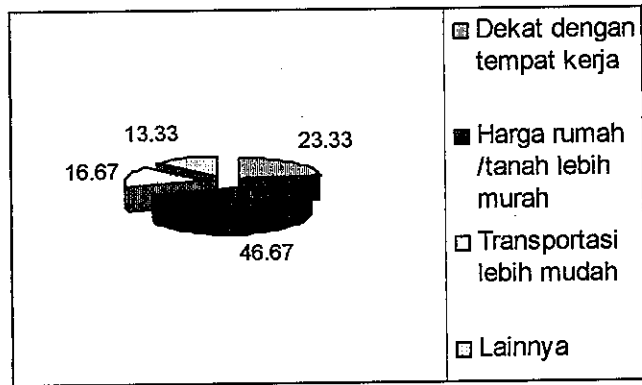
Seiring dengan perkembangan tersebut, pendatang baru mulai masuk terutama untuk tujuan mencari tempat tinggal. Mereka sebagian besar diantaranya mengisi kompleks-komplek pemukiman dan sebagiannya lainnya membangun atau membeli rumah-rumah di luar kompleks (perkampungan penduduk asli). Semakin besarnya arus migrasi yang masuk ke Desa Bojonggede, maka semakin memperbesar dan mempercepat pertumbuhan penduduk di wilayah ini.

Masuknya pendatang menuju desa Bojonggede merupakan fenomena yang sangat menarik, dimana secara tidak langsung perkembangan desa Bojonggede banyak dipengaruhi akibat adanya penduduk pendatang, khususnya yang berasal dari luar desa Bojonggede. Masing-masing penduduk pendatang tentu saja mempunyai alasan yang berbeda-beda mengapa sampai mereka memilih desa Bojonggede sebagai tempat tinggal. Adapun alasan penduduk pendatang yang mendiami desa Bojonggede dapat dilihat pada tabel IV.1 dan gambar 4.2 berikut ini.

TABEL IV.1
ALASAN PENDUDUK PENDATANG MEMILIH DESA BOJONGGEDE

No	Alasan Tinggal Di Bojonggede	Jumlah	Prosentase %
1	Dekat dengan tempat kerja	7	23,33
2	Harga rumah /tanah lebih murah	14	46,67
3	Transportasi lebih mudah	5	16,67
4	Lainnya	4	13,33
	Total	30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.2
PROSENTASE ALASAN PENDUDUK PENDATANG
MEMILIH DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisa, 2004

Dengan adanya penduduk pendatang di desa Bojonggede, secara langsung mempengaruhi jumlah penduduk di desa Bojonggede. Adapun penambahan jumlah penduduk di Desa Bojonggede secara jelas dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

TABEL IV.2
PERTUMBUHAN PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Prosentase
1998	18.153	17 %
1999	20.519	19 %
2000	21.799	20 %
2001	22.936	21 %
2002	24.220	23 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2004

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di desa Bojonggede per tahun relatif tinggi (23 %), dan merupakan prosentase pertumbuhan penduduk yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Kecamatan Bojonggede. Jumlah penduduk di Desa Bojonggede tersebut tidak hanya terdiri dari penduduk asli,

tetapi juga pendatang. Distribusi jumlah penduduk asli dan pendatang semakin tahun semakin bertambah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

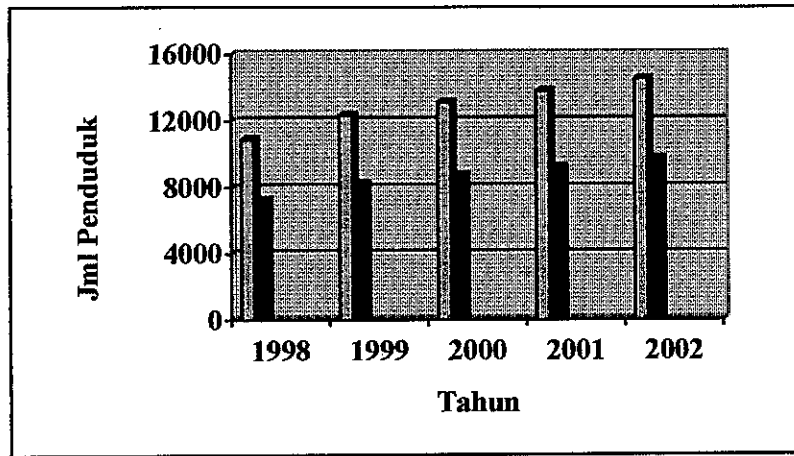
TABEL IV.3
DISTRIBUSI JUMLAH PENDUDUK ASLI DAN *COMMUTER* DI DESA
BOJONGGEDE

Tahun	Jumlah Penduduk Total (jiwa)	Jumlah Penduduk Asli (jiwa)	Jumlah <i>Commuter</i> (jiwa)
1998	18.153	10.381	7.752
1999	20.519	10.811	9.708
2000	21.799	11.079	10.710
2001	22.936	12.282	10.654
2002	24.220	12.832	11.388

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perbandingan antara jumlah penduduk asli dan *commuter* di Desa Bojonggede hanya terpaut 10 %. Seiring dengan tingginya angka migrasi ke Jakarta, maka akan berimplikasi pada semakin meningkat pula jumlah penduduk di daerah pinggiran Jakarta, seperti Desa Bojonggede. Oleh karena itu bukan tidak mungkin, apabila pada suatu waktu dapat terjadi jumlah penduduk pendatang (*commuters*) akan sama dengan atau bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk asli Desa Bojonggede. Pertambahan jumlah penduduk tersebut akan mengikuti perkembangan kawasan pemukiman (KPR) dan aktivitas lain yang mampu menyerap aktivitas dan tenaga kerja yang dikembangkan di Desa Bojonggede.

Secara lebih sistematis, perbandingan antara jumlah penduduk asli dan pendatang di Desa Bojonggede dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :



GAMBAR 4.3
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK ASLI DAN *COMMUTER* DI DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari tabel IV.3 diatas dapat diketahui bahwa angka pertumbuhan penduduk di desa Bojonggede adalah 0,0594 per tahun. Bila dilihat pada masing-masing penduduk, untuk angka pertumbuhan penduduk asli sebesar 0,0433 sedangkan untuk angka pertumbuhan pendatang sebesar 0,0799. Dengan menggunakan formula bunga berganda kita dapat memprediksi jumlah penduduk desa Bojonggede untuk 10 tahun ke depan, dengan rumus sebagai berikut

$$P_t = P_o (1 + n)^t$$

P_t = Jumlah penduduk pada tahun prediksi

P_o = Jumlah penduduk pada tahun awal

n = Angka pertumbuhan penduduk

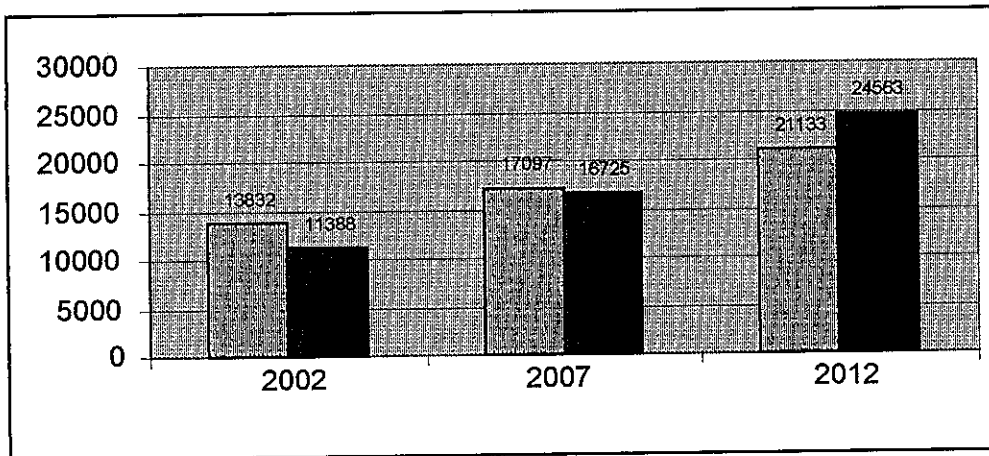
t = Tahun yang diharapkan

Jelasnya mengenai prediksi jumlah penduduk di desa Bojonggede dapat dilihat pada tabel IV.4 dan gambar 4.4.

TABEL IV.4
PREDIKSI JUMLAH PENDUDUK ASLI DAN *COMMUTER* DI DESA
BOJONGGEDE

Tahun	Jumlah Penduduk Total (jiwa)	Jumlah Penduduk Asli (jiwa)	Prosentase	Jumlah <i>Commuter</i> (jiwa)	Prosentase
2002	25.220	13.832	54,85	11.388	45,15
2007	33.822	17.097	50,55	16.725	49,45
2012	45.696	21.133	46,25	24.563	53,75

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.4
PREDIKSI JUMLAH PENDUDUK ASLI DAN *COMMUTER* DI DESA
BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisa, 2004

Berdasarkan tabel IV.4 dan gambar 4.4 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk asli dan pendatang per tahunnya semakin meningkat dengan prosentase yang hampir sama, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk pendatang telah melampaui jumlah penduduk asli. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mengindikasikan bahwa adanya perkembangan Desa Bojonggede yang semakin pesat. Pertambahan jumlah penduduk ini tentunya harus diwaspadai dengan memunculkan rencana kebijakan distribusi penduduk yang merata. Kondisi yang ada mengindikasikan bahwa distribusi jumlah penduduk

cenderung mengikuti jalur transportasi (linier). Rencana kebijakan distribusi penduduk yang dibuat hendaknya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung lahan yang ada. Dengan demikian peningkatan penduduk tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan.

4.2.2 Perubahan Pola Penggunaan dan Kepemilikan Lahan

Penetapan kebijakan dekonsentrasi planologis kota Jakarta sangat berimplikasi pada transfer penduduk dan perubahan pola penggunaan serta kepemilikan lahan di wilayah sekitar Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk di Desa Bojonggede yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah perumahan, tentunya sangat berimplikasi terhadap pola penggunaan dan kepemilikan lahan yang ada.

Dalam kurun waktu 15 tahun (tahun 1987-2003) di wilayah Bojonggede telah berdiri banyak kompleks pemukiman termasuk fasilitas pendukungnya yang semakin mendesak lahan-lahan pertanian. Penggunaan lahan di Desa Bojonggede pada tahun 1987 sebagian besar difungsikan sebagai tempat tinggal dan areal pertanian yang merupakan sumber penghasilan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, terutama untuk kawasan pemukiman hampir mencapai 50 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini :

TABEL IV.5
PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI DESA BOJONGGEDE

Penggunaan Lahan	Tahun 1998		Tahun 2003	
	Luas	Prosentase	Luas	Prosentase
Sawah	26,2	10 %	13,0	5 %
Pekarangan	58,9	22 %	28,6	11 %
Perumahan	101,1	38 %	114,4	43 %
Ladang	62,73	23 %	100,7	37 %
Empang	2	1 %	2	1 %
Kuburan	3	1 %	3	1 %
Lainnya	14,7	5 %	6,9	3 %
Jumlah	268,6	100 %	268,6	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel IV.5 di atas diketahui bahwa penggunaan lahan di Desa Bojonggede yang digunakan sebagai sawah (areal pertanian) selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5 %. Hal ini sangat kontras dengan kenaikan penggunaan lahan untuk kawasan perumahan yaitu sebesar 5 %. Kenaikan penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman tersebut tentunya sangat mempengaruhi keberadaan sawah yang semakin terdesak, mengingat permintaan rumah yang semakin meningkat.

Pemilikan tanah di kalangan penduduk asli tersebut merupakan warisan yang turun-temurun berdasarkan hubungan darah yang tidak diperjualbelikan. Hal ini dibenarkan oleh seorang informan:

.....dulu sih bener, tanah yang kita punya luas-luas, tapi nggak ada yang dapat beli.....semua kita dapatkan dari pembagian waris. Kalo sekarang sih....susah kita nunggu warisan.....abisnya tanah sekarang laku dijualin, nggak seperti dulu jarang orang yang mau beli tanah.....tapi memang kita dulu umumnya nggak berani ngejual tanah warisan.....takut kwalat.....

Namun setelah adanya perkembangan wilayah yang semakin pesat, penggunaan lahan untuk pertanian semakin terdesak dengan penggunaan lahan non pertanian, sehingga nilai

satuan tanah tidak lagi ditentukan oleh sejumlah produksi pertanian yang dapat dihasilkan (kesuburan tanah), melainkan oleh kemungkinannya untuk dapat digunakan bagi pengembangan usaha perdagangan atau perumahan. Hal ini antara lain menyebabkan meningkatnya kecenderungan jual beli tanah di kalangan penduduk asli, sehingga terjadi perubahan pemilikan lahan dari penduduk asli ke penduduk pendatang (*commuters*), pemilikan lahan yang luas menjadi sempit dan pemilikan dari satu orang kepada orang banyak (terjadi pengkavlingan). Meningkatnya peristiwa transaksi tanah antara penduduk asli dengan para pendatang, secara tegas dijelaskan oleh sekretaris desa setempat:

.....memang beberapa tahun belakangan ini.....yaa kira-kira setelah adanya pembangunan rumah-rumah BTN,hampir setiap hari ada saja orang yang mengurus surat jual beli tanah, bahkan dalam satu hari kadang-kadang bisa sampai 2 atau 3 orang.....

Alasan lain yang mendukung munculnya kecenderungan di kalangan penduduk asli untuk menjual lahannya dan merubah penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian antara lain berkaitan dengan beberapa faktor, seperti :

- Menurunnya produktivitas lahan pertanian yang disebabkan oleh berubahnya kesuburan tanah, karena sumber-sumber air (irigasi) yang mengalir lahan pertanian banyak yang tidak berfungsi (mati) karena adanya pembangunan kompleks-kompleks perumahan
- Proses pengolahan tanah pertanian menjadi semakin berat karena sulit dan mahalnya upah buruh tani, setelah munculnya sejumlah kesempatan usaha ekonomi lain yang dianggap lebih ringan dan lebih banyak mendatangkan keuntungan
- Biaya pengolahan dan pemeliharaan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang akan diperoleh
- Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi.

- Adanya kompetisi (persaingan) yang semakin ketat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi

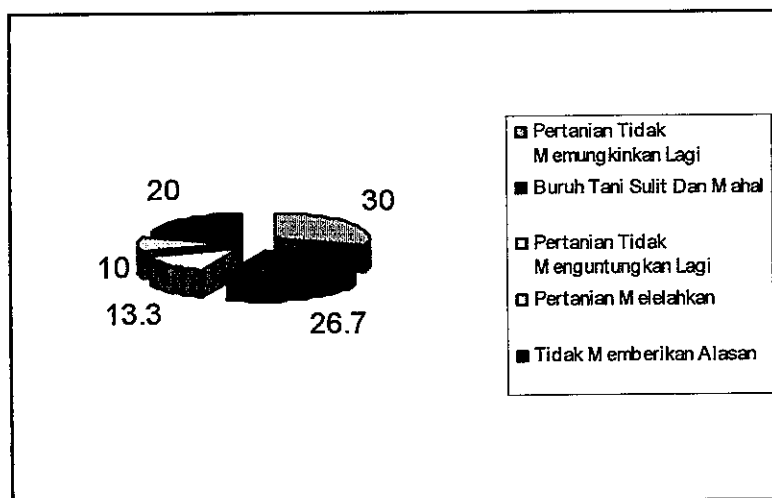
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan pola penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian di sebabkan oleh beberapa hal, seperti penduduk berpendapat bahwa pemanfaatan lahan untuk pertanian sudah tidak memungkinkan, karena buruh tani semakin sulit dicari dan mahal karena penduduk yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh tani telah alih profesi ke bidang industri maupun perdagangan dan jasa, pemanfaatan lahan untuk pertanian sudah tidak menguntungkan karena produktivitas lahan yang menurun dan biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual dan berpendapat bahwa pekerjaan di bidang pertanian melelahkan serta tidak memberikan alasan, karena sudah tidak memiliki lahan pertanian karena telah dijual.

Secara lebih jelas mengenai latar belakang penduduk merubah penggunaan lahan yang dimilikinya dari sektor pertanian ke non pertanian dapat dilihat pada tabel IV.6 dan gambar 4.6 berikut :

TABEL IV.6
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN
DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI DESA BOJONGGEDE

No	Alasan Mengubah Lahan Pertanian	Jumlah	Prosentase %
1	Pertanian Tidak Memungkinkan Lagi	9	30
2	Buruh Tani Sulit Dan Mahal	8	26,7
3	Pertanian Tidak Menguntungkan Lagi	4	13,3
4	Pertanian Melelahkan	3	10
5	Tidak Memberikan Alasan	6	20
	Total	30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.6
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN
DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI DESA BOJONGGEDE

Keterangan :

- 1 : Pertanian Tidak Memungkinkan Lagi
- 2 : Buruh Tani Sulit Dan Mahal
- 3 : Pertanian Tidak Menguntungkan Lagi
- 4 : Pertanian Melelahkan
- 5 : Tidak Memberikan Alasan

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Bojonggede (30 %) merubah penggunaan lahannya dari pertanian ke non pertanian dikarenakan pekerjaan di bidang pertanian tidak memungkinkan lagi. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya peluang pekerjaan yang lain yang lebih menguntungkan, seperti dalam hal perdagangan dan jasa serta angkutan. Sementara 10 % penduduk beranggapan bahwa pekerjaan di bidang pertanian melelahkan. Budaya ini sebagian besar berkembang pada penduduk usia kerja (20 – 40 tahun), yang menganggap bahwa pekerjaan

pertanian melelahkan dan lebih menyukai pekerjaan di bidang lain, seperti industri, perdagangan dan jasa serta angkutan, sehingga penduduk yang berprofesi sebagai petani sebagian besar adalah penduduk dengan usia 40 – 60 tahun. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya penduduk usia 20 – 40 tahun yang berprofesi sebagai tukang ojek, yang melayani ojek dari jalan raya menuju ke dalam kompleks pemukiman yang sebagian besar belum difasilitasi dengan angkutan kota. Pekerjaan ini dianggap cukup potensial mengingat kompleks pemukiman yang ada semakin dikembangkan, dan ada penduduk yang menjadikan pekerjaan ojek tersebut sebagai pekerjaan utama. Bahkan tidak sedikit penduduk yang telah berprofesi sebagai petani memiliki usaha sampingan sebagai tukang ojek, karena penghasilan yang diterima bertambah. Munculnya sektor angkutan “ojek” sebagai pekerjaan sampingan ini, secara jelas dikemukakan oleh seorang informan :

..... sekarang sih bukan hanya anak-anak muda yang pada ngojek....orang-orang tua juga ikut-ikutan....tetapi biasanya mereka ngojek pada malam hari, karena kalau siang mereka sibuk bekerja.....

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian yang dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki oleh penduduk telah dijual yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan lahan. Penjualan lahan pertanian cukup signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian yang semakin berkurang dan profesi petani itu sendiri yang tentunya akan semakin menurun seiring dengan semakin besarnya lahan pertanian yang dijual. Menurunnya aktivitas pekerjaan pertanian telah mengakibatkan beberapa produksi pertanian di Bojonggede, menjadi sulit dan mahal. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan :

.....sebelum ada kompleks-kompleks BTN, bagi orang-orang sini yang namanya sayuran, singkong, biar enggak punya kebun sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari mah ngak

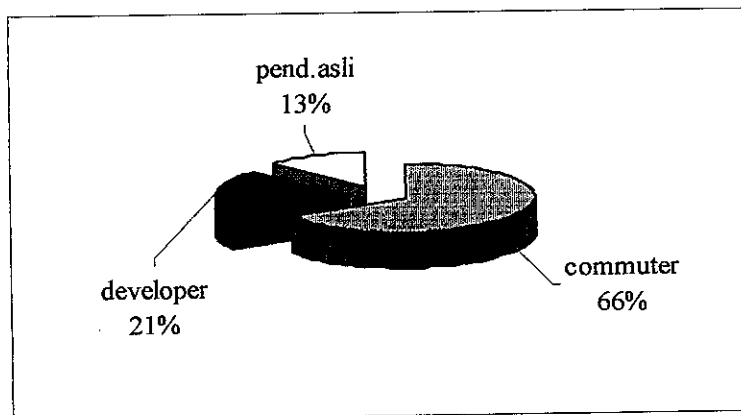
susah.....kita tinggal minta aja sama tetangga.....sekarang sih boro-boro minta, mau beli aja kadang-kadang barangnya ngak ada.....

Pergeseran pola pemilikan lahan ini dapat dilihat dari penjualan tanah yang dilakukan penduduk asli ke pendatang, developer maupun penduduk asli lainnya. Untuk jelasnya mengenai perubahan penggunaan lahan di Desa Bojonggede, dapat dilihat pada tabel IV.7 dan gambar 4.7 berikut ini.

TABEL IV.7
PERUBAHAN PEMILIKAN LAHAN DARI PENDUDUK ASLI
DESA BOJONGGEDE

No	Pergeseran Kepemilikan	Jumlah	Prosentase %
1	Penduduk asli	4	13
2	Developer	6	21
3	Commuter	20	66
		30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.7
PROSENTASE PERUBAHAN PEMILIKAN LAHAN DARI PENDUDUK ASLI
DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

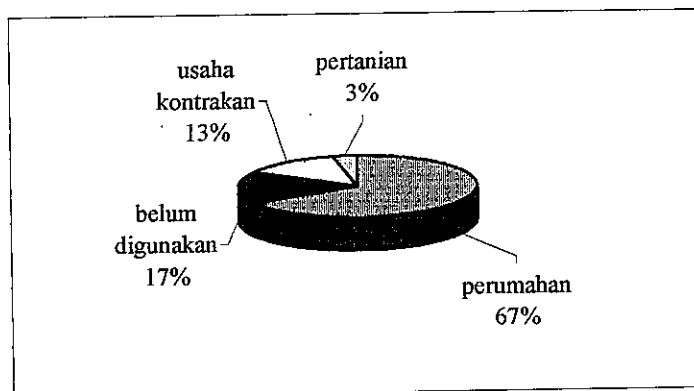
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli (66 %) menjual tanahnya kepada penduduk pendatang (*commuter*) dimana sebagian besar

menggunakannya sebagai areal pemukiman. Semakin besarnya prosentase penjualan lahan dari penduduk asli ke pendatang, maka akan semakin meningkat pula perubahan lahan dari pertanian ke non pertanian (kawasan pemukiman). Namun tidak seluruh penduduk pendatang yang membeli lahan dari penduduk asli Desa Bojonggede menggunakan lahan tersebut sebagai pemukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.8 dan gambar 4.8 berikut :

TABEL IV.8
PENGGUNAAN LAHAN OLEH *COMMUTER* DI DESA BOJONGGEDE

No	Penggunaan Lahan	Jumlah	Prosentase %
1	Pertanian	1	3
2	Usaha kontrakan	4	13
3	Perumahan	20	67
4	Belum digunakan	5	17
		30	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.8
PROSENTASE PENGGUNAAN LAHAN OLEH *COMMUTER* DI DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan gambar 4.8 di atas diketahui bahwa tidak seluruh penduduk pendatang yang membeli lahan dari penduduk asli Desa Bojonggede menggunakan lahan tersebut untuk pemukiman, meskipun prosentase lahan yang dialihfungsikan menjadi

pemukiman relatif paling tinggi (67 %). 13 % penduduk yang membeli lahan tersebut menggunakan sebagai usaha kontrakan karena menilai usaha ini cukup potensial karena semakin banyaknya industri dan usaha perdagangan dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari Desa Bojonggede, yang tentunya membutuhkan tempat tinggal. Sedangkan 17 % penduduk yang membeli lahan dari penduduk asli belum menggunakan lahan tersebut, dan hanya merupakan investasi di masa yang akan datang, yang tentunya harga lahan akan semakin meningkat, sehingga apabila dijual kembali akan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kalangan penduduk asli tersebut, juga ditegaskan oleh seorang informan:

.....belakangan ini di Bojonggede bagi orang-orang yang banyak uang dan punya tanah yang luas, kelihatannya lebih tertarik untuk membangun rumah-rumah kontrakan.....mungkin karena semakin banyaknya orang-orang yang mencari rumah ke sini.....bukan hanya membeli tetapi juga yang mau kontrak.....mereka pada umumnya buruh-buruh dari daerah, pedagang dan ada juga pegawai-pegawai pabrik di Jakarta.....

Meningkatnya kecenderungan penduduk asli untuk menjual lahan yang tidak terkendali, pada tahap lebih lanjut akan semakin mengancam keberadaan penduduk asli. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bojonggede bahwa :

“.....suatu ketika kemungkinan penduduk asli Desa Bojonggede akan menjadi minoritas di daerahnya (kampungnya) sendiri”. Bahkan kondisi tersebut telah terjadi di beberapa wilayah.

Kecenderungan penduduk asli untuk merubah penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian dan menjual lahan yang dimiliki merupakan tindakan yang logis sebagai upaya antisipatif terhadap dampak perkembangan kota, yang secara ekonomi menuntut mereka untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup ditengah persaingan ekonomi perkotaan yang semakin kompleks. Dengan demikian

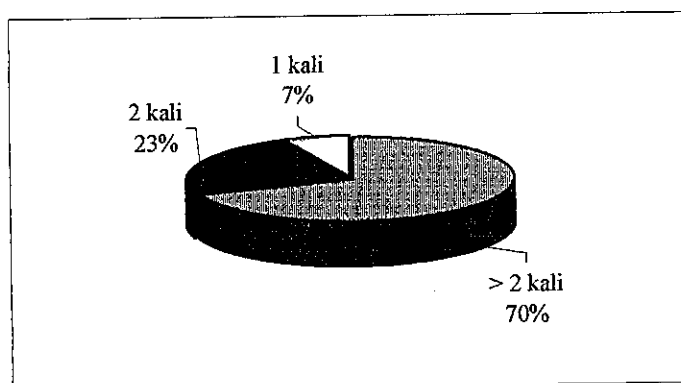
perubahan penggunaan lahan oleh penduduk asli, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan kebutuhan kehidupan ekonomi mereka yang semakin meningkat.

Proses perubahan kepemilikan lahan di Desa Bojonggede yang dikarenakan adanya kecenderungan penduduk asli untuk menjual lahannya kepada pendatang, developer maupun penduduk asli yang lain juga dapat ditinjau dari frekuensi penjualan lahan yang dilakukan oleh penduduk asli. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.9 dan gambar 4.9 berikut ini.

TABEL IV.9
FREKUENSI PENJUALAN LAHAN PENDUDUK ASLI DESA BOJONGGEDE

No	Frekuensi Penjualan	Jumlah	Prosentase %
1	1 kali	2	7
2	2 kali	7	23
3	lebih dari 2 kali	21	70
		30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.9
FREKUENSI PENJUALAN LAHAN PENDUDUK ASLI DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan gambar 4.9 di atas diketahui bahwa 70 % penduduk asli Desa Bojonggede telah menjual lahannya lebih dari 2 (dua) kali. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan penduduk asli untuk menjual lahannya sangat besar. Sehingga bukan tidak

mungkin apabila pada suatu saat kepemilikan lahan di desa Bojonggede sebagian besar adalah milik pendatang dan penduduk asli semakin terdesak.

4.2.3 Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi

a. Perubahan Kondisi Sosial Penduduk Desa Bojonggede

Sebagai suatu komunitas, masyarakat di Desa Bojonggede pada mulanya menunjukkan suatu sistem interaksi yang masih diwarnai oleh pola-pola kekerabatan, sebagaimana umumnya yang terjadi pada pola interaksi paguyuban (*gemeinschaft*) yang dapat ditemui dalam hampir seluruh bentuk komunitas desa di Indonesia. Dalam pola paguyuban seperti ini, bentuk interaksi yang berkembang diungkapkan dalam tindakan-tindakan sosial yang makna dan manfaatnya dirasakan oleh semua partisipan yang terlibat dalam sistem sosial desa tersebut. Pola-pola seperti ini sering disebut sebagai *gotong royong* yang diwujudkan dalam bentuk saling bantu antar warga dalam seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi, yang mungkin tidak akan ditemui dalam sistem interaksi di daerah perkotaan.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat pinggiran seperti Desa Bojonggede sebagai dampak dari perkembangan kota (DKI Jakarta) secara analisis dapat dilihat dalam kerangka perubahan sosial, yaitu perubahan yang mengacu pada struktur sosial seperti sikap dan pola perilaku atau kebiasaan bertindak diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat, serta interaksi sosial atau tata hubungan antar masyarakat (Soemardjan, 1981:303)

Pertumbuhan penduduk akan selalu menimbulkan perubahan ekologis, yang pada gilirannya merangsang terjadinya perubahan tata hubungan antara kelompok-kelompok sosial (Soemardjan, 1983:303). Demikian pula halnya yang terjadi kehidupan masyarakat desa Bojonggede, proses perkembangan kota yang melibatkan masuknya sejumlah besar

pendatang baru dengan latar belakang sosial-ekonomi yang sangat heterogen, telah merubah tata hubungan sosial diantara penduduk asli.

Kecenderungan penduduk asli untuk menjual tanah dan beralih mata pencaharian yang menandai proses perkembangan kota di desa Bojonggede, telah meningkatkan kemakmuran sebagian besar penduduk. Dengan dimilikinya sejumlah uang, baik dari hasil penjualan tanah maupun dari hasil mata pencaharian mereka, ternyata diikuti peningkatan biaya hidup. Apabila hal ini dihubungkan dengan proses pengkotaan yang terjadi di Bojonggede, bertambahnya kebutuhan hidup tersebut merupakan suatu hal wajar. Karena tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan hidup yang mengiringi proses pengkotaan, seperti sarana transportasi dan komunikasi, sarana kesehatan, pendidikan, hiburan, perdagangan, dan sebagainya, telah menarik penduduk asli untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Bertambahnya kebutuhan penduduk tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang dan pangan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, seperti peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, dan kendaraan bermotor, yang banyak dimiliki oleh penduduk asli. Seperti dikatakan oleh seorang informan:

.....sekarang mah kalo kita mampir di rumah-rumah tetangga, hampir semua dirumahnya ada televisi, bahkan ada juga yang punya kulkas, mesin cuci.....dulu mah kita mau nonton TV susahya bukan main.....se desa Bojonggede ini paling hanya beberapa orang saja yang punya.

Masuknya pendatang baru yang disertai dengan pembangunan kompleks-komplek pemukiman dan pembangunan-pembangunan fisik lainnya, sedikit demi sedikit merubah hubungan sosial sesama penduduk asli. Ketika mereka masih bekerja pada sektor pertanian hubungan diantara penduduk asli masih bisa berlangsung di sawah atau dikebun sambil bekerja. Tetapi dengan berubahnya pemilikan, penggunaan lahan, lahan pekerjaan

mereka, maka pertemuan tersebut tidak bisa dilangsungkan lagi dalam satu tempat karena kesibukan mereka masing-masing yang sudah berbeda-beda, sehingga pertemuan diantara penduduk asli lebih banyak dalam situasi yang lebih formal seperti dalam kegiatan pengajian, siskamling, dan kegiatan-kegiatan kampung lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan:

.....dulu yang namanya pengajian rasanya nggak pernah sepi....boleh dikata orang sekampung sini hadir semua, ya kita dapat ilmu dari kiyai juga sambil silaturahmi.....tapi sekarang udah lain, jangankan ngaji.....shalat jamaah aja di mesjid paling banter ada lima atau enam orang.....

Tetapi dengan bertambah besarnya arus masuk kaum pendatang ke daerah ini, pertemuan-pertemuan antara penduduk asli melalui kegiatan RT/RW pun mulai berkurang, karena merekapun terbawa oleh kebiasaan baru yang dikembangkan oleh para pendatang yang pada umumnya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan kampung seperti siskamling, pengajian, arisan tidak bisa diikuti dan sebagai penggantinya mereka membayar iuran sebagai pengganti kegiatan. Kebiasaan ini juga banyak diikuti oleh penduduk asli, yang mulai menunjukkan kesibukan dengan aktifitas pekerjaannya. Hal tersebut menurut Resminarsasi merupakan dampak proses perkotaan.

Hasil temuan tersebut, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wirth (1938) bahwa, semakin besarnya jumlah penduduk, meningkatnya kepadatan penduduk dan tingginya heterogenitas, menyebabkan masing-masing warga kota tidak dapat lagi mengembangkan pola-pola hubungan yang intensif, melainkan hubungan yang bersifat impersonal, karena kesibukan masing-masing dan latar belakang sosial budaya yang beragam.

Selain itu berubahnya tata hubungan sosial diantara penduduk dapat diidentifikasi dari melemahnya hubungan sosial, seperti gotong royong dan tolong menolong yang

sebelumnya telah menjadi ciri masyarakat dalam mengatasi berbagai kesulitan, sekarang menjadi cenderung individual. Perubahan nilai dalam hubungan sosial ini diidentifikasi oleh Soedjito (1987) dikarenakan adanya peningkatan peredaran uang di daerah pedesaan. Didalam masyarakat dengan peredaran uang yang terbatas, jasa dipergunakan sebagai alat penukar. Manifestasinya, tercipta gotong royong dan sifat tukar menukar jasa yang mengakibatkan saling ketergantungan. Sebaliknya di dalam masyarakat dengan peredaran uang yang intensif, masyarakat dapat berhubungan dengan orang lain tanpa saling mengenal dan melihat, sehingga saling ketergantungan menjadi menipis.

b. Perubahan Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Bojonggede

Selain berpengaruh pada perubahan kondisi sosial perkembangan desa Bojonggede juga berpengaruh pada kondisi ekonomi. Perubahan tersebut terlihat dari adanya pergeseran mata pencaharian penduduk. Sebelumnya sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian namun seiring dengan semakin terdesaknya lahan pertanian dengan non pertanian, yang dikarenakan dikembangkannya kawasan pemukiman dan adanya peningkatan aktivitas yang memerlukan lahan, maka sebagian besar penduduk tersebut juga beralih profesi ke sektor non pertanian terutama sektor perdagangan dan jasa. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya pergeseran atau perubahan dalam penggunaan lahan, maka akan berimplikasi terhadap pergeseran mata pencaharian penduduk. Perubahan tersebut juga didukung oleh munculnya sejumlah kesempatan usaha baru yang berkembang sejalan dengan masuknya investasi ke desa Bojonggede.

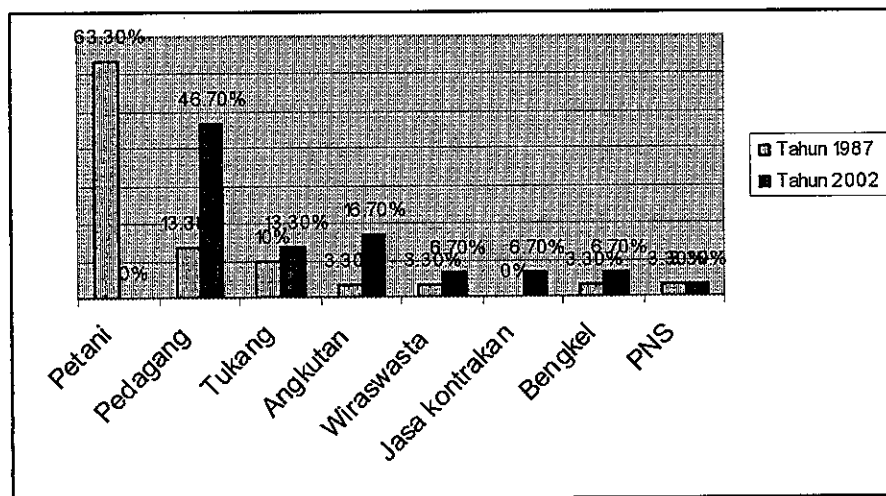
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perubahan mata pencaharian penduduk, ditandai dengan meningkatnya sektor perdagangan, yaitu sebesar 46,7%, sektor usaha angkutan sebesar 16,7 %, sektor jasa 6,7 %. Sedangkan untuk sektor pertanian tidak

menunjukkan peningkatan, justru mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.10 dan gambar 4.10 berikut ini :

TABEL IV.10
PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

No	Mata Pencaharian	Sebelum tahun 1987		tahun 2002	
		Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	prosentase
1	Petani	19	63,3 %	0	0 %
2	Pedagang	4	13,3 %	14	46,7 %
3	Tukang	3	10 %	4	13,3 %
4	Angkutan	1	3,3 %	5	16,7 %
5	Wiraswasta	1	3,3 %	2	6,7 %
6	Jasa kontrakan	0	0 %	2	6,7 %
7	Bengkel	1	3,3 %	2	6,7 %
8	PNS	1	3,3 %	1	3,3 %
		30	100	30	100

Sumber : Hasil Analists, 2004



GAMBAR IV.10
PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisa, 2004

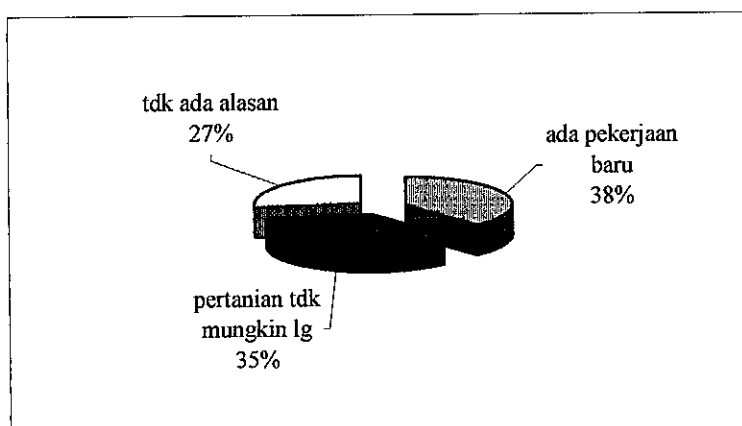
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perubahan prosentase penduduk Desa Bojonggede mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada pertanian yang menurun

sebanyak 63,3 %, perdagangan yang meningkat dengan tajam, yaitu sebesar 33,4 %. Perubahan mata pencaharian penduduk tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti adanya peluang pekerjaan baru yang lebih menjanjikan karena perolehan pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan lama dan juga karena pekerjaan dalam bidang pertanian sudah tidak memungkinkan lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.11 dan gambar 4.11 berikut ini.

TABEL 4.11
LATAR BELAKANG PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
BOJONGGEDE DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN

No	Latar Belakang	Jumlah	Prosentase %
1	Pertanian tidak mungkin lagi	11	35
2	Ada pekerjaan baru	11	38
3	Tidak ada alasan	8	27
		30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.11
LATAR BELAKANG PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
BOJONGGEDE DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel IV.11 dan gambar 4.11 di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Bojonggede (38 %) berpindah mata pencaharian dari pertanian

ke sektor lain dikarenakan adanya pekerjaan lain yang lebih besar mendatangkan penghasilan, seperti dalam perdagangan dan jasa serta industri dan angkutan. Sedangkan 35 % penduduk asli berpendapat bahwa pekerjaan dalam pertanian tidak mungkin untuk ditekuni lagi sebagai mata pencaharian utama, karena hasil yang diperoleh minim dan 27 % penduduk tidak memberikan alasan karena tidak memiliki lahan pertanian dan saat ini tidak bekerja dalam bidang pertanian dan tidak berpindah pekerjaan.

Mengamati perubahan mata pencaharian penduduk dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan atau pergantian mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian, tidaklah semata-mata karena perubahan kondisi lahan dan banyaknya peluang usaha baru yang muncul. Tetapi juga karena *keterpaksaan*. Perubahan tersebut merupakan manifestasi dari upaya adaptasi penduduk dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Dimana, proses pengkotaan menyebabkan semakin rendahnya alternatif bagi para petani untuk tetap mempertahankan bidang pertanian. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan:

Bagi para petani memang tidak punya pilihan lain selain berganti pekerjaan....abis mau gimana lagi, kalo kita tetap bertahan juga bekannya untung, tekor sih iya.....bukan saja ongkos pekerjaannya yang mahal tapi juga keadaan tanahnya sudah tidak memungkinkan.....sumber air yang dulu mengalir ladang dan pesawahan di sini, sekarang kagak ada lagi.....berubah jadi rumah-rumah BTN dan jalan.....

.....tapi biar ganti pekerjaan juga nggak merubah ekonomi menjadi lebih baik. Soalnya terus terang aja....kita sulit berkembang.....coba aja lihatkita buka warung, orang-orang lain juga pada buka.....termasuk orang-orang pendatang. Mau usaha yang lain, enggak punya keahlian dan modal.....mangkanya jadi serba susah.....ya akhirnya orang sini sih ikut-ikutan orang lain aja.....

Perubahan tata guna lahan yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk asli yang bekerja pada sektor pertanian. Di satu sisi, memang melahirkan sejumlah kesempatan usaha yang bervariasi, namun disisi lain, munculnya sejumlah kesempatan usaha tersebut

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk asli, bahkan diantaranya banyak yang terpaksa harus mengorbankan sejumlah usaha yang ada sebelumnya.

Kerajinan bambu di Desa Bojonggede dulunya terkenal di Desa Bojonggede, mengingat potensi bambu di Bojonggede sangat besar. Tetapi sekarang hutan-hutan bambu tersebut hampir tidak ada karena telah berubah fungsi menjadi perumahan. Kemudian sektor perikanan juga mengalami penurunan dan bahkan hampir tidak ada kolam-kolam ikan lagi, karena penduduk asli yang mempunyai kolam cenderung untuk mengurug tanahnya dan dialihfungsikan untuk kegunaan lain atau dijual. Seperti dikemukakan oleh seorang informan:

.....di Bojonggede sekarang ini enggak ada tanah yang nggak laku di jual.....makanya tanah-tanah empang pun sekarang pada diurug supaya bisa dijual lebih mahal.....sampai tanah rawa pun yang dulunya nggak ada orang mau peduli, sekarang pada diurug.....

Hilangnya sejumlah bidang usaha sampingan juga terjadi pada bidang usaha lainnya, seperti yang dikatakan oleh seorang informan:

.....Sebelum penerangan listrik masuk ke Bojonggede, jalan ke kampung-kampung di sini masih gelap, terutama malam hari.....rumah-rumah juga masih jarang. Tapi kalau malam hari banyak tukang-tukang obor yang menunggu orang-orang pulang kerja dari Jakarta.....mereka diantar pake obor dan membayar seratus atau dua ratus perak tergantung jaraknya. Sekarang sih sudah ada listrik, ada ojeg,....obor ngak dipake lagi.....

.....dulu sih kalo pagi-pagi kira-kira mulai jam 2, di stasiun kereta sudah ramai dengan pedagang-pedagang rambanan (pedagang sayuran seperti pucuk singkong, bayam, kacang-kacangan),sekarang sudah enggak ada.....

4.3 Analisis Implikasi Perkembangan Desa Bojonggede

Perkembangan Desa Bojonggede saat ini sangat berimplikasi pada beberapa hal, seperti perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi perubahan harga lahan dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

4.3.1 Implikasi Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di Desa Bojonggede, berimplikasi pada satu hal, yaitu adanya peningkatan harga lahan. Terjadinya peningkatan harga lahan di Desa Bojonggede disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Perkembangan perumahan terencana (KPR) yang semakin pesat, tentunya semakin mendesak lahan-lahan yang relatif luas, sehingga nilai jual lahan yang semula digunakan sebagai tujuan produksi pertanian menjadi nilai jual komersial. Hal inilah yang mendorong meningkatnya harga lahan
- b. Perkembangan transportasi yang semakin mempermudah akses dari Desa Bojonggede ke wilayah lain, juga meningkatkan harga lahan, terutama lahan-lahan yang terdapat di sepanjang jalan raya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Evers (1986:29) bahwa berkembangnya gejala akibat kebijakan dekonsentrasi planologis baik secara terencana maupun natural akan menimbulkan gejala baru, yaitu berubahnya konsep fungsi lahan khususnya bagi penduduk asli. Sebelum adanya arus dekonsentrasi, nilai lahan hanya dilihat dari fungsinya sebagai lahan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Namun setelah berkembangnya arus dekonsentrasi maka konsep lahan berubah menjadi nilai komersial sebagai “barang” yang dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang komoditas. Perubahan tersebut sangat berkaitan erat dengan meningkatnya harga lahan di Desa Bojonggede, terutama untuk lahan yang berada di sepanjang jalur transportasi.

Peningkatan harga lahan bukan hanya untuk lahan yang akan dikembangkan untuk kawasan pemukiman, tetapi juga lahan yang digunakan untuk usaha perdagangan dan jasa. Peningkatan harga lahan ini berkisar 3 – 5 kali lipat dari harga sebelum

dikembangkannya kawasan pemukiman (KPR). Peningkatan harga lahan di Desa Bojonggede selain dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya permintaan lahan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan rumah, terutama bagi *commuter* yang semakin memadati Desa Bojonggede.

Harga lahan di Desa Bojonggede sebelum perkembangannya saat ini (tahun 1987 – 1990) rata-rata hanya Rp 30.000 per m². Namun harga tanah saat ini per m² rata-rata Rp 150.000. Harga ini tentunya disesuaikan dengan letak dari lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai harga lahan dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut :

TABEL IV.12
HARGA LAHAN DI DESA BOJONGGEDE MENURUT STATUS DAN
PENGGUNAANNYA

Status / Penggunaan Lahan	Harga Lahan / m ²
Hak milik adat	Rp 36.000 – Rp 82.000
Hak Guna Bangunan (HGB)	Rp 20.000
Komplek Pemukiman	Rp 200.000 – Rp 335.000

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa harga lahan tertinggi adalah lahan yang dialokasikan sebagai kawasan pemukiman (KPR) yang dikelola oleh developer. Namun apabila penduduk pendatang membeli lahan langsung ke penduduk asli, maka tidak akan semahal pembelian KPR, dimana untuk harga lahan tersebut hanya Rp 150.000 per m². Peningkatan harga lahan ini pada gilirannya akan mengakibatkan semakin sulitnya memperoleh lahan karena adanya persaingan harga lahan yang cukup tinggi.

Menurut Sujarto (1985:7) adanya perkembangan wilayah yang difasilitasi dengan pembangunan transportasi selain menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, juga akan meningkatkan nilai lahan. Peningkatan harga lahan ini akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran bagi penduduk asli yang

memiliki lahan luas. Penduduk asli yang memiliki lahan luas dan dijual sebagian besar menggunakan hasil penjualan tanah tersebut untuk membangun rumah baru, membeli kendaraan bermotor dan menunaikan ibadah haji. Seperti yang dikemukakan oleh seorang informan:

.....sekarang ini hampir tidak ada pemilik tanah di Bojonggede yang tidak pernah menjual tanahnya. Apalagi orang-orang tua yang belum pernah naik haji....naiknya harga tanah jadi kesempatan buat mereka, karena pada umumnya mereka sulit untuk memiliki uang banyak jika bukan dari hasil menjual tanah.....

Orang-orang tua di sini, banyak yang terlalu memaksakan diri sendiri pergi haji...meskipun mereka harus jual rumah dan tanah.....yang penting cita-citanya kesampaian.....

Peningkatan harga lahan di Desa Bojonggede semakin meningkatkan prosentase penjualan lahan dari penduduk asli ke pendatang, developer maupun ke penduduk asli. Hal ini sesuai dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Sehingga dengan menjual lahan yang dimiliki, dengan harga yang relatif tinggi penduduk asli desa Bojonggede dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan harga lahan tersebut menjadi daya tarik bagi penduduk asli untuk menjual lahannya baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga semakin mempercepat proses transformasi tata guna lahan dan pola pemilikan lahan yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat pinggiran kota.

4.3.2 Implikasi Perubahan Kondisi Sosial Penduduk Desa Bojonggede

Perkembangan Desa Bojonggede sebagai imbas dari *spread effect* Jakarta sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan kondisi sosial penduduk. Perubahan kondisi sosial (transformasi kehidupan sosial) ini dapat dilihat dari frekuensi melakukan hubungan antar masyarakat, keakraban hubungan dan tolong-menolong sesama penduduk yang semuanya pada saat ini mulai berkurang. Terjadinya transformasi dalam kehidupan sosial

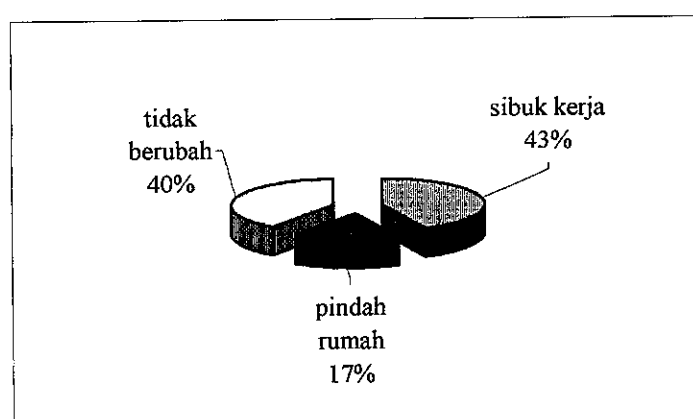
penduduk Desa Bojonggede tersebut terjadi karena adanya budaya dan kebiasaan baru yang mungkin berbeda sama sekali dengan apa yang ada di penduduk asli.

Sifat dan karakter dari penduduk Desa Bojonggede mulai terpengaruh dengan sifat dan karakter masyarakat kota (Jakarta), seperti individual serta egoistis. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perubahan dalam hubungan antar masyarakat tersebut seperti masing-masing individu telah sibuk dengan urusannya, sehingga jarang berada di rumah, bekerja mencari nafkah dan aktivitas lainnya, banyak diantara tetangga yang sudah tidak bertempat tinggal di tempat semula, karena tanah dan rumahnya telah dijual. Secara lebih jelasnya dilihat pada tabel IV.11 dan gambar 4.11 berikut ini.

TABEL IV.13
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KONDISI SOSIAL PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

No	Latar Belakang Perubahan Kondisi Sosial	Jumlah	Prosentase %
1	Sibuk kerja	13	43
2	Pindah rumah	5	17
3	Tidak berubah	12	40
		30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2004



GAMBAR 4.12
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KONDISI SOSIAL PENDUDUK DESA BOJONGGEDE

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa 43 % penduduk sibuk bekerja dan menjalankan aktivitas lainnya, sehingga aktivitas sosial dengan penduduk lain berkurang. 17 % penduduk merasa hubungan sosial dengan penduduk lain berkurang karena tetangganya banyak yang pindah rumah. Hal ini sebagian besar dialami oleh penduduk asli Desa Bojonggede, dimana tetangganya yang juga merupakan penduduk asli telah menjual lahannya ke pendatang, yang cenderung sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Sedangkan 40 % penduduk berpendapat bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan sosial di antara penduduk Desa Bojonggede.

Munculnya kecenderungan sifat individual dan egoistis tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial penduduk tersebut tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya kesibukan dan aktivitas dari masing-masing individu, tetapi juga terkait dengan kecenderungan semakin menurunnya jumlah penduduk asli dan proporsi penduduk pendatang yang cenderung semakin meningkat. Tentunya penduduk pendatang tersebut memiliki latar belakang sosial dan budaya dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga untuk menumbuhkan rasa keakraban dan kebersamaan antara penduduk pendatang dan penduduk asli tidaklah mudah.

Jika dahulu sesama penduduk masih sering tolong menolong tanpa pamrih meski diantara mereka tidak terdapat hubungan kekerabatan, namun ketika sebagian besar desa Bojonggede telah dimasuki penduduk pendatang, sifat gotong-royong tersebut mulai hilang. Perubahan tersebut dikarenakan adanya sebagian besar penduduk (terutama penduduk pendatang) merasa tidak memiliki waktu luang karena banyak kesibukan, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan kampung an lebih senang melakukan sesuatu dengan menyuruh seseorang untuk menggantikannya dengan imbalan upah tertentu. Hal ini sering terjadi dalam kegiatan siskamling dan kerja bakti.

Dengan demikian, secara umum penduduk di desa Bojonggede mengalami perubahan dalam menggunakan waktu, tempat dan aktivitas untuk berhubungan dengan sesama penduduk, baik asli maupun pendatang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dari hubungan sosial dengan pola informal kepada pola formal. Perubahan ini menurut Wirth merupakan adanya perkembangan struktur kota yang ditandai oleh pola hubungan sosial yang cenderung lebih rasional dan bersifat formal. Perubahan tersebut sangat berkaitan dengan fenomena kependudukan yang padat dan heterogen.

4.3.3 Implikasi Perubahan Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Bojonggede

Adanya pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian berimplikasi pada sulit dan mahal nya harga produksi pertanian seperti sayur-sayuran, ubi-ubian dan kacang-kacangan, karena lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga semakin terdesak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan Desa Bojonggede disatu sisi melemahkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok penduduk asli, disisi lain semakin memperkuat dan membuka peluang baru di sektor usaha non pertanian terutama di sektor perdagangan dan jasa.

Terjadinya perubahan kondisi ekonomi penduduk yang berimplikasi pada semakin sulit dan mahal nya produksi pertanian, juga berimplikasi pada semakin berkembangnya sektor informal di Desa Bojonggede. Perkembangan sektor informal di Desa Bojonggede salah satunya disebabkan oleh semakin lemahnya sektor pertanian, sehingga banyak penduduk yang berpindah ke sektor informal.

Perubahan dalam kepemilikan dan penggunaan lahan di Desa Bojonggede yang diikuti oleh sejumlah kesempatan usaha sektor informal dirasa lebih variatif dan menguntungkan. Kenyataan ini semakin mendorong masyarakat, bukan hanya penduduk asli, tetapi juga penduduk pendatang untuk memanfaatkan kesempatan emas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sektor perdagangan dan jasa mendominasi mata pencaharian penduduk, dimana perdagangan tersebut mencakup berbagai kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari sandang, pangan, bahan-bahan bangunan, peralatan rumah tangga hingga kebutuhan hidup lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan toko-toko, kios dan minimarket.

Bila ditinjau menurut tipologi Breman, perubahan mata pencaharian ke sektor informal tersebut mengarah pada semakin besarnya kelompok pekerja atau pencari nafkah dalam kategori *sub-proletariat*, yaitu pedagang kecil dan buruh. Sedangkan menurut tipologi Friedman dan Sullivan, pedagang kecil termasuk dalam kategori *family enterprise sektor*, sedangkan buruh termasuk dalam *individual enterprise workers* (Maning, 1984). Kelompok *sub-proletariat* ini paling banyak berkembang, karena adanya kemudahan dan memiliki kelebihan, yaitu tidak memerlukan ketrampilan atau keahlian khusus serta hanya memerlukan modal yang relatif sedikit.

Peningkatan sektor informal yang cukup pesat di desa Bojonggede sedikit banyak dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat di desa tersebut yang sebagian besar penduduknya berpendidikan menengah ke bawah, sehingga untuk memasuki dunia kerja di sektor formal relatif sulit, karena dalam sektor formal diperlukan keterampilan dan keahlian khusus. Sehingga banyak masyarakat yang memilih sektor informal, karena cukup mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan pendidikan formal dan keahlian khusus.

Selain berkembangnya sektor informal, perkembangan Desa Bojonggede juga berpengaruh terhadap peran ekonomi subsisten dan pekerjaan sampingan yang dimiliki masyarakat. Produksi subsisten adalah bagian dari produksi pertanian yang dikonsumsi oleh para anggota rumah tangga itu sendiri, atau dengan kata lain produsen sekaligus menjadi konsumen, sehingga tidak terjadi interaksi pasar.

Terdesaknya lahan pertanian yang berimplikasi pada semakin rendahnya produksi pertanian berpengaruh terhadap peran produksi subsisten. Produksi subsisten selama ini bergantung pada pertanian, namun karena terjadinya pergeseran maka produksi subsisten diganti dengan bentuk lain yang dirasa lebih sesuai dengan kondisi yang ada, seperti menanam sayuran, membuat kerajinan.

Di samping terjadi perubahan pada produksi subsisten, sebagian penduduk juga kehilangan pekerjaan sampingannya. Hal ini terjadi karena kerajinan bambu seperti kursi, lemari dan berbagai aksesoris rumah yang merupakan *landmark* dari Desa Bojonggede dan merupakan sumber mata pencaharian tambahan bagi penduduk menjadi punah, karena adanya aktivitas pembangunan fisik yang menghabiskan hutan-hutan bambu, sehingga menyebabkan persediaan bambu sebagai bahan baku usaha sampingan mereka menjadi berkurang bahkan habis.

Kegiatan usaha lainnya yang juga hilang adalah “pasar rambanan”, yaitu pasar pagi yang terdapat di stasiun kereta. Pasar ini menjual berbagai sayur-sayuran yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan kereta pertama dipagi hari menuju Jakarta. Lahan penghasil sayur-sayuran di Desa Bojonggede juga semakin terdesak akibat dari berkembangnya aktivitas yang membutuhkan tempat, seperti perumahan dan perdagangan dan jasa.

Begitu pula dengan aktivitas perikanan yang juga mengalami penurunan dan bahkan hampir tidak ada kolam-kolam ikan lagi, karena penduduk asli yang memiliki kolam, cenderung mengurug tanahnya dan dialihfungsikan untuk kegiatan lain atau dijual. Sama halnya dengan penduduk yang semula memiliki lahan pertanian yang tidak terlalu luas yang digunakan sebagai pekerjaan sampingan juga menjadi penurunan. Namun hal

tersebut tidak penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, mengingat penduduk tersebut masih memiliki pekerjaan utama di samping pertanian.

4.4 Verifikasi Teoritis dan Empiris

4.4.1 Verifikasi Teoritis

Hipotesis Teoritis yang merupakan kesimpulan dari kajian fenomena perkembangan wilayah pinggiran, diketahui:

1. Proses urbanisasi di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Harga lahan yang murah yang tidak didapatkan di daerah perkotaan
 - b. Sarana transportasi menuju pinggiran kota yang lebih baik
2. Proses urbanisasi di suatu daerah disertai dengan perubahan terhadap sistem pemilikan dan pola penggunaan lahan.
3. Perubahan dalam sistem kepemilikan dan pola penggunaan lahan akan diikuti oleh perubahan struktur mata pencaharian dan nilai sosial budaya penduduk asli.

Setelah dilakukan analisis mengenai fenomena perkembangan urbanisasi di desa Bojonggede, dapat diketahui bahwa :

1. Penduduk pendatang memilih tinggal di desa Bojonggede karena didorong oleh:
 - a. Harga lahan di desa Bojonggede lebih rendah bandingkan harga lahan di perkotaan (Jakarta).
 - b. Keberadaan jalur kereta di desa Bojonggede yang memudahkan pencapaian ke tempat kerja (Jakarta).
2. Penggunaan lahan di desa Bojonggede yang digunakan sebagai sawah (areal pertanian) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan luasan sebesar 5 %. Kenaikan lahan untuk kawasan permukiman tersebut sangat

dipengaruhi karena adanya permintaan kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Perubahan lahan ini diikuti meningkatnya kecenderungan jual beli tanah dikalangan penduduk asli, sehingga terjadi perubahan pemilikan lahan ke penduduk pendatang, pemilikan lahan yang luas menjadi sempit dan pemilikan dari satu orang kepada orang banyak.

3. Terjadi perubahan mata pencaharian penduduk asli, ditandai dengan meningkatnya sektor perdagangan, yaitu 46%, sektor usaha angkutan sebesar 16,7%, sektor jasa 6,7 % dan untuk sektor pertanian justru mengalami penurunan. Terjadi kecenderungan perubahan hubungan sosial dari pola informal kepada pola formal.

Berdasarkan hasil yang didapatkan ditahapan analisis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis teoritis yang dikemukakan dalam penelitian *terbukti* dilapangan.

4.4.2 Verifikasi Empiris

Berdasarkan kajian terhadap deskripsi wilayah desa Bojonggede, diketahui hipotesis empiris yang mendasari penelitian ini, yaitu proses urbanisasi di desa Bojonggede menyebabkan terjadi beberapa perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Perubahan tersebut diantaranya meliputi:

1. Peningkatan jumlah penduduk desa Bojonggede
2. Pola penggunaan dan kepemilikan lahan di desa Bojonggede
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Setelah dilakukan analisis mengenai fenomena perkembangan urbanisasi di desa Bojonggede, dapat diketahui bahwa

- a. Rata-rata pertumbuhan penduduk di desa Bojonggede cukup tinggi, yaitu sebesar 20% per tahun, dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk dari 18.183 jiwa pada tahun 1998 menjadi 24.220 pada tahun 2002.
- b. Terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dominan di desa Bojonggede menjadi non pertanian, khususnya perumahan dan perdagangan sebesar 5%, dimana 66 % penduduk asli telah menjual tanahnya kepada penduduk pendatang dan dominasi lahannya digunakan sebagai areal permukiman
- c. Dominasi mata pencaharian penduduk terjadi pergeseran dari dulunya dominan petani (63,3%) menjadi dominasi pedagang (46,7%). Serta terjadi penurunan nilai sosial yang disebabkan penduduk tidak mempunyai waktu luang karena banyak kesibukan (30%).

Berdasarkan hasil yang didapatkan ditahapan analisis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis empiris yang dikemukakan dalam penelitian *terbukti* dilapangan.

4.5 Proses Perkembangan Urbanisasi di Desa Bojonggede dalam teori/konsep urbanisasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi eksisting di Desa Bojonggede serta implikasi yang dihasilkan, diketahui bahwa desa Bojonggede mengalami proses perkembangan urbanisasi. Adapun tahapan-tahapan proses perkembangan urbanisasi yang terjadi di desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

Tahapan I : Urbanisasi

Secara harfiah urbanisasi berarti *pengkotaan* yaitu proses menjadi kota; jadi logisnya yang mengalami proses pengkotaan itu justru daerah pemukiman yang bukan

kota. Pengkotaan berarti meningkatnya bagian penduduknya yang bertempat di kota, kemudian kota-kota itu sendiri yang tumbuh dan meluas atau mekar istilahnya. Pinggiran-pinggiran yang semula pedesaan berubah menjadi kota (Daldjoeni, 1998).

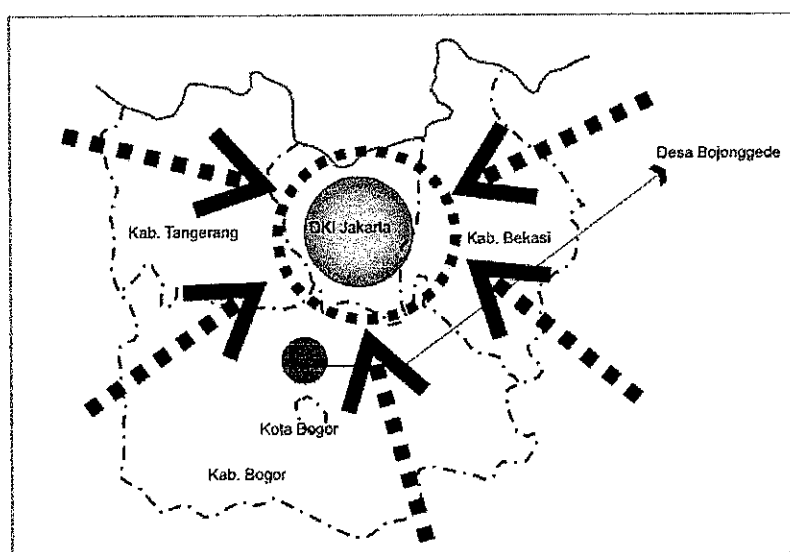
DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia merupakan kota di Indonesia yang mempunyai perkembangan dan pembangunan yang pesat, dibanding dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa. Di samping dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap, DKI Jakarta juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain, dalam hal luasnya lapangan kerja, pendapatan/upah yang lebih tinggi dan adanya selingan serta hiburan dalam kehidupan. Pada perkembangannya terjadi proses urbanisasi yaitu berpindahnya penduduk dari daerah lain menuju ke DKI Jakarta. Selain karena adanya faktor pendorong yang berasal dari tempat asalnya dan menyebabkan mereka pindah menuju ke DKI Jakarta, faktor penarik di atas juga menarik para pendatang untuk datang dan mengadu nasib di DKI Jakarta. Seperti yang diungkapkan seorang informan berikut:

.....kehidupan di Jakarta itu lebih menjanjikan, karena cari kerja gampang sih..... asal mau berusaha aja,...disamping semua serba ada di Jakarta.....

Urbanisasi adalah salah satu masalah kependudukan yang dapat menghambat pembangunan khususnya daerah perkotaan, DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan juga tidak terlepas dari masalah ini. Jumlah pendatang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari DKI Jakarta. Diperkirakan laju pertumbuhan migrasi neto di DKI Jakarta sekitar 4,06% per tahun.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tanpa diimbangi dengan fasilitas yang memadai akan menimbulkan masalah di bidang keamanan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. Daerah kumuh umumnya dihuni oleh kaum pendatang. Mereka yang datang

ke DKI Jakarta tanpa disertai dengan pendidikan, keahlian dan keterampilan yang memadai akan tersingkir dari kompetisi memperoleh pekerjaan. Keadaan ini cukup menyulitkan dalam perencanaan pembangunan di DKI Jakarta. Akibatnya DKI Jakarta mengalami berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat proses urbanisasi ini, seperti munculnya lingkungan permukiman yang kumuh, meningkatnya tingkat kriminalitas serta terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk jelasnya mengenai tahap urbanisasi ini dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini.



Keterangan:



: CBD (dalam hal ini adalah Jakarta)



Arah Migrasi



: Commuter's zone (Desa Bojonggede)

GAMBAR 4.13
TAHAP URBANISASI

Sumber : Hasil Analisa, 2004

Tahapan II : Suburbanisasi

Karena lahan merupakan sumber daya yang sangat langka dan mahal di daerah perkotaan, maka penggunaan lahan yang tidak produktif akan digantikan oleh lahan yang lebih produktif dan menguntungkan. Terutama di pusat kota, yang merupakan lokasi di

tempat tersebut harus produktif dan menguntungkan pula, namun karena keterbatasan dan mahalnya harga lahan, kecenderungan ke pusat kota mulai bergeser ke pinggiran, untuk mencari lahan yang luas dan murah. Pergeseran ini tak jarang juga menggantikan penggunaan lahan pertanian yang banyak terdapat di wilayah pinggiran. Gejala diatas dalam hal ini disebut sebagai gejala suburbanisasi.

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), menyebabkan kebutuhan terhadap lahan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan sosial semakin meningkat. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga lahan, terutama di kawasan tersebut, menjadi semakin mahal. Akibatnya aktivitas ekonomi yang membutuhkan areal perumahan, banyak dibangun pada lahan pertanian di wilayah pinggiran (Pakpahan, 1992). Tersedianya sarana jalan yang memadai dan fasilitas penunjang lainnya, telah mempercepat pengembangan wilayah pinggiran.

Menurut data statistik telah terjadi pergeseran penduduk ke wilayah Botabek, selama 10 tahun (1990-2000) penduduk Botabek bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,32 persen per tahun, sementara penduduk Jakarta hanya bertambah dengan laju 2,41 persen per tahun. Akibatnya pembangunan perumahan untuk pemukiman juga meningkat pesat. Bila diperhitungkan jumlah pembangunan areal perumahan yang dilakukan penduduk secara sporadis tentu angka ini akan lebih besar lagi. Perkembangan perumahan yang pesat ini setidaknya mengurangi luas lahan pertanian yang ada di Pinggiran, termasuk di Bojonggede.

Bojonggede sebagai wilayah pinggiran dari DKI Jakarta mengalami proses suburbanisasi, dimana gejala ini terlihat dengan semakin berkurangnya lahan pertanian dan diganti dengan penggunaan perumahan. Berbagai alasan yang menyebabkan penduduk

berpindah ke Desa Bojonggede yang merupakan wilayah pinggiran dari Jakarta, antara lain:

- a. Penggunaan lahan untuk pemukiman di DKI Jakarta harus bersaing dengan penggunaan lahan lain yang lebih komersial, sehingga lahan yang tersedia untuk kawasan pemukiman semakin berkurang, karena kalah dalam peruntukan lahan untuk aktivitas komersial.
- b. Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta sehingga menyebar ke wilayah lain, diantaranya ke Desa Bojonggede.
- c. Sarana transportasi menuju wilayah Desa Bojonggede bertambah baik sehingga mempermudah akses yang memungkinkan penduduk pindah lebih jauh dari DKI Jakarta dan menyebar ke pinggiran kota sepanjang jalur transportasi
- d. Tingkat kenyamanan hidup di DKI Jakarta semakin menurun, sehingga penduduk pusat kota lebih memilih tinggal di wilayah pinggiran karena menginginkan tempat tinggal lebih luas dan tenang
- e. Pemerintah telah membantu penduduk untuk mengusahakan kepemilikan tanah yang relatif mudah, dengan syarat-syarat pembayaran yang ringan di Desa Bojonggede, dengan kredit yang terjangkau masyarakat.

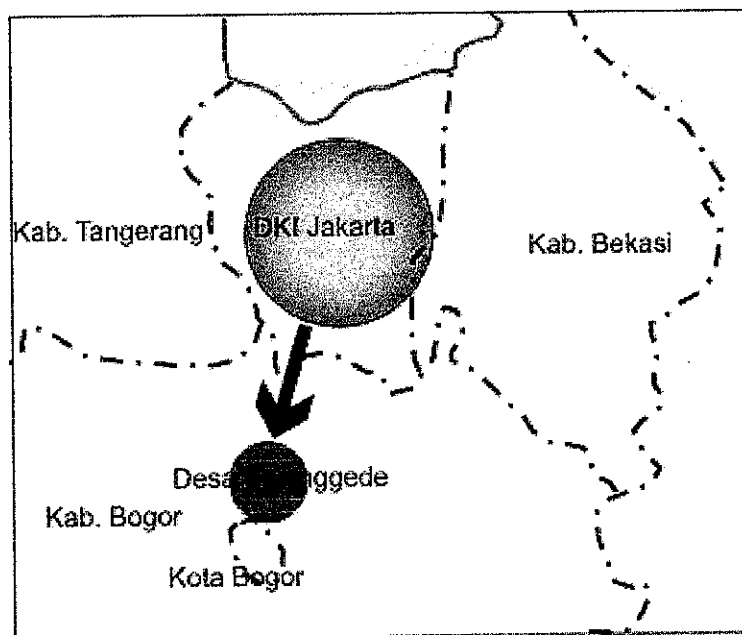
Alasan tersebut diatas, diperkuat dengan pernyataan seorang informan yang mengatakan:

.....boro-boro buat beli tanah di Jakarta, ngontrak aja mahalnya bukan main.....enak aja sih tinggal di Bojonggede, soalnya harga tanah masih murah.....biar jauh dari Jakarta, masih bisa dilaju bolak balik dengan kereta.....suasananya lebih tenang daripada tinggal di Jakarta.....

Adapun konsekuensi dari perkembangan Desa Bojonggede ini menyebabkan terjadi perubahan yang ditandai dengan:

- Pergeseran pola pemilikan tradisional yang berdasarkan garis keturunan
- Perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non-pertanian, terutama untuk kepentingan perumahan penduduk yang semakin meningkat
- Perubahan pola mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian kepada sektor non pertanian
- Perubahan dalam hubungan sosial

Untuk jelasnya mengenai tahap suburbanisasi di desa Bojonggede dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini.



Keterangan:



: CBD (dalam hal ini adalah Jakarta)



Arah Migrasi



: Commuter's zone (desa Bojonggede)

GAMBAR 4.14
TAHAP SUBURBANISASI

Sumber : Hasil Analisa, 2004

Tahapan III : Conurbanization

Conurbation merupakan proses menyatunya serangkaian kota-kota (*urban areas*) sehingga fenomena penataan kota meluas hingga memiliki dimensi regional, dimana pada saat ini *conurbation* terjadi apabila dua kota metropolitan dalam perkembangannya “menyatu” (Soegijoko, 1993)..

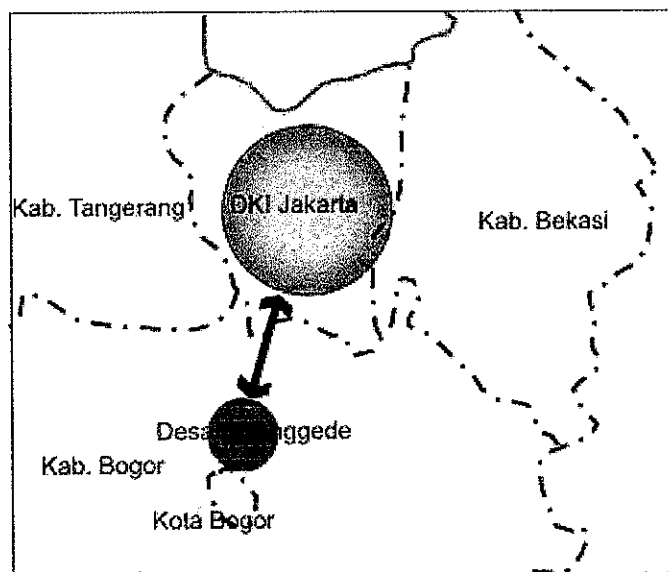
Perkembangan pesat yang terjadi di desa Bojonggede, akibat fenomena migrasi yang cukup tinggi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konurbasi, dimana terjadi proses penyatuan Desa Bojonggede yang dulunya desa kini berubah memiliki sifat perkotaan seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Proses ini ditunjang dengan keberadaan jalur kereta api yang dapat memperpendek jarak tempuh antara DKI Jakarta dengan desa Bojonggede serta jalan raya yang dilengkapi dengan jumlah armada yang memadai. Konurbasi yang terjadi di desa Bojonggede ditandai oleh :

- a. Pertambahan jumlah penduduk dengan proporsi yang hampir seimbang antara penduduk asli desa Bojonggede dengan penduduk pendatang
- b. Perubahan kepemilikan dan pola penggunaan lahan, yang dapat dilihat dari :
 - Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah dan fasilitas pendukungnya
 - Meningkatnya kepemilikan lahan oleh penduduk pendatang yang menggeser dominasi kepemilikan lahan oleh penduduk asli
- b. Perubahan kondisi ekonomi penduduk desa Bojonggede, yang dapat dilihat dari :
 - Perubahan pola mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke non pertanian , karena semakin terdesaknya lahan pertanian
 - Berkembangnya sektor informal, terutama dalam bidang perdagangan dan jasa
 - Berkembangnya usaha ekonomi yang lebih variatif




c. Perubahan kondisi sosial penduduk, yang dilihat dari :

- Lunturnya sifat dan karakter tolong menolong dan gotong royong
- Munculnya sifat individual dan egoistis pada masyarakat

Untuk jelasnya mengenai tahap konurbasi di desa Bojonggede dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini.



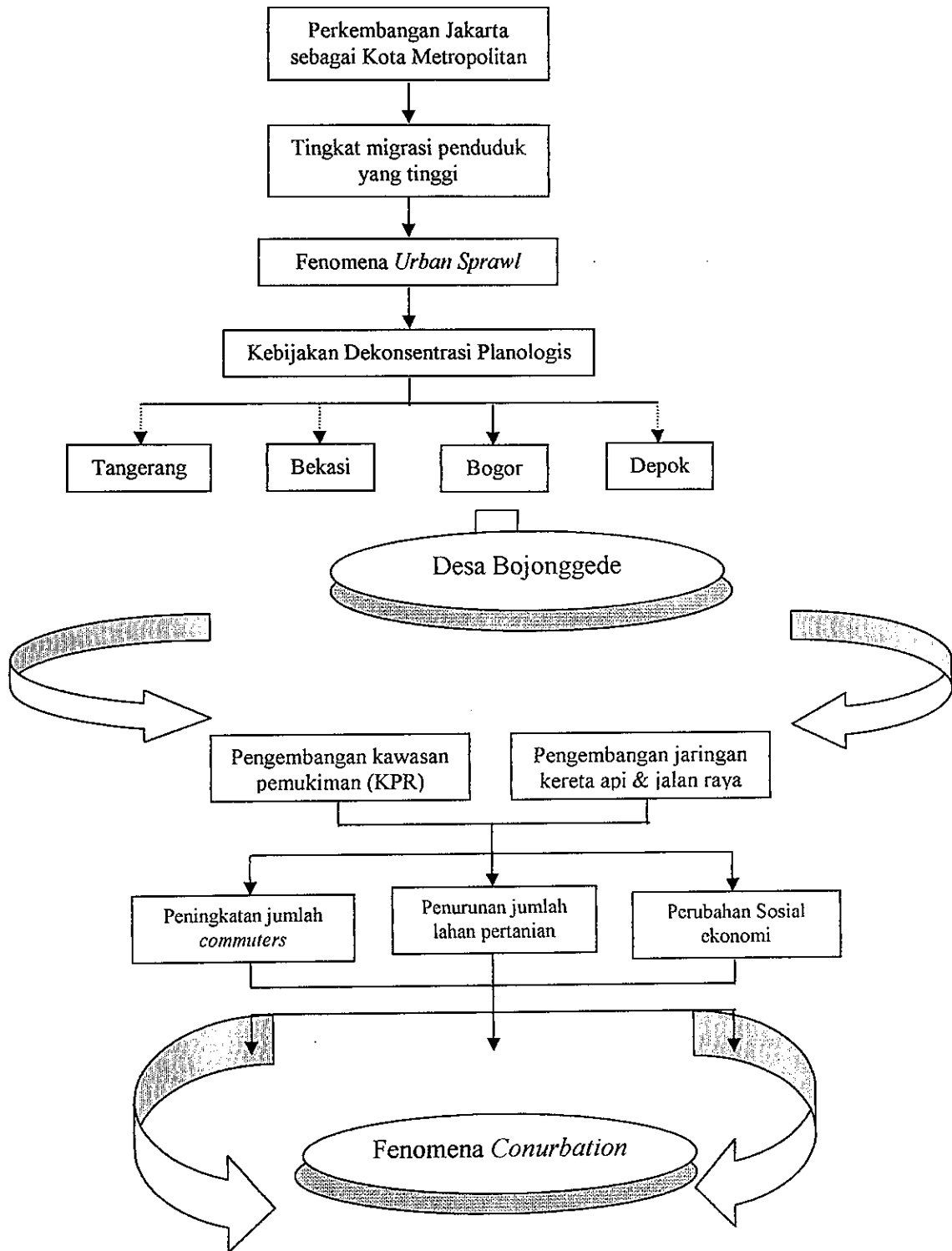
Keterangan:

-  : CBD (dalam hal ini adalah Jakarta)
  Proses Konurbasi
-  : Commuter's zone (Desa Bojonggede)

GAMBAR 4.15
TAHAP KONURBASI

Sumber : Hasil Analisa, 2004

Secara diagramatis, fenomena perkembangan wilayah di Desa Bojonggede hingga terjadinya proses *conurbation* dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini :



GAMBAR 4.16
FENOMENA TERJADINYA PROSES *URBANISASI* DI DESA BOJONGGEDE

Adapun mengenai tahapan proses perkembangan desa Bojonggede, tersaji dalam tabel IV.14 berikut ini.

TABEL IV.14
TAHAPAN PROSES PERKEMBANGAN DESA BOJONGGEDE

No	Tahapan Perkembangan	Kondisi desa Bojonggede			
		Penduduk	Guna Lahan	Perilaku sosial ekonomi	Transportasi
1.	Pedesaan	Penduduk asli lebih dominan	Pertanian dan perkebunan	Eratnya kekerabatan dan sifat kegotongroyongan masih tinggi	Angkutan pedesaan
2.	Urbanisasi	Penduduk asli semakin berkurang	Sektor pertanian semakin berkurang	Kekerabatan dan kegotongroyongan semakin berkurang	Angkutan pedesaan, ojek dan kereta api kelas ekonomi
3.	Suburbanisasi	Penduduk asli berkurang, penduduk pendatang semakin banyak	Terjadi pergeseran dari pertanian menjadi permukiman	Kekerabatan dan kegotongroyongan semakin berkurang	Angkutan pedesaan, ojek dan kereta api kelas ekonomi dan ekspres
4.	Konurbasi	Penduduk pendatang semakin meningkat jumlahnya	Permukiman lebih dominan	Kekerabatan dan kegotongroyongan semakin berkurang	Angkutan pedesaan, ojek dan kereta api kelas ekonomi dan ekspres

umber : Hasil Analisis, 2004

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Temuan Studi

Proses perkembangan kota di Desa Bojonggede merupakan salah satu implikasi dari proses alami dan kebijakan “dekonsentrasi planologis” Kota Jakarta. Proses tersebut, baik secara alami maupun terencana telah meningkatkan aktivitas pembangunan fisik dan konsentrasi penduduk di Bojonggede yang disebabkan oleh masuknya arus migrasi perkotaan yang cukup besar.

Pembangunan sarana transportasi dan komunikasi, pemasangan instalasi listrik, pembangunan kompleks-kompleks perumahan, serta sejumlah fasilitas umum dan sosial menandai proses perkembangan kota di Desa Bojonggede. Pada tahap lebih lanjut, proses perkembangan kota tersebut diikuti oleh beberapa perubahan fisik, ekonomi dan sosial kultural di kalangan penduduk asli.

Beberapa perubahan dalam kehidupan penduduk asli yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ini antara lain:

1. Perubahan pola pemilikan lahan, ditandai oleh meningkatnya pemilikan tanah oleh penduduk pendatang menggeser dominasi pemilikan tanah oleh penduduk asli
2. Perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian, terutama untuk kepentingan perumahan penduduk yang semakin meningkat pesat.
3. Perubahan pola mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian kepada sektor non-pertanian, yang ditandai oleh:
 - a. Berkembangnya sektor ekonomi non-formal, terutama bidang perdagangan dan jasa

- b. Bergesernya status sebagian besar penduduk dalam mata pencaharian dari kedudukan sebagai petani pemilik kepada kedudukan mata pencaharian usaha sendiri
- c. Adanya peningkatan pendapatan dalam sebagian besar penduduk asli

4. Perubahan dalam hubungan sosial, yang ditandai oleh:

- a. Penurunan intensitas dan frekuensi hubungan antar sesama penduduk asli
- b. Perubahan media dan waktu yang biasa digunakan untuk berkumpul antara sesama penduduk asli

Perubahan sosial-ekonomi yang ditandai proses perkembangan kota di Desa Bojonggede, merupakan satu kesatuan perubahan (sistem) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Aktivitas pembangunan fisik dan masuknya sejumlah pendatang baru yang mengiringi proses perkembangan kota di Bojonggede, telah merubah fungsi sejumlah lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Perubahan tersebut menyebabkan bergesernya nilai dan fungsi lahan, dari lahan sebagai penghasil komoditas pertanian (alat), yang biasa diperjualbelikan. Meningkatnya harga tanah menjadi beberapa kali kali, semakin menarik penduduk asli untuk menjual lahan yang dimilikinya. Keadaan ini semakin menurunkan produksi pertanian di Desa Bojonggede, karena alih pemilikan tersebut juga disertai dengan alih fungsi dari pertanian kepada non-pertanian.

Perubahan dalam fungsi dan pemilikan lahan tersebut, pada gilirannya diikuti oleh perubahan pola mata pencaharian dan perubahan sosialkultural di kalangan penduduk asli. Pada mulanya mata pencaharian penduduk sangat bergantung pada lahan pertanian, tetapi dengan semakin mengecilnya lahan yang dimiliki serta adanya faktor perubahan

alamiah (menurunnya kesuburan tanah), menyebabkan sebagian besar penduduk asli harus mengalihkan mata pencahariannya kepada sektor non-pertanian.

Munculnya sejumlah sektor informal terutama perdagangan dan jasa, sebagaimana pencaharian "baru" di kalangan penduduk asli, sangat kondusif dalam kehidupan masyarakat Desa Bojonggede yang tengah mengalami transisi dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Karena tumbuhnya masyarakat perkotaan baru di Bojonggede, semakin menuntut tersedianya berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, proses perkembangan kota tersebut memberikan peluang usaha yang lebih luas dan lebih menguntungkan bagi penduduk asli.

Bergesernya basis ekonomi masyarakat dari sektor pertanian kepada non-pertanian, semakin meningkatnya aktivitas dan kesibukan kerja penduduk. Dalam aktivitas ekonomi perkotaan (perdagangan dan jasa), penduduk dituntut lebih banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya. Sebaliknya dalam sektor pertanian, terutama pesawahan kesibukan kerja penduduk sangat tergantung kepada musim.

Oleh karena itu, bergesernya pola mata pencaharian penduduk tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial dan interaksi sosial mereka. Kesibukan penduduk dalam usahanya yang baru, semakin menyita waktu dan tenaga mereka, sehingga pola-pola hubungan sosial dengan keluarga (anak-anak) dan dengan tetangganya yang sudah mapan, mengalami perubahan. Perubahan dari pola hubungan *gemeinschaft* yang sudah mapan, mengalami perubahan. Perubahan dari pola hubungan *gemeinschaft* yang secara umum merupakan ciri masyarakat pedesaan kepada pola hubungan *gemeinschaft* yang biasanya diidentikan dengan kehidupan masyarakat kota. Gotong-royong dan tolong menolong yang diwujudkan dalam bentuk saling menukar barang, jasa atau tenaga mulai memudar.

Kesibukan penduduk dalam pekerjaan juga turut mempengaruhi perilaku sosial penduduk, khususnya dalam pola konsumsi dan keagamaan. Meningkatnya pendapatan mereka serta tersedianya berbagai kebutuhan hidup perkotaan, seperti sarana transportasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, rekreasi dan sebagainya, semakin meningkatkan pola penggunaan uang (konsumsi) dan menambah biaya hidup sehari-hari. Peningkatan pola konsumsi ini antara lain tampak dari pemilikan alat-alat rumah tangga yang serba modern, tv, kulkas, mesin cuci dan kendaraan bermotor yang menunjukkan berubahnya gaya hidup penduduk asli yang cenderung lebih “mengkota”.

Pola konsumsi yang cukup besar di kalangan penduduk asli, juga berkaitan dengan pemenuhan ibadah haji. Karena status haji bagi penduduk asli tidak semena-mena melaksanakan perintah agama, tetapi juga mencerminkan nilai tradisional penduduk asli. Dengan gelar haji mereka mendapat kehormatan atau status sosial yang tinggi di dalam kehidupan masyarakat.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil temuan di atas dapat disimpulkan, bahwa di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terjadi proses sebagai berikut :

1. Urbanisasi
2. Sub urbanisasi
3. Konurbasi

Perubahan fisik, perubahan okupasi dan perubahan sosial-kultural akan selalu menyertai proses pengkotaan suatu daerah (urbanisasi), dalam hal ini transisi dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan yang disebabkan oleh adanya pemekaran kota.

5.3 Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi dalam hal ini berkaitan dengan studi lanjutan, untuk menunjang perbendaharaan mengenai fenomena urbanisasi desa, diantaranya:

1. Pemerintah perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya ketiga proses tersebut diatas.
2. Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya dampak konurbasi di wilayah desa diharapkan dapat melakukan kebijakan untuk penambahan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakatnya antara lain dengan dibangunnya terminal angkutan umum, penambahan sarana transportasi yang memadai dan perbaikan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Angoti, T. 1993. *Metropolis 2000*. London: Routhledge.
- Berry, J.L., Brian. 1970. *Geographich Perspective On Urban System*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Bourne, S. Larry. 1982. *Internal Structure of The City*. London: Oxford University Press.
- Bintarto, R. 1989. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, Eko. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Branch, Melville C. 1995. *Comprehensive City Planning: Introduction and Explanation*, (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Chapin, F. Stuart and Kainer, Edward J. 1982. *Urban Land Use Planning*. Illinois: University of Illinois Press.
- Catanese. J. Anthony and Snyder, James C. 1989. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daldjoeni. 1997. *Geografi baru, Organisasi Keruangan Dalam teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- , 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial)*. Bandung: Alumni.
- , 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.
- Evers, H.D. 1986. *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Etzioni, Amitri dan Eva Etzioni (eds). 1973. *Sources, Patterns and Consequences*. New York: Basic Book Inc. Publisher.
- Hartson, A. Truman. 1980. *Interpeting The City: An Urban Geography*. Canada : John Wiley and sons, Inc.
- Harpel, A. Truman. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Pretice Hall Inc. Engewood Cliffs.
- Hasta, Proboatmodjo. 1993. *Perencanaan Kota Kecil dalam Konteks Wilayah Mega Urban*. Jakarta: Journal Perencanaan Wilayah dan Kota.

- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1989. *Sociology*. Terjemahan Aminuddin Ram dkk. Jakarta: Erlangga.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Johnson, James H. 1974. *Suburban Growth: Geographical Processes of Edge of the Western City*. London, New York, Sidney, Toronto: John Willey and Sons.
- Johnson, Paul D. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen Bagian I*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Koestoer, Raldi Hendro dkk. 2001. *Dimensi Keruangan Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini, 1992. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung :Mander Maju.
- Lee, Sim Loo. 1984. *A Study of Planned Shopping Centers in Singapore*. Singapore: Singapore Univ. Press for The Center for Advanced Studies.
- Manning, Chris. 1984. *Struktur Pekerjaan Informal dan Kemiskinan di Kota*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan-UGM.
- Marbun, BN. 1994. *Kota Masa Depan*. Jakarta: Erlangga.
- Mundihato. 1994. *Jabotabek Telah Menyatu Jadi Kota Raksasa*. Jakarta: Kompas.
- Moloeng, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pahls, R.E. 1965. *Urb in Rure: The Metropolitan Fringe in Herfordshire*. London: School of Economic and Political Science.
- Pakpahan, A, Sumaryanto, N. Syafaat, H.P Saliem, 1992. *Analisis Kebijakan Konversi Lahan sawah ke Penggunaan Non pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Poerbo, Hasan. 1993. *Katalis Fasilitator Pembangunan dan Konsultan Pembangunan*. Jurnal Sosiologi 2. Jakarta: Fisip UI.
- Pivo, Gary. 1990. *The Net of Mixed Beads: Suburban Office Development in Six Metropolitan Regions*. Autumn: APA Journal Vol. 56. No. 4.
- Potter, Robert B. dan Evans, Sally Lloyd. 1998. *The City in the Developing World*. Singapore: Addison Wesley Longman.
- Rahardjo. 1983. *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

- Richardson, W., Harry. 1978. *Regional Economic*. London: University of Illinois Press.
- Ruggs, S., Dean. 1979. *Spatial Foundation of Urbanism*. Brown Company Publisher.
- Sinulingga, Budi. D. 1999. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Eds).1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sujarto, Djoko. 1995. *Kota Baru: Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Bandung: Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Planologi.
- , 1989. *Faktor Sejarah Perkembangan Kota. Seri Perkotaan Nomor: 04/05/89*. Bandung: Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Planologi.
- Soedjito. 1987. *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Spencer, Metta. 1979. *Foundation of Modern Sociology*. New Jersey: Prantice Hall Inc. Englewood Clieffs.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Suselo, Hendropranoto. 1977. *Tinjauan Singkat Perkembangan Jabotabek*. Jakarta: Prisma Edisi Mei.
- Schoorl, J.W. 1982. *Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang berkembang)*. Jakarta: Gramedia.
- Subagio, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soetomo, Sugiono. 2002. *Dari Urbanisasi ke Morfologi Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yeates, Maurice dan Barry Garner. 1980. *The North American Cities*. San Fransisco, USA: Harper and Row Publisher.
- Yunus, HS. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.